

GENDER

dan Pendidikan Multikultural

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

GENDER

dan Pendidikan Multikultural

Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.

Wirdanengsih, S.Sos., M.Si.



GENDER DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Edisi Pertama

Copyright © 2016

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-422-118-8

13,5 x 20,5 cm

x, 188 hlm

Cetakan ke-1, November 2016

Kencana 2016.0733

Penulis

Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.

Wirdanengsih, S.Sos., M.Si.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Jefri

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tambah Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, baik akedemis maupun masalah-masalah praktis di lapangan. Secara akademis, kami melihat masih langkanya sumber-sumber dan buku-buku teks yang mengetengahkan tentang pendidikan multikultural yang berbasis gender. Secara praktis, berangkat dari pengalaman penulis sebagai peneliti dan pemerhati masalah gender, ternyata pemahaman tentang gender masih sangat elitis. Artinya masih terbatas pemahamannya tentang gender, baik di kalangan mahasiswa dan dosen sendiri, apalagi pada masyarakat luas. Dengan demikian, diharapkan kehadiran buku ini dapat membantu menjawab persoalan yang dikuatirkan selama ini.

Buku ini merupakan himpunan dari beberapa hasil penelitian yang sudah beberapa peneliti lakukan beberapa tahun terakhir ini. Meskipun demikian, buku ini masih banyak mengharapkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari informan sebagai praktisi maupun akademisi untuk memperkuat wawasan teoritis dan konseptual. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Padang melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 2014, penulisan buku teks dan buku ajar. Bantuan finansial dari program ini memicu penulis untuk menyelesaikan draft yang sudah dioret-oret sebelumnya. Berikutnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ti-

dak bisa kami sebutkan secara satu persatu dalam tulisan ini, mereka yang sudah banyak memberikan kontribusi terhadap penyelesaian buku ini.

Kami percaya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis selalu menunggu masukan, kritikan yang sangat diperlukan untuk penyempurnaan buku ini berikutnya. Atas bantuan, kritikan, dan masukan yang sudah diberikan oleh semua pihak kami haturkan terimakasih. Kami berdoa' semoga Tuhan memberikan balasan atas kebaikan itu semua. Akhirulkalam, kami tim penulis, dalam kesempatan ini pun mengucapkan ribuan maaf atas segala ketidaksempurnaan ini.

Padang, November, 2014

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PERMASALAHAN KEBERAGAMAN DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	13
A. Keberagaman Etnis	20
B. Keberagaman Kelompok Sosial	27
1. Proses Terbentuknya Kelompok Sosial	29
2. Syarat Terbentuknya Kelompok Sosial	30
3. Macam-Macam Kelompok Sosial	30
3. Ciri-ciri Kelompok Sosial	45
C. Keberagaman Ekonomi	47
D. Keberagaman Jenis Kelamin	57
E. Keberagaman Agama	61
BAB 3 MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM KONSTRUKSI GENDER	75
A. Faktor Ekonomi	77
B. Faktor Sosial Budaya	88

C.	Faktor Politik	102
D.	Faktor Interpretasi yang Bias Terhadap Teks- teks Agama	106
E.	Faktor Pendidikan	113
BAB 4	PENDIDIKAN MULTIKULTURAL RESPONSIF GENDER	127
A.	Pendidikan Responsif Gender di Rumah Tangga	128
1.	Pelatihan Kesadaran Perempuan dengan Metode Andragogi	134
2.	Prinsip-prinsip Belajar bagi Perempuan Dewasa	136
3.	Gender dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	138
B.	Pendidikan Responsif Gender di Sekolah	141
1.	Integrasi Gender Pada Satuan Pendidikan di Sekolah	146
2.	Manajemen Sekolah Pendidikan Berbasis Gender	149
3.	Gender dalam Sarana dan Prasarana di Sekolah	149
4.	Gender dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Sekolah	149
C.	Pendidikan Responsif Gender di Luar Sekolah dan Rumah Tangga	169
BAB 5	PENUTUP	181
	REFERENSI	185

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR

1	Keberagaman etnis di Indonesia	21
2	Keberagaman etnis dan agama	22
3	Contoh kelompok sosial	29
4	Komunitas geng motor yang memicu konflik/tawuran	29
5	Keluarga sebagai kelompok sosial yang sederhana/ kecil	31
6	Kegiatan jual beli di pasar yang juga termasuk dalam kelompok sosial yang terdiri dari banyak orang	32
7	Paguyuban dalam suatu Rukun Tetangga (RT)	36
8	Pedagang kakilima yang membentuk kelompok sosial	37
9	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	38
10	Kelompok remaja	39
11	Penonton bioskop	42
12	Kelompok tari	42
13	Kerumunan orang sedang mengantri tiket	43
14	Kerumunan yang panik	43
15	Kerumunan dalam sebuah kecelakaan	44
16	Demonstrasi yang berujung sebuah kerusuhan	44
17	Kelompok punk	45
18	Konflik antarkampung di Lampung	46
19	Konflik antarpelajar	46

20	Kasus kekerasan pekerja rumah tangga (PRT) di Kota Medan (awal Desember 2014)	56
21	Demo buruh	56
22	Seorang perempuan Hindu Bali sedang menempatkan sesajian di tempat suci keluarganya	66
23	Bhiksu Buddha melakukan ritual keagamaan mereka di Borobudur	67
24	Katedral di Jakarta	68
25	Konflik agama di Poso	72
26	Korban Perdagangan Perempuan	85
27	Perempuan Korban bisnis Prostitusi	85
28	Perempuan Korban HIV	98
29	Anak perempuan yang mengamen di jalanan/bus	119
30	Pembagian maskulin dan feminim pada anak usia dini	131
31	Kesepakatan gender dalam keluarga	132
32	Kesepakatan gender dalam keluarga	133
33	Perempuan pejuang keluarga	134
34	Perempuan petani	134
35	Pilot yang diidentikkan sebagai pekerjaan maskulin (untuk laki-laki)	143
36	Guru yang diidentikkan sebagai pekerjaan feminin (untuk perempuan)	143
37	Perempuan pembawa bendera merah putih	144

TABEL

1	Perbedaan antara jenis kelamin dan gender	60
2	Contoh integratif pembelajaran yang terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan	147
3	Contoh kurikulum responsif gender	157
4	Contoh tema pembelajaran berwawasan multikultural	168

1

Pendahuluan

Kompleksitas persoalan bangsa Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain luasnya wilayah Indonesia, kondisi strategis Indonesia yang menjadi rebutan antarnegara di dunia, keberagaman etnis yang sekaligus mencerminkan keberagaman budaya. Dengan demikian, untuk mengakomodasi keberagaman tersebut diperlukan semacam strategi penanganannya melalui pendidikan multikultural. Sejalan dengan pemikiran ini Paulo Faire menekankan bahwa pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang menjahui realitas sosial dan budaya, melainkan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan. Dalam konteks ini, menjadi penting apa yang dikenal dengan pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap realitas sosial yang terjadi, yang meliputi perbedaan-perbedaan dalam konteks gender, etnisitas, budaya, strata sosial, agama, dan seterusnya. Pada tulisan ini memberikan *stressing* pada aspek perbedaan gender sebagai isu pendidikan multikultural.

Meskipun demikian, dalam realitas sosial dimensi tersebut tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, keberagaman dan perbedaan-perbedaan lain yang berhubungan dengan gender sebagai *mainstreaming*-nya secara tidak langsung dipastikan akan disinggung dalam tulisan ini.

Gender adalah kajian perilaku yang berhubungan dengan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu didasarkan atas konstruksi sosial budaya. Proses pembentukan perilaku tersebut berbeda atau dapat berubah dari satu masa ke masa yang lainnya. Dari beberapa hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan ke masyarakat, baik dari kalangan tidak berpendidikan, berpendidikan, maupun berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi (pascasarjana), sering kali bagi mereka yang belum tersentuh pengetahuan tentang gender, menyamaratakan antara citra gender sebagai kodrat dengan gender sebagai konstruksi sosial budaya. Sebagai contoh; pemalu, penurut, emosional, lemah lembut, sabar, cantik, irrasional adalah kodrat perempuan yang harus dijalankannya. Jika terjadi di luar itu dianggap perempuan menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Konstruksi ini membawa konsekuensi yang luar biasa dalam proses sosialisasi kedua jenis kelamin ini.

Kuatnya citra gender sebagai kodrat yang telah terinternalisasi dalam masyarakat, bukanlah proses yang sesaat, melainkan sebuah proses dialektika konstruksi sosial yang dibentuk, diperkuat, disosialisasikan secara evolusi dalam jangka waktu yang sangat lama. Secara teoretis, kodrat adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas dasar anugerah Tuhan, misalnya laki-laki memiliki penis (zakar) dan perempuan memiliki payudara dan vagina, laki-laki membuahi dan perempuan dibuahi. Riskannya citra **kodrat** sedemikian ini, didukung oleh ajaran agama, keluarga, masyarakat, maupun negara, sehingga citra demikian memengaruhi masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam bersosialisasi baik secara biologis maupun psikologis.

Sosialisasi merupakan salah satu proses kebudayaan dari anggota masyarakat dan hubungannya dengan sistem sosial. Sosialisasi menitikberatkan pada individu dan kelompok. Oleh karena itu proses sosialisasi melahirkan kedirian dan kepribadian seseorang (Soelaeman, 1998: 109) Kedirian sebagai produk sosialisasi mempresentasikan kesadaran terhadap diri sendiri dan memandang adanya pribadi yang lain di luar dirinya. Jika dihubungkan dengan citra gender, maka terjadilah berbagai bentuk keberagaman dalam konstruksi gender. Dengan demikian, gender dapat dikategorikan sebagai salah satu isu multikultural yang harus mendapat perhatian secara lebih khusus.

Proses sosialisasi berawal dari keluarga dan diteruskan di luar keluarga. Menurut (Cohen, 1983), proses sosialisasi tidak hanya terkait pada keluarga, akan tetapi masih banyak lembaga-lembaga lain yang berperan, seperti; sekolah, kelompok sebaya, media massa dan seterusnya. Sehubungan dengan tujuan tulisan ini, akan dikemukakan bagaimana proses sosialisasi dalam konstruksi gender yang telah terjadi di masyarakat secara alamiah, dan kemudian bagaimana proses sosialisasi secara ideal yang responsif gender harus terjadi.

Dengan demikian, sasaran sosialisasi yang responsif gender ini mampu membuat stereotip manusia menjadi selaras dalam hidupnya di tengah-tengah orang lain, dengan jalan antara lain; (a). individu harus diberi ilmu pengetahuan (keterampilan) yang tepat. Dalam hal ini tentu pengetahuan yang responsif gender; (b) Pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat; (c) Berlaku selaras dengan tata nilai dan norma yang responsif gender. (*Universitas Hukum, blogspot.com/2011/02/gender dan multicultural*)

Dalam proses sosialisasi yang tidak responsif gender, ketika mengkonstruksikan budaya gender, seorang laki-laki haruslah kuat, agresif, rasional, pintar, berani dengan segala atribut kelaki-lakian yang lain, yang sangat ditentukan oleh masyarakat tersebut. Sebagai contoh, ketika seorang bayi laki-laki dilahirkan

oleh seorang ibunya, mulailah dibentuk dan dilekatkan atribut kelaki-lakiannya, sehingga dia harus menjadi seorang laki-laki yang disesuaikan dengan atribut-atribut yang sudah menunggunya. Begitupun sebaliknya, jika yang lahir adalah bayi perempuan, diapun dibentuk menjadi seorang perempuan berdasarkan atribut-atribut yang sudah ditempelkan kepadanya. Karena dia bayi perempuan, maka dianggap sudah menjadi “kodrat” dia untuk menjadi sosok yang cantik, anggun, irrasional, emosional, dan sebagainya. Sebagaimana contoh realitas sosial yang terjadi saat ini pada diri Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan Kabinet Kerja Jokowi-JK, dalam kontruksi ini bisa dianggap menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Karena Susi jarang berdandan, berbicaranya tegas, apalagi diisukan merokok, bertato, dan seterusnya, maka tidak jarang masyarakat menggambarkan bahwa Susi telah menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Pertanyaan penting adalah bukankah berdandan itu hak setiap orang?, bukankah mrokok itu merusak atau tidak baik bagi setiap insan? bukankah bertato itu diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan, terutama pada masyarakat asli Indonesia seperti, Mentawai, Dayak, di mana laki-laki dan perempuan bertato untuk melambangkan hirarkhi sosial mereka.

Ketika bayi laki-laki atau perempuan lahir, biasanya mereka sudah disambut dengan berbagai atribut, mulai dari pemilihan perangkat bayi, warna pakaian, asesoris, permainan, perlakuan, yang kesemuanya diarahkan untuk mendukung dan melegitimasi makhluk manusia itu agar menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan ketentuan dan kehendak sosial budaya setempat. Bayi perempuan sudah dipersiapkan dengan segala kelengkapan dan keperluannya yang berwarna merah jambu (*pink*), sementara bayi laki-laki sudah dipersiapkan dengan serba warna biru, bahkan bagi keluarga yang mampu, dengan disain kamar berwarna biru atau merah jambu telah tersedia.

Proses sosialisasi yang demikian, dianggap sebagai suatu hal yang baik, benar, bahkan **kodrat**. Akibatnya seseorang terpaksa

menerima identitas yang sudah dilekatkan tersebut. Jika terjadi perlawanan atau pertentangan terhadap realitas dan nilai-nilai yang sudah dibentuk itu, dianggap sudah melakukan sesuatu yang negatif. Dalam sebuah proses sosialisasi yang panjang terhadap konstruksi gender ini, maka yang paling banyak dikorbankan adalah jenis kelamin perempuan. Dengan demikian, khusus melalui pendidikan formal, diperlukan semacam disain pembelajaran (bukan semata-mata *schooling*) yang memiliki perspektif gender dalam pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural yang memiliki perspektif gender sangat dibutuhkan hari ini untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial yang berakar dari bentukan konstruksi gender yang terjadi selama ini. Dengan demikian, dibutuhkan paradigma dekonstruktif yang mencoba meluruskan persoalan-persoalan yang terjadi. Realitas sosial yang terjadi hari ini, misalnya kekerasan dalam rumahtangga dan masyarakat, sangat sedikitnya perempuan menduduki posisi strategis di ruang publik, kurangnya kemampuan partisipasi perempuan dalam menentukan keputusan baik dalam rumahtangga maupun di ruang publik. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kesemuanya terjadi akibat konstruksi gender yang selama ini terjadi tidak responsif gender.

Secara umum, pendidikan multikultural meliputi isu-isu strategis yang ada dalam dunia pendidikan, misalnya, gender, etnisitas, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran anak didik, pendidikan yang berbasis multikultural (*Multicultural Based Learning*), menekankan pada apa yang dialami individu dalam kompleksitas interaksi dan ragam kultur. *Multicultural Based Learning* juga merupakan perubahan terhadap pola berfikir dan arti penting dunia pendidikan. Ia menggambarkan realitas sosial, ekonomi, dan politik secara lebih luas dan sistematis, sehingga dapat memengaruhi segala sesuatu yang terjadi di dalam sekolah dan di luar sekolah.

Khusus, pendidikan multikultural di sekolah (*schooling*)

diperoleh melalui pendidikan formal, mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi. Terdapat beberapa komponen penting yang menentukan terealisasinya pendidikan multikultural di sekolah antara lain; pimpinan sekolah, guru, kurikulum, dan bahan ajar. Tanpa mengabaikan dimensi yang lain, seperti manajemen sekolah, ketiga komponen ini sangat menentukan dalam mencermati prinsip-prinsip yang ada dalam dunia pendidikan. Namun ketiga komponen ini, secara lebih jauh akan bersentuhan dengan berbagai komponen lainnya.

(James A. Bank, 1993: 3) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu;

1. *Content Integration*, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengintegrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
2. *The knowledge construction process*, yaitu: membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran.
3. *An equity pedagogy*, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi budaya atau sosial.
4. *Prejudice Reduction* yaitu mengurangi prasangka dan mengidentifikasi karakter siswa, khususnya dalam perbedaan gender.

Jika Bank lebih banyak memberikan contoh-contoh kasus pada perbedaan ras, maka pendidikan multikultural di Indonesia dapat menekannya pada kontent Indonesia, antara lain: gender, agama, dan etnisitas.

Khusus dalam tulisan ini, dalam proses pembelajaran bahwa pendidikan multikultural pada pendidikan formal, guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Sering kali, perilaku guru tanpa disadari membangun konstruksi

gender yang tidak responsif gender, misalnya: untuk pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas tertentu diperuntukkan bagi anak laki-laki, dan sebaliknya pekerjaan dan tugas-tugas tertentu bagi anak perempuan, “Ali! tolong hapus papan; Ani! Catat materi ini ke depan”; Budi! Anak laki-laki tidak boleh *cengeng*; Susi! Perempuan harus berbicara halus dan sopan! Artinya apa? Sering kali stigma tertentu ditujukan untuk jenis kelamin tertentu. Pernyataan-pernyataan di atas sering kali terjadi ketika guru dan siswa berinteraksi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, interaksi guru dan peserta didik akan membangun proses sosialisasi yang berkelanjutan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru yang responsif gender berimplikasi kepada proses sosialisasi yang tidak responsif gender.

Selain guru, komponen penting lainnya yang berhubungan dengan pendidikan multikultural yang responsif gender adalah kurikulum. Dalam pendidikan formal kurikulum adalah acuan tertinggi dalam proses pembelajaran. Substansi kurikulum biasanya dituangkan ke dalam mata pelajaran. Khusus untuk bahan ajar yang berisikan pengetahuan multikultural hanya terdapat dalam mata pelajaran PKn. Sementara, sebagai proses sosialisasi yang berhubungan dengan sikap, tindakan dan perilaku berlangsung untuk semua proses pembelajaran dalam mata pelajaran apa pun. Hal demikian tentu menjadi pemikiran tersendiri dalam proses pembelajaran pada sekolah formal. Contoh di atas merupakan realitas sosial di sekolah ketika terjadi proses sosialisasi antara peserta didik dengan guru dan komponen-komponen lainnya. Sejauh ini belum ada pemikiran yang tegas bagaimana pendidikan multikultural tersebut terintegrasi serta komprehensif di sekolah-sekolah.

Menurut Tilaar, model kurikulum yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural mencakup kurikulum yang resmi dan tersembunyi (*the hidden curriculum*), yakni kurikulum tidak tertulis atau terencana dalam materi pembelajaran, namun terjadi dalam proses internalisasi nilai-nilai, pengetahuan,

dan keterampilan dalam seluruh proses pembelajaran. Lebih lanjut Tilaar mengemukakan bahwa dalam kurikulum “resmi” pendidikan multikultural sebaiknya diintegrasikan ke semua mata pelajaran dalam kegiatan lintas kurikulum. Sebaiknya, materi tentang multikultural tidak merupakan mata pelajaran tersendiri, karena beban siswa sudah terlalu berat dengan berbagai mata pelajaran yang sudah ada. Dengan demikian, model kurikulum multikultural harus dapat diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran dengan menekankan pada proses pembelajaran pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang berkenaan dengan konsep-konsep berketerampilan dalam berkehidupan, misalnya: terampil mengeluarkan pendapat, saling menghargai, bernegosiasi, mengemukakan dan menghadapi perbedaan, memecahkan masalah, mengatasi konflik, termasuk kemampuan mengantisipasi terjadinya konflik yang tidak diinginkan.

Lebih jauh Hamid Hasan mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural harus didasarkan pada prinsip: (1) keragaman budaya yang menjadi dasar menentukan filsafat; (2) keberagaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti: tujuan, konten, proses dan evaluasi; (3) budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa; dan (4) kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. (http://www.pdk.go.id/balitbang/publikasi/jurnal/no-026/pendekatan_hamid_hasan.htm)

Dengan demikian, pengembangan kurikulum yang berdasarkan pendidikan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengubah filosofis dari yang berlaku secara serentak menjadi filosofi pendidikan yang sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan; (2) harus merubah teori tentang konten (*content curriculum*) yang mengartikannya sebagai aspek sub-

stantif yang berisi fakta, konsep, teori, generalisasi, mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan (*skill*) yang harus dimiliki oleh generasi muda; (3) Teori belajar harus yang digunakan harus memperhatikan unsur keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik; (4) proses belajar yang dikembangkan harus berdasarkan cara belajar berkelompok dan bersaing dalam kelompok dengan situasi yang positif; dan (5) evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. (<http://emarakhmawati.blogspot.com/3013/02/pentingnya-pendidikan-multikultural-di.html>)

Jika bagian di atas lebih banyak membicarakan tentang bagaimana pendidikan multikultural yang responsif gender itu dalam proses pendidikan formal, maka berikutnya bagaimana pendidikan yang responsif gender di dalam pendidikan rumah tangga. Sosialisasi pendidikan dalam rumah tangga dimulai semenjak sang janin sudah berada dalam kehamilan ibunya. Dalam pengetahuan agama apa pun dan didukung oleh teori psikologi perkembangan bahwa sejak pendidikan terhadap anak itu sudah dimulai semenjak dia berada di dalam kandungan ibunya. Sehubungan dengan itu, pendidikan yang responsif gender seharusnya selaras dengan hal itu. Ketika dalam kandungan biasanya pendidikan yang responsif gender itu tersosialisasi dengan baik tanpa bias. Pendidikan yang tidak responsif gender mulai tercipta ketika sang bayi sudah mulai bersentuhan dengan dunia yang menyambut kehadirannya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa kehadiran sang bayi sudah mulai ditunggu dengan atribut-atribut yang sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya.

Ketika sang bayi sudah mulai menginjak kanak-kanak, sosialisasi berikut yang tidak responsif gender terus berlanjut, misalnya; sering kali anak-anak perempuan sudah dipersiapkan dengan berbagai jenis permainan yang mengarahkan Dia sebagai perempuan yang dikonstruksikan oleh keluarga. Anak

perempuan dibelikan berbagai macam aneka boneka, mainan masak-masakan, yang pada umumnya mengarah pada fungsi-fungsi domestik dan ciri-ciri kefemininan yang sudah dibangun oleh keluarga. Anak laki-laki dibelikan mobil-mobilan, tembak-tembakan, bola, dan seterusnya. Tidak jarang terjadi, ketika anak perempuan menginginkan permainan temannya laki-laki seperti, tembak-tembakan atau mobil-mobilan, kata-kata **jangan** langsung keluar dari sang ibu..."Jangan itu permainan anak cowok". Akibatnya mulai terinternalisasi dalam diri mereka bahwa jenis permainan tersebut adalah pantas bahkan milik laki-laki sedangkan jenis permainan tertentu adalah milik perempuan. Tanpa disadari perilaku-perilaku yang demikian secara berlahan-lahan menjadi sesuatu yang dianggap pantas bahkan menjadi apa yang disebut dengan kodrat tersebut.

Lain halnya dengan perilaku bias gender yang sering terjadi di luar rumah tangga dan sekolah. Pelecehan seksual, kekerasan akibat tidak adanya pengetahuan dan pemahaman yang responsif gender sering kali terjadi di tempat-tempat umum, misalnya di atas kendaraan, bis kota, kereta api, dan kendaraan-kendaraan umum lainnya. Di pasar, di tempat-tempat fasilitas umum lainnya tidak jarang terjadi hal demikian, suatu hari peneliti pernah mengamati bagaimana seorang tukang jamu gendong perempuan, kebetulan dia agak cantik, dicolek-colek dan dipegang-pegang oleh seorang pembelinya bapak-bapak, sehingga orang lain yang melihatnya juga merasa terganggu. Dengan demikian, pendekatan pengetahuan yang responsif gender harus dilakukan intervensinya baik secara individu maupun melalui sistem. Secara individu, baik laki-laki atau perempuan harus memiliki pengetahuan yang responsif gender, misalnya bagaimana perempuan menjaga dirinya sehingga tidak memancing terjadinya pelecehan-pelecehan terhadap pribadinya. Pada level sistem, tugas lembaga dan institusi mendisain pola-pola, tindakan-tindakan pada level kebijakan untuk menciptakan sistem yang responsif gender, misalnya; mendisain pola

transportasi yang responsif gender, dalam perencanaan anggaran, bagaimana menyusun anggaran yang responsif gender, penyediaan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang responsif gender, dan seterusnya.

Untuk mengatasi persoalan sosialisasi yang belum responsif gender tersebut, baik dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, antara lain dapat dilakukan: (1) perlunya pemberian ilmu pengetahuan dan keterampilan yang responsif gender bagi keluarga, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan; (2) pelatihan melalui fungsi-fungsi organik yang tepat, latihan mewas diri khususnya bagi perempuan, agar tidak terjadi berbagai bentuk perilaku yang tidak responsif gender, yang berpotensi kepada perilaku-perilaku menyimpang dan terjadinya berbagai bentuk kekerasan terutama bagi perempuan; dan (3) mereduksi tata nilai dan norma yang tidak responsif gender. Nilai-nilai patriarkhis yang mendominasi budaya masyarakat Indonesia sangat sarat dengan bias gender. Penelitian-penelitian dan pengkajian-pengkajian tentang hal ini sudah banyak dilakukan. Untuk itu, perlu semacam pemikiran dan tindakan sosialisasi dalam rangka mereduksi nilai-nilai yang semacam ini.

Mengingat mendesaknya kebutuhan merealisasikan pendidikan multikultural yang berbasis gender diperlukan pengetahuan, setidak-tidaknya referensi yang mampu memberikan pengetahuan yang responsif gender, terutama bagi generasi muda. Buku teks ini dihimpun dari berbagai sumber, terutama dari beberapa sumber hasil penelitian yang penulis lakukan sendiri dan beberapa hasil penelitian lainnya. Kehadiran buku teks ini merupakan salah satu jawaban sebagai pemecahan masalah yang terjadi hari ini. Kehadiran buku ini ditujukan untuk mahasiswa, terutama calon pendidik atau guru, namun buku ini juga sangat bermanfaat bagi peminat lainnya yang *concern* terhadap pendidikan.

Buku ini terdiri dari lima bab dengan tiga bab sebagai bab inti dan dua bab yang terdiri dari Bab 1 Pendahuluan dan Bab

5 merupakan bab penutup yang berisikan sedikit refleksi dari hasil tulisan ini. Bab inti terdiri dari Bab 2, 3, dan 4. Bab 2 membicarakan permasalahan keberagaman dalam pendidikan multikultural; Bab 3 membicarakan marginalisasi perempuan dalam konstruksi gender; dan Bab 4 membicarakan pendidikan multikultural responsif gender.

2

Permasalahan Keberagaman dalam Pendidikan Multikultural

Belakangan ini sering muncul konflik sosial dan kekerasan yang mengakibatkan keresahan; ketakutan, kecemasan masyarakat. Mulai dari konflik antarsuku/antar-agama (konflik Poso, Sambas, Ambon, Papua, Aceh), konflik antarkelempok sosial dan antargeng, konflik antarsekolah, dan lain sebagainya. Artinya konflik sudah melibatkan orang dalam segala aspek umur, tua dan muda. Fenomena ini mengingatkan kita, arti penting pendidikan multikultural untuk diajarkan dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, pendidikan perdamaian perlu dikembangkan dan diberlakukan dalam rangka damai negeri ini agar tidak terjadi konflik lagi dan tak ada lagi dendam satu sama lainnya.

Secara esensi pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menanamkan nilai saling menghargai, mencintai dan keadilan. Dengan kata lain pendidikan multikultural adalah wujud pendidikan kepada generasi agar memiliki kecerdasan sosial budaya. Di sisi lain, kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan, nilai dan aturan yang dimiliki masyarakat secara ber-

sama, oleh masyarakat dijadikan pedoman hidup, ada proses belajar yang terpola, ada sanksi sosial atas ketidaktaatan akan aturan terbut dan ada simbol yang bermakna

Kecerdasan sosial budaya tidak lain adalah menerapkan wujud kebudayaan berupa nilai-nilai, aturan dan pengetahuan yang dipedomani oleh masyarakat tersebut. Pada hakikatnya kecerdasan sosial budaya ini meliputi ranah kognisi, perilaku dan benda hasil dari pada manusia. Tujuan pendidikan multikultural adalah bagaimana menimbulkan dialog yang harmonis, mengenal dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada sehingga muncul rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Melalui pendidikan perdamaian ini diharapkan akan muncul modal sosial budaya suatu bangsa.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan sekaligus berpotensi untuk terjadinya disintegrasi. Di mana realita konflik itu telah memunculkan kerusuhan, saling menghasut, caci maki, penuh pertentangan batin, mengusir, membakar dan yang paling berbahaya ketika konflik ini berkepanjangan akan menyisakan tragedi. Kekerasan yang terjadi dalam rentang waktu yang lama menjadikan sebagai perilaku yang seolah-olah wajar. Akibatnya lingkaran setan kekerasan menjadi mata rantai yang semakin sulit diputuskan, karena masing-masing pihak adalah *victim* (korban) yang memicu dendam, jika ada kesempatan akan dibalas melalui jalan kekerasan pula, belum lagi kerusakan dan kerugian material yang harus di tanggung. Konflik tersebut memiliki dampak yang cukup besar di antaranya kehilangan pekerjaan. Konflik telah membuat masyarakat yang tadinya akur dan rukun terpaksa harus saling berkelahi karena perbedaan identitas. Konflik mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan di antara mereka yang secara kebetulan berbeda identitas etnis atau agama. Konflik menyebabkan kerugian material berupa kerusakan sarana ibadah dan sarana pendidikan. Konflik membuat masyarakat hidup dihinggap oleh rasa takut dan tak

aman yang berlebihan. Konflik menjadikan kelompok-kelompok dalam masyarakat memiliki rasa saling curiga dan mengikis rasa kepercayaan di antara warga masyarakat. Konflik mengundang turun tangan keluarga dan sanak saudara dari daerah lain datang untuk ikut berperang. Konflik memanggil rasa solidaritas seagama dari berbagai organisasi sosial keagamaan dari berbagai daerah, sementara kondisi ini dimanfaatkan oleh para pencuri untuk menjarah milik orang lain.

Konflik yang terjadi di beberapa daerah ini mengindikasikan lemahnya pemahaman akan makna pluralitas nilai budaya, dan kemampuan dalam membangun masyarakat yang pluralistik. Maka dari itu diperlukan kompetensi untuk mengelola keragaman budaya, sehingga dapat dibangun suatu kehidupan bersama untuk bersama-sama hidup. Dalam arti kata juga bahwa Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman suku bangsa, agama, ideologi kepartaian, tata krama, serta status sosial ekonomi. Perlu dilakukan pendidikan dan pengalaman multikultural kepada generasi muda yang bisa dimulai pada anak usia dini sampai perguruan tinggi. menjadi penting sejak usia dini dikarenakan pada usia dini inilah dasar pembentukan pendidikan dan pengalaman multikultural di sini para guru dan orangtua menjadi titik utama dalam proses pembelajaran multikultural demi terwujudnya keharmonisan dalam kemajemukan. Merujuk kepada pemikiran Prof. HAR Tilaar, pendidikan multikultural bermakna, mendudukan "yang berbeda" sama tinggi dan sama nilai menjadi sangat penting dalam paradigma pendidikan kita untuk meningkatkan toleransi, inklusivisme dan penolakan terhadap diskriminasi dan eksklusivisme, maka membangun multikultur sejak usia dini menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia yang memiliki kemajemukan masyarakat.

Pendidikan multikultural bukan untuk menghilangkan perbedaan yang memang sudah menjadi fakta kehidupan melainkan bagaimana kita yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, ideologi partai dan status sosial ekonomi yang beragam

pula tidak memiliki prasangka-prasangka, cap-cap atau label-label yang akan memicu konflik. Tujuan pendidikan multikultural adalah bagaimana menimbulkan dialog yang harmonis, mengenal dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada sehingga muncul rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Melalui pendidikan multikultural diharapkan akan muncul modal kultural suatu bangsa.

Lalu bagaimana model kebijakan multikulturalisme tersebut. Menurut Ahmad fedyani Syaifuddin, guru besar Antropologi UI ada tiga model kebijakan multikultural negara untuk menghadapi persoalan di atas: *Pertama*, model yang mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Dalam kebijakan ini setiap orang, bukan kolektif, berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Model ini memiliki kelemahan karena dipandang sebagai penghancur akar kebudayaan etnik yang menjadi dasar pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Model kebijakan multikultural ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional berada ditangan kelompok elit-elit tertentu.

Kedua, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri nasional (*founders*). Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasional-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri nasional akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing.

Ketiga, model multikultural- etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini, keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan.

Isu-isu yang muncul karena penerapan kebijakan ini tidak hanya keanekaragaman kolektif dan etnik, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Jika kekuasaan negara lemah karena prioritas kekuasaan dilimpahkan ke aneka ragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, negara mungkin diramaikan konflik-konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan posisi negara

Di dalam pembelajaran mata pelajaran yang ada di sekolah hendaknya dikembangkan pembelajaran yang berwawasan multikultural, dengan kata lain setiap materi pembelajaran ditanamkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, misalnya dalam pembelajaran agama, anak-anak ditanami nilai keyakinan agama yang paling benar menurut ajaran masing-masing agama, namun juga di beri pemahaman ada agama lain yang dianut orang lain, yang mana sebagai warga yang hidup dengan keberagaman ini diharuskan untuk saling menghargai dan hidup damai di antara pemeluk agama yang berbeda serta memberi pemahaman menyakini kebenaran agama yang dianut dengan tidak mengkerdikan agama yang dianut orang lain agar tercipta sistem pembelajaran yang mengembankan wawasan mengakui keberagaman akan budaya dan agama sebagai realitas sosial yang sudah menjadi fakta. Tujuan lain dalam pendidikan multikultural ini adalah bagaimana menimbulkan dialog yang harmonis, mengenal dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada sehingga muncul rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Melalui pendidikan multikultural ini diharapkan akan muncul modal sosial budaya suatu bangsa.

Adapun prinsip-prinsip kesamaan dan kesetaraan derajat, demokrasi, keadilan dan soslidaritas sosial adalah prinsip-prinsip dalam masyarakat plural. Prinsip-prinsip dapat menjadi jembatan untuk membuat masyarakat yang berbeda-beda ini agar

tidak bertikai dan konflik secara terus menerus.

1. Prinsip kesamaan dan kesetaraan derajat memiliki makna, bahwa sesuatu yang berbeda-beda dalam kedudukan dan harkat memiliki hak yang sama, tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada yang lain. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap suku/etnik yang satu tidak lebih tinggi kedudukan dan harkatnya di dunia ini di banding dengan suku lainnya. Kenyataannya hari ini, memang ada satu suku tertentu merasa lebih tinggi kedudukannya daripada suku yang lain, ini tidak terlepas dari pandangan *etnocentrisme*, yaitu cara memandang suku lain dengan menggunakan kaca mata atau bias dari nilai, cara berpikir dan sikap suku sendiri.
2. Prinsip demokrasi, adalah prinsip yang menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, hak dengan identitas tertentu serta memiliki hak untuk berideologi sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan manusia itu
3. Prinsip kebersamaan, prinsip yang mengajak masyarakat untuk saling tolong menolong dan bekerja sama satu sama lain, hidup harmonis guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Catatan penting dalam memahami perbedaan antarsuku ini di antaranya adalah: *pertama*, perbedaan suku bukanlah bahan perselisihan tapi untuk belajar saling memahami. *Kedua*, setiap suku punya keunikan masing-masing diperlukan harga menghargai atas keunikan masing. *Ketiga*, semua manusia sama dihadapan Allah, kecuali iman kepada Allah yang membedakan karena sifatnya tauhid. *Keempat*, kadang-kadang masyarakat mempunyai labeling untuk suatu suku, Suku A malas, Suku B orang pelit, padahal itu hanya prasangka atau dikarenakan tidak memiliki semangat relativisme kebudayaan, memahami kebudayaan orang lain, sebagaimana orang tersebut memandang kebudayaan sehingga tidak menimbulkan prasangka dan salah tafsir terhadap kebudayaan orang lain.

Pendekatan dalam pembelajaran damainya antar suku, selain penyampaian materi, hakikat perbedaan dan *sikap relativisme kebudayaan* (sikap memandang kebudayaan orang berdasarkan pandangan kebudayaan orang tersebut, bukan pandangan kebudayaan kita sendiri) adalah menceritakan kisah teladan tentang keragaman etnis dan pemecahan masalah (*problem solver*) dan nasehat yang diberikan siswa tentang keragaman etnis

Di bawah ini contoh pengaruh *labelling* pada suku bangsa: dikutip dari berita yahoo.com/mitos-asal-muasal-larangan-menikah-sunda-jawa-050028273.html.

Konon, Raja Majapahit, Hayam Wuruk, berkehendak mempersunting puteri dari Kerajaan Sunda. Atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirinkan surat kehormatan kepada Raja Sunda, Maharaja Linggabuana, untuk melamar Dyah Pitaloka.

Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit. Sebagaimana termaktub dalam *Kidung Sundayana*, timbul niat Mahapatih Gajah Mada untuk menguasai Kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi Sumpah Palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta, sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sunda yang belum dikuasai.

Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggrahan Bubat adalah bentuk *pasrah bongkokan* Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, melainkan sebagai tanda takluk Negeri Sunda dan sebagai bentuk pengakuan superioritas Majapahit atas Kerajaan Sunda di Nusantara.

Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukan ke Pesanggrahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai ksatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu.

Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara pasukan Gajah

Mada yang berjumlah besar melawan pasukan pengawal Linggabuana yang berjumlah kecil ditambah para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan Sunda di lapangan Bubat.

Tragedi ini kemudian merusak hubungan diplomatik antar kedua negara dan terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian. Hubungan Sunda-Majapahit tidak pernah pulih seperti sedia kala. Pangeran Niskalawastu Kancana, adik Putri Pitaloka yang kemudian naik takhta, selanjutnya menerapkan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Majapahit.

Isolasi terbatas pun diterapkannya. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat Negeri Sunda diberlakukan peraturan *larangan istri ti luaran*, yang isinya, antara lain, tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa.

Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk keberagaman yang terdapat dalam masyarakat multikultural;

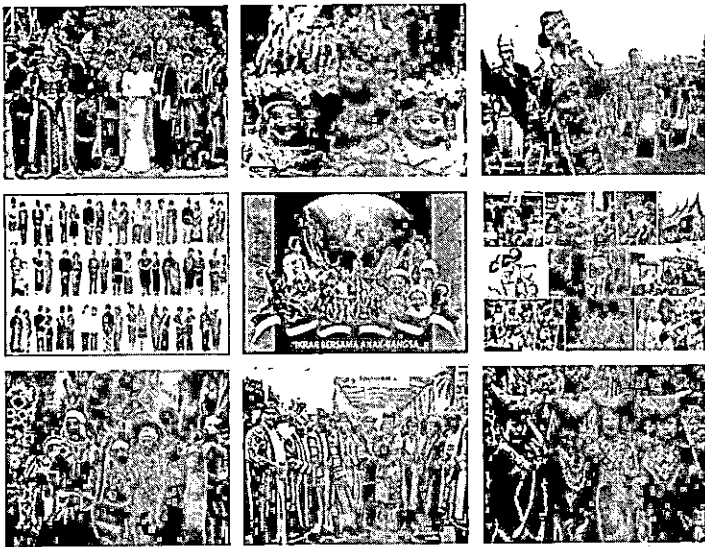
A. KEBERAGAMAN ETNIS

Etnis atau disebut juga suku bangsa merupakan segolongan masyarakat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Konsep etnisitas bersifat relasional yang berkaitan dengan identifikasi diri dan asal-usul sosial. Koentjaraningrat (1990) menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup yang memiliki sistem interaksi yang ada karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri.

Menurut Narral, defenisi etnis adalah sejumlah orang atau penduduk yang memiliki ciri-ciri; (a) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan; (b) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya; (c) membentuk jaringan komunikasi dan inter-

aksi sendiri; (d) menentukan kelompoknya yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok lain. Tampak bahwa etnis berbeda dari ras. Jika pengertian ras lebih didasarkan pada persamaan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh seseorang individu, maka pengertian etnis didasarkan kepada adanya persamaan kebudayaan dalam kelompok masyarakat tersebut.

Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Mengenai jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia telah dikemukakan oleh para ahli. Esser, Berg dan Sutan Takdir Alisyahbana memperkirakan ada 200-250 suku bangsa. MA, Jaspian mengemukakan ada 366 suku bangsa. Koentjaraningrat memperkirakan ada 195 suku bangsa. Hildred Geertz menyatakan lebih dari 300 suku bangsa dengan identitas budayanya sendiri. William G. Skinner memperkirakan ada 35 suku bangsa dalam arti lingkungan hukum adat. Berikut beberapa contoh keberagaman etnis di Indonesia:



Gambar 1. Keberagaman etnis di Indonesia

Sumber: <http://cyberdakwah.com/2013/07/mewujudkan-kerukunan-antar-umat-beragama/>, 2013



Gambar 2. Keberagaman etnis dan agama

Sumber: <http://musik.kapanlagi.com/berita/nasionalisme-dan-etnik-bertemu-di-tembang-harmoni-ec3a33.html>, 2012

Di Indonesia, istilah kelompok etnis dapat disamaartikan dengan suku bangsa, di samping ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnis. Misalnya, golongan etnis Tionghoa. Suku yang berkembang di Indonesia ada yang memiliki tingkat peradaban yang telah maju dan mampu berbaur dengan suku bangsa lain. Di samping itu juga masih dijumpai suku bangsa atau masyarakat terasing. Masyarakat terasing merupakan suku bangsa yang terisolasi dan masih hidup dari berburu, meramu atau berladang padi, umbi-umbian dengan sistem ladang berpindah. Masyarakat ini terhambat dari perubahan dan kemajuan karena isolasi geografi atau upaya yang disengaja untuk menolak bentuk perubahan kebudayaan.

Menurut Koentjaraningrat, pengelompokan berbagai kelompok etnis di Indonesia umumnya dilakukan dengan mengikuti sistem lingkaran hukum adat yang dibuat oleh Van Vollenhoven. Menurut pembagian tersebut, di Indonesia ada 19 daerah kelompok etnis di antaranya:

1. Aceh
2. Gayo
- 2a. Nias dan Batu
3. Minangkabau
- 3a. Mentawai
9. Gorontalo
10. Toraja
11. Sulawesi Selatan
12. Ternate
13. Ambon dan Maluku

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 4. Sumatra selatan | 13a. Kepulauan Barat Daya |
| 4a. Enggano | 14. Irian |
| 5. Melayu | 15. Timor |
| 6. Bangka Belitung | 16. Bali dan Lombok |
| 7. Kalimantan | 17. Jawa Tengah dan Jawa Timur |
| 8. Minahasa | 18. Surakarta dan Yogyakarta |
| 8a. Sangir-Talaud | 19. Jawa Barat |

Keberagaman etnis di Indonesia adalah salah satu bentuk dari kemajemukan masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural di dunia. Kemajemukan masyarakat Indonesia selain dari keanekaragaman kelompok sosial atau suku bangsa beserta kebudayaannya juga dapat dilihat dalam aspek yang lain, misalnya stratifikasi, kelas sosial, struktur sosial, sistem mempertahankan hidup dan kehidupan.

Keadaan masyarakat multikultural Indonesia sudah barang tentu memiliki latar belakang sendiri. Menurut Nasikun, faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultur, sebagai berikut:

1. Keadaan geografis wilayah Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain. Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain.

2. Letak kepulauan Indonesia di antara dua benua dan dua samudra.

Letak geografis Indonesia memungkinkan masuknya pengaruh asing dari berbagai bangsa. Bangsa asing tertarik untuk datang, singgah, dan menetap di Indonesia. Mereka berupaya memperkenalkan budayanya terhadap bangsa Indonesia.

3. **Pembangunan.**

Pembangunan di berbagai sektor memberikan pengaruh bagi keberagaman masyarakat Indonesia. Kemajemukan ekonomi dan industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia menghasilkan kelas sosial yang didasarkan pada aspek ekonomi.

4. **Iklm dan tingkat kesuburan tanah yang berlainan di berbagai daerah di Indonesia.**

Iklm yang berbeda di berbagai daerah menimbulkan kondisi alam yang berlainan pula dan kondisi yang demikian akan membentuk pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda. Pada akhirnya akan tercipta keberagaman antar daerah di Indonesia.

Keberagaman etnis ini juga memberikan pengaruh baik itu positif maupun negatif. Pengaruh positifnya adalah terdapat keberagaman budaya yang terjalin serasi dan harmonis, sehingga terwujud integrasi bangsa. Adapun pengaruh negatifnya antara lain:

a. **Primordial.**

Karena ada sikap primordial kebudayaan daerah, agama dan kebiasaan di masa lalu bertahan sampai kini. Sikap primordial yang berlebihan disebut etnosentris. Jika sikap ini mewarnai interaksi di masyarakat maka akan timbul konflik, karena setiap anggota masyarakat akan mengukur keadaan atau situasi berdasarkan nilai dan norma kelompoknya. Sikap ini menghambat terjadinya intregasi sosial atau intregasi bangsa. Primordialisme harus diimbangi dengan tenggang rasa dan toleransi.

b. **Stereotip etnik.**

Interaksi sosial dalam masyarakat majemuk sering diwarnai dengan stereotip etnik yaitu pandangan umum suatu kelompok etnis terhadap kelompok etnis lain (Horton & Hunt). Cara pandang stereotip diterapkan tanpa pandang

bulu terhadap semua anggota kelompok etnis yang distereotipkan, tanpa memperhatikan adanya perbedaan yang bersifat individual. Stereotip etnis disalahtafsirkan dengan menguniversalkan beberapa ciri khusus dari beberapa anggota kelompok etnis kepada ciri khusus seluruh anggota etnis. Dengan adanya beberapa orang dari suku bangsa A yang tidak berpendidikan formal atau berpendidikan formal rendah, orang dari suku lain (B) menganggap semua orang dari suku bangsa A berpendidikan rendah. Orang dari luar suku A menganggap suku bangsanya yang paling baik dengan berpendidikan tinggi. Padahal anggapan itu bisa saja keliru karena tidak semua orang dari suku bangsa di luar suku bangsa A berpendidikan tinggi, banyak orang dari luar suku bangsa A yang berpendidikan rendah.

c. **Potensi konflik.**

Ciri utama masyarakat majemuk (*plural society*) menurut Furnifall (1940) adalah kehidupan masyarakatnya berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka (secara essensi) terpisahkan oleh perbedaan-perbedaan identitas sosial yang melekat pada diri mereka masing-masing serta tidak tergabungnya mereka dalam satu unit politik tertentu (Nasikun, 2007). Hampir seluruh wilayah di Indonesia semenjak zaman kolonial telah terjadi pengelompokan-pengelompokan demikian, misalnya di kota Padang terdapat, Kampung Nias, Kampung Cina, Kampung Keling, Kampung Jawa, dan seterusnya. Hal yang serupa juga terdapat pada kota-kota Bandar di Indonesia.

Mungkin pendekatan yang relevan untuk melihat persoalan masyarakat majemuk ini adalah bahwa perbedaan kebudayaan atau agama memang potensial untuk mendestabilkan negara-bangsa. Karena memang terdapat perbedaan dalam orientasi dan cara memandang kehidupan ini, sistem nilai yang tidak sama, dan agama yang dianut masing-masing juga berlainan.

Furnivall sendiri sudah mensinyalir bahwa konflik pada masyarakat majemuk Indonesia menemukan sifatnya yang sangat tajam, karena di samping berbeda secara horisontal, kelompok-kelompok itu juga berbeda secara vertikal, menunjukkan adanya polarisasi. Artinya bahwa di samping terdiferensiasi secara kelompok etnik agama dan ras juga ada ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan sarana produksi dan kekayaan. Ada ras, etnik, atau penganut agama tertentu yang akses dan kontrolnya pada sumber-sumber daya ekonomi lebih besar, sementara kelompok yang lainnya sangat kurang.

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Adanya masyarakat Indonesia yang multi-etnik ini memiliki persoalan-persoalan dalam hal pengintegrasikan berbagai etnik ini kedalam kerangka persatuan nasional. Realitanya masyarakat Indonesia yang sudah merdeka sekian puluh tahun ini, pertikaian antar etnik tetap saja terjadi. Sikap bahwa sukunya yang paling maju tumbuh subur didalam masyarakat.

Kebudayaan memiliki peran dalam mengendalikan kehidupan masyarakat pemilik kebudayaan. Kebudayaan itu unik, artinya kebudayaan memiliki kehasan masing-masing sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Perbedaan kebudayaan ini akan menimbulkan sikap dan cara berpikir yang berbeda pula, ada kecerderungan sikap dan cara berpikir yang berbeda pada masalah yang sama. Perbedaan-perbedaan ini, memiliki potensi untuk konflik. Hal ini dapat dilihat dalam contoh berikut ini:

KONFLIK ANTAR SUKU DI PAPUA

Terjadi pertikaian di kota Kainantu, kawasan dataran tinggi timur Papua Nugini antara suku Agarabi dan Kamano. Setidaknya 15 orang tewas dalam pertikaian itu. Polisi menyatakan pertikaian melibatkan senjata api dan pisau, dan sebuah pemukiman kesukuan dibakar hingga rata dengan tanah.

Guna meredam keributan antara kedua suku, tambahan pasukan ke-

amanan telah dikerahkan ke lokasi, dan polisi memperingatkan kemungkinan kerusuhan lanjutan pasca bentrokan antara dua suku tersebut.



Kepada koran *Post-Courier Papua Nugini* dia menambahkan bahwa suku Agarabi menuduh Kamano sebagai biang masalah dan melanggar hukum di kota Kainantu. Pertikaian berdarah itu dilaporkan terjadi akhir pekan lalu, setelah kelompok Agarabi menyerang pemukiman Kamano yang dikenal dengan Blok Banana. Pemukiman Kamano dibakar habis dan belasan orang suku mereka tewas.

Orang Papua Nugini berbicara lebih dari 800 bahasa dan peraturan kesukuan sangat dijaga secara ketat. Pertikaian antara suku berbeda sering terjadi secara sporadis. Enam orang tewas dalam kekerasan etnis tahun 2008 di kawasan dataran tinggi barat setelah seorang penjaga keamanan tewas.

Sumber: <http://dhiian-gildy.blogspot.com/2012/11/konflik-antar-suku-di-papua.htm>

B. KEBERAGAMAN KELOMPOK SOSIAL

Secara sosiologis pengertian kelompok sosial adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Selain itu, kelompok sosial adalah merupakan sekumpulan atau sekelompok orang yang ada di masyarakat dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi satu sama lain, serta biasanya memiliki suatu kesukaan yang sama (hobi, pekerjaan, aktivitas, fans dsb).

Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya.

Para ahli juga mendefinisikan kelompok sosial menurut pandangannya masing-masing. Berikut ini adalah pengertian kelompok sosial menurut para ahli.

1. **Soerjono Soekanto:** “Kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi.”
2. **Paul B. Horton dan Chester L Hunt:** “Istilah kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotannya dan saling berinteraksi.”
3. **George Homans:** “Kelompok adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan timbal balik.”
4. **Josep S. Roucek dan Roland S. Warren:** “Kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia, yang di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan.”

Dari berbagai definisi kelompok sosial, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Berikut adalah contoh-contoh kelompok sosial di dalam masyarakat;

1. Komunitas pencinta hewan.
2. Komunitas Mahasiswa Minangkabau (biasanya mahasiswa yang berada di luar Sumbar atau di perantauan).
3. Komunitas pecinta motor (disebut juga geng motor).
4. Komunitas anak gaul (contohnya; anak punk).



Gambar 3. Contoh kelompok sosial

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasii/kelasi/sos/3/3.html>, 2010



Gambar 4. Komunitas geng motor yang memicu konflik/tawuran

Sumber: http://whechend.weebly.com/uploads/1/9/1/6/19169197/5434265_orig.jpg

1. Proses Terbentuknya Kelompok Sosial

Menurut Abdul Syani, terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Manusia membutuhkan komunikasi dalam membentuk kelompok, karena melalui komunikasi orang dapat mengadakan ikatan dan pengaruh psikologis secara timbal balik. Ada dua hasrat pokok manusia sehingga ia terdorong untuk hidup berkelompok, yaitu:

- a. Hasrat untuk bersatu dengan manusia lain di sekitarnya
- b. Hasrat untuk bersatu dengan situasi alam sekitarnya

2. Syarat Terbentuknya Kelompok Sosial

Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Untuk itu, setiap himpunan manusia agar dapat dikatakan sebagai kelompok sosial, haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan.
- b. Ada kesamaan faktor yang dimiliki anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor-faktor kesamaan tersebut, antara lain:
 - Persamaan nasib
 - Persamaan kepentingan
 - Persamaan tujuan
 - Persamaan ideologi politik
 - Persamaan musuh
- c. Kelompok sosial ini berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.

3. Macam-Macam Kelompok Sosial

a. *Klasifikasi Tipe-tipe Kelompok Sosial*

Menurut Soerjono Soekanto dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Berdasarkan besar kecilnya anggota kelompok.

Menurut George Simmel, besar kecilnya jumlah anggota kelompok akan memengaruhi kelompok dan pola interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Dalam penelitiannya, Simmel memulai dari satu orang sebagai perhatian hubungan sosial yang dinamakan *monad*. Kemudian *monad* dikembangkan menjadi dua orang atau *diad*, dan tiga orang atau *triad*, dan

kelompok-kelompok kecil lainnya. Hasilnya semakin banyak jumlah anggota kelompoknya, pola interaksinya juga berbeda.

2) **Berdasarkan derajat interaksi dalam kelompok.**

Derajat interaksi ini juga dapat dilihat pada beberapa kelompok sosial yang berbeda. Kelompok sosial seperti keluarga, rukun tetangga, masyarakat desa, akan mempunyai kelompok yang anggotanya saling mengenal dengan baik (*face-to-face groupings*). Hal ini berbeda dengan kelompok sosial seperti masyarakat kota, perusahaan, atau negara, di mana anggota-anggotanya tidak memiliki hubungan erat.

Keluarga termasuk kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggota-anggotanya saling mengenal dan ada kerja sama yang erat dalam kelompok sosialnya (contohnya lihat Gambar 5). Selain itu kegiatan jual beli di pasar termasuk dalam kelompok sosial yang terdiri dari banyak orang. Hubungan antar-individu pada anggota kelompok masing-masing tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng (contohnya lihat Gambar 6).



Gambar 5. Keluarga sebagai kelompok sosial yang sederhana/kecil

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasii/kelas11/sos/3/3.html>, 2010



Gambar 6.

Kegiatan jual beli di pasar yang juga termasuk dalam kelompok sosial yang terdiri dari banyak orang

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasii/kelas1/sos/3/3.html>, 2010

- 3) **Berdasarkan kepentingan dan wilayah.**
Sebuah masyarakat setempat (*community*) merupakan suatu kelompok sosial atas dasar wilayah yang tidak mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Adapun asosiasi (*association*) adalah sebuah kelompok sosial yang dibentuk untuk memenuhi kepentingan tertentu.
- 4) **Berdasarkan kelangsungan kepentingan.**
Adanya kepentingan bersama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya sebuah kelompok sosial. Suatu kerumunan misalnya, merupakan kelompok yang keberadaannya hanya sebentar karena kepentingannya juga tidak berlangsung lama. Namun, sebuah asosiasi mempunyai kepentingan yang tetap.
- 5) **Berdasarkan derajat organisasi.**
Kelompok sosial terdiri atas kelompok-kelompok sosial yang terorganisasi dengan rapi seperti negara, TNI, perusahaan dan sebagainya. Namun, ada kelompok sosial yang hampir tidak terorganisasi dengan baik, seperti kerumunan.

Kelompok sosial yang tidak terorganisir dengan baik ini, biasanya jauh lebih tinggi potensinya untuk memicu konflik.

Secara umum tipe-tipe kelompok sosial adalah sebagai berikut.

- 1) Kategori statistik, yaitu pengelompokan atas dasar ciri tertentu yang sama, misalnya kelompok umur.
- 2) Kategori sosial, yaitu kelompok individu yang sadar akan ciri-ciri yang dimiliki bersama, misalnya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia).
- 3) Kelompok sosial, misalnya keluarga batih (*nuclear family*).
- 4) Kelompok tidak teratur, yaitu perkumpulan orang-orang di suatu tempat pada waktu yang sama karena adanya pusat perhatian yang sama. Misalnya, orang yang sedang menonton sepak bola.
- 5) Organisasi formal, yaitu kelompok yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu, misalnya perusahaan.

b. Kelompok Sosial Dipandang dari Sudut Individu

Pada masyarakat yang kompleks, biasanya setiap manusia tidak hanya mempunyai satu kelompok sosial tempat ia menjadi anggotanya. Namun, ia juga menjadi anggota beberapa kelompok sosial sekaligus. Terbentuknya kelompok-kelompok sosial ini biasanya didasari oleh kekerabatan, usia, jenis kelamin, pekerjaan atau kedudukan. Keanggotaan masing-masing kelompok sosial tersebut akan memberikan kedudukan dan prestise tertentu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah sifat keanggotaan suatu kelompok tidak selalu bersifat sukarela, tapi ada juga yang sifatnya paksaan. Misalnya, selain sebagai anggota kelompok di tempat dia bekerja, Pak Tomo juga anggota masyarakat, anggota perkumpulan bulu tangkis, anggota Ikatan Advokat Indonesia, anggota keluarga, anggota Paguyuban Masyarakat Jawa, dan sebagainya.

c. *In-Group dan Out-Group*

Sebagai seorang individu, kita sering merasa bahwa aku termasuk dalam bagian kelompok keluargaku, margaku, profesiku, rasku, almamaterku, dan negaraku. Semua kelompok tersebut berakhir dengan kepunyaan “ku”. Itulah yang dinamakan kelompok sendiri (*in-group*) karena aku termasuk di dalamnya. Banyak kelompok lain di mana aku tidak termasuk keluarga, ras, suku bangsa, pekerjaan, agama dan kelompok bermain. Semua itu merupakan kelompok luar (*out-group*) karena aku berada di luarnya.

In-group dan *out-group* dapat dijumpai di semua masyarakat, walaupun kepentingan-kepentingannya tidak selalu sama. Pada masyarakat primitif yang masih terbelakang kehidupannya biasanya akan mendasarkan diri pada keluarga yang akan menentukan kelompok sendiri dan kelompok luar seseorang. Jika ada dua orang yang saling tidak kenal berjumpa maka hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari hubungan antara keduanya. Jika mereka dapat menemukan adanya hubungan keluarga maka keduanya pun akan bersahabat karena keduanya merupakan anggota dari kelompok yang sama. Namun, jika mereka tidak dapat menemukan adanya kesamaan hubungan antara keluarga maka mereka adalah musuh sehingga mereka pun bereaksi.

Pada masyarakat modern, setiap orang mempunyai banyak kelompok sehingga mungkin saja saling tumpang tindih dengan kelompok luarnya. Siswa lama selalu memperlakukan siswa baru sebagai kelompok luar, tetapi ketika berada di dalam gedung olahraga mereka pun bersatu untuk mendukung tim sekolah kesayangannya.

d. *Kelompok Primer (Primary Group) dan Kelompok Sekunder (Secondary Group)*

Menurut Charles Horton Cooley, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai dengan ciri-ciri saling men-

genal antara anggota-anggotanya serta kerja sama yang erat yang bersifat pribadi. Sebagai salah satu hasil hubungan yang erat dan bersifat pribadi tadi adalah adanya peleburan individu-individu ke dalam kelompok-kelompok sehingga tujuan individu menjadi tujuan kelompok juga. Oleh karena itu hubungan sosial di dalam kelompok primer bersifat informal (tidak resmi), akrab, personal, dan total yang mencakup berbagai aspek pengalaman hidup seseorang.

Di dalam kelompok primer, seperti: keluarga, klan, atau sejumlah sahabat, hubungan sosial cenderung bersifat santai. Para anggota kelompok saling tertarik satu sama lainnya sebagai suatu pribadi. Mereka menyatakan harapan-harapan, dan kece-masan-kecemasan, berbagi pengalaman, mempergunjingkan gosip, dan saling memenuhi kebutuhan akan keakraban sebuah persahabatan.

Di sisi lain, kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri atas banyak orang, antara dengan siapa hubun-gannya tida perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. Dalam kelompok sekunder, hubungan sosial bersifat formal, impersonal dan segmental (ter-pisah), serta didasarkan pada manfaat (*utilitarian*). Seseorang ti-dak berhubungan dengan orang lain sebagai suatu pribadi, teta-pi sebagai seseorang yang berfungsi dalam menjalankan suatu peran. Kualitas pribadi tidak begitu penting, tetapi cara kerjanya.

e. *Paguyuban (Gemeinschaft) dan Patembayan (Gesellschaft)*

Konsep paguyuban (*gemeinschaft*) dan patembayan (*gesellschaft*) dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies. Pengertian paguyuban adalah suatu bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Bentuk paguyuban terutama akan dijumpai di dalam kelu-

arga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan sebagainya. Secara umum ciri-ciri paguyuban adalah:

- 1) *Intimate*, yaitu hubungan yang bersifat menyeluruh dan mesra.
- 2) *Private*, yaitu hubungan yang bersifat pribadi.
- 3) *Exclusive*, yaitu hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja dan tidak untuk orang lain di luar “kita”.



Gambar 7. Paguyuban dalam suatu Rukun Tetangga (RT)

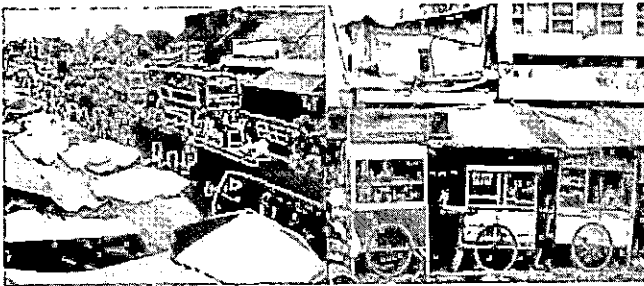
Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasi/kelas1/sos/3/3.html>, 2010

Di dalam setiap masyarakat selalu dapat dijumpai salah satu di antara tiga tipe paguyuban berikut:

- 1) Paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*), yaitu *gemeinschaft* atau paguyuban yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Misalnya keluarga dan kelompok kekerabatan.
- 2) Paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*), yaitu suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong-menolong. Misalnya kelompok arisan, rukun tetangga.
- 3) Paguyuban karena jiwa pikiran (*gemeinschaft of mind*), yaitu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, akan tetapi mereka mempunyai jiwa,

pikiran, dan ideologi yang sama. Ikatan pada paguyuban ini biasanya tidak sekuat paguyuban karena darah atau keturunan.

Sebaliknya, patembayan (*gesellschaft*) adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu yang pendek. Patembayan bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka (*imaginary*) serta strukturnya bersifat mekanis seperti sebuah mesin. Bentuk *gesellschaft* terutama terdapat di dalam hubungan perjanjian yang bersifat timbal balik. Misalnya, ikatan perjanjian kerja, birokrasi dalam suatu kantor, perjanjian dagang, dan sebagainya. Contoh patembayan terlihat pada Gambar 8 berikut:



Gambar 8. Pedagang kakilima yang membentuk kelompok sosial

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasi/kelas1/sos/3/3.html>, 2010

f. Formal Group dan Informal Group

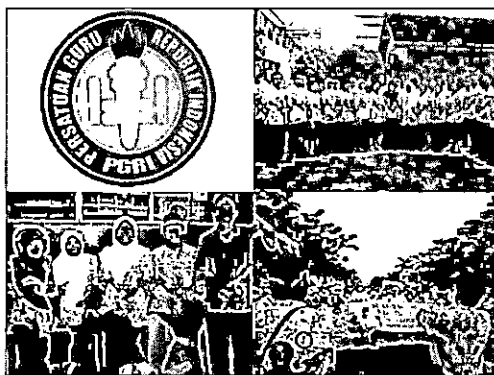
Menurut Soerjono Soekanto, *formal group* adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Kriteria rumusan organisasi formal group merupakan keberadaan tata cara untuk memobilisasikan dan mengoordinasikan usaha-usaha demi tercapainya tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat khusus.

Organisasi biasanya ditegakkan pada landasan mekanisme

administratif. Misalnya, sekolah terdiri atas beberapa bagian, seperti kepala sekolah, guru, siswa, orangtua murid, bagian tata usaha dan lingkungan sekitarnya. Organisasi seperti itu dinamakan birokrasi. Menurut Max Weber, organisasi yang didirikan secara birokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tugas organisasi didistribusikan dalam beberapa posisi yang merupakan tugas-tugas jabatan.
- 2) Posisi dalam organisasi terdiri atas hierarki struktur wewenang.
- 3) Suatu sistem peraturan memengaruhi keputusan dan pelaksanaannya.
- 4) Unsur staf yang merupakan pejabat, bertugas memelihara organisasi dan khususnya keteraturan organisasi.
- 5) Para pejabat berharap agar hubungan atasan dengan bawahan dan pihak lain bersifat orientasi impersonal.
- 6) Penyelenggaraan kepegawaian didasarkan pada karier.

Contoh *formal group* terlihat pada Gambar 9 berikut ini.



Gambar 9. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasi/kelas11/sos/3/3.html>, 2010

Adapun pengertian *informal group* adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok-

kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali. Dasar pertemuan-pertemuan tersebut adalah kepentingan-kepentingan dan pengalaman-pengalaman yang sama. Misalnya klik (*clique*), yaitu suatu kelompok kecil tanpa struktur formal yang sering timbul dalam kelompok-kelompok besar. Klik tersebut ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan timbal balik antaranggota yang biasanya hanya “antara kita” saja. Gambar berikut adalah contoh *informal group*.



Gambar 10. Kelompok remaja

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasi/kelas11/sos/3/3.html>, 2010

g. Membership Group dan Reference Group

Mengutip pendapat Robert K Merton, bahwa *membership group* adalah suatu kelompok sosial, di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Batas-batas fisik yang dipakai untuk menentukan keanggotaan seseorang tidak dapat ditentukan secara mutlak. Hal ini disebabkan perubahan-perubahan keadaan. Situasi yang tidak tetap akan memengaruhi derajat interaksi di dalam kelompok tadi sehingga adakalanya seorang anggota tidak begitu sering berkumpul dengan kelompok tersebut walaupun secara resmi dia belum keluar dari kelompok itu.

Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan seseorang (bukan anggota kelompok) untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Dengan kata lain, seseorang yang bukan anggota kelompok sosial bersangkutan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tadi. Misalnya, seseorang yang ingin sekali menjadi anggota TNI, tetapi gagal memenuhi persyaratan untuk memasuki lembaga pendidikan militer. Namun, ia bertingkah laku layaknya seorang perwira TNI meskipun dia bukan anggota TNI.

h. Kelompok Okupasional dan Volunteer

Pada awalnya suatu masyarakat, menurut Soerjono Soekanto, dapat melakukan berbagai pekerjaan sekaligus. Artinya, di dalam masyarakat tersebut belum ada pembagian kerja yang jelas. Akan tetapi, sejalan dengan kemajuan peradaban manusia, sistem pembagian kerja pun berubah. Salah satu bentuknya adalah masyarakat itu sudah berkembang menjadi suatu masyarakat yang heterogen. Pada masyarakat seperti ini, sudah berkembang sistem pembagian kerja yang didasarkan pada kekhususan atau spesialisasi. Warga masyarakat akan bekerja sesuai dengan bakatnya masing-masing. Setelah kelompok kekerabatan yang semakin pudar fungsinya, muncul kelompok okupasional yang merupakan kelompok terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok semacam ini sangat besar perannya di dalam mengarahkan kepribadian seseorang terutama para anggotanya.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi komunikasi, hampir tidak ada masyarakat yang tertutup dari dunia luar sehingga ruang jangkauan suatu masyarakatpun semakin luas. Meluasnya ruang jangkauan ini mengakibatkan semakin heterogennya masyarakat tersebut. Akhirnya tidak semua kepentingan individual warga masyarakat dapat dipenuhi.

Akibat dari tidak terpenuhinya kepentingan masyarakat secara keseluruhan, muncullah kelompok *volunteer*. Kelompok ini

mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang semakin luas jangkauannya tadi. Dengan demikian, kelompok *volunteer* dapat memenuhi kepentingan-kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara luas.

Beberapa kepentingan itu antara lain:

- 1) Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan.
- 2) Kebutuhan akan keselamatan jiwa dan harta benda.
- 3) Kebutuhan akan harga diri.
- 4) Kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri.
- 5) Kebutuhan akan kasih sayang.

i. Kelompok Sosial yang Tidak Teratur

■ Kerumunan (*Crowd*)

Kerumunan yaitu individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Kerumunan jelas tidak terorganisasi: ia dapat mempunyai pimpinan, akan tetapi ia tidak mempunyai sistem pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Artinya: pertamanya adalah bahwa interaksi di dalamnya bersifat spontan dan tidak terduga, dan kedua adalah bahwa orang-orang yang hadir dan berkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama. Identitas sosial seseorang biasanya tenggelam apabila orang yang bersangkutan ikut serta dalam suatu kerumunan.

Bentuk umum kerumunan sebagai berikut:

(a) Kerumunan berartikulasi dengan struktur sosial:

- Khalayak penonton atau pendengar yang formal (*formal audiences*) merupakan kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan akan tetapi sifatnya pasif, misalnya penonton bioskop.
- Kelompok ekspresif yang telah direncanakan (*planned expressive group*), adalah kerumunan yang pusat per-



Gambar 11. Penonton bioskop

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasii/kelas11/sos/3/3.html>, 2010

hatiannya tak begitu penting akan tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktifitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya, misalnya orang yang berdansa.



Gambar 12. Kelompok tari

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasii/kelas11/sos/3/3.html>, 2010

(b) **Kerumunan yang bersifat sementara (*casual crowds*):**

- Kumpulan yang kurang menyenangkan adalah orang-orang yang antri karcis, orang-orang menunggu bis dan sebagainya.



Gambar 13. Kerumunan orang sedang mengantri tiket

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasii/kelas11/sos/3/3.html>, 2010

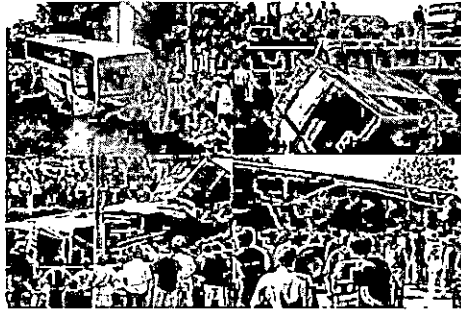
- Kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik (*panic crowds*), yaitu orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya, misalnya lari karena ada gempa.



Gambar 14. Kerumunan yang panik

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasii/kelas11/sos/3/3.html>, 2010

- Kerumunan penonton (*spectator crowds*), yaitu kerumunan yang terjadi karena orang-orang ingin melihat suatu kejadian tertentu, misalnya menonton korban kecelakaan.



Gambar 15. Kerumunan dalam sebuah kecelakaan

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasii/kelas11/sos/3/3.html>, 2010

(c) **Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawles crowds*):**

- Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*). Kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mempergunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kerumunan semacam ini seringkali memicu konflik.



Gambar 16. Demonstrasi yang berujung sebuah kerusuhan

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasii/kelas11/sos/3/3.html>, 2010

- Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), hampir sama dengan kelompok-kelompok ekspresif,

akan tetapi bedanya adalah bahwa yang utama bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.



Gambar 17. Kelompok punk

Sumber: [e-dukasi.net] Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasii/kelas1/sos/3/3.html>, 2010

3. Ciri-ciri Kelompok Sosial

Menurut Soerjono Soekato, suatu himpunan manusia atau yang dikatakan sebagai kelompok sosial memiliki ciri kurang lebih sebagai berikut:

- Setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa ia adalah sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
- Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dan anggota yang lainnya.
- Ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, misalnya: nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain.
- Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.
- Bersistem dan berproses.
- Memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok tergantung pada kesungguhan anggotanya dalam melaksanakan perannya.

- g. Memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya.
- h. Memiliki kepentingan bersama.

Selain itu juga ada kelompok sosial yang memicu konflik di antaranya konflik antar kampung dan antar pelajar. Konflik ini biasanya dipicu oleh beberapa masalah. Konflik antar kampung misalnya dipicu oleh perebutan tanah dan kekuasaan, perkela-hian antar pemuda yang memicu “*bacakak banyak*”. Perkelahi-an antar pelajar kadang juga dipicu oleh masalah sepele, misal-nya perebutan pelajar perempuan oleh pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda, saling ejek, dan lain-lain.



Gambar 18. Konflik antarkampung di Lampung

Sumber: fokus.news.viva.co.id, 2012



Gambar 19. Konflik antarpelajar

Sumber: bloggerjava.blogdetik.com

C. KEBERAGAMAN EKONOMI

Stratifikasi sosial dalam bidang ekonomi akan membedakan penduduk atau warga masyarakat menurut penguasaan dan pemilikan materi. Dalam hal ini ada golongan orang-orang yang didasarkan pada pemilikan tanah, serta ada yang didasarkan pada kegiatannya di bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapan. Dengan kata lain, pendapatan, kekayaan dan pekerjaan akan membagi anggota masyarakat ke dalam berbagai lapisan atau kelas-kelas sosial dalam masyarakat.

Menurut Max Webber, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas yang didasarkan pada pemilikan tanah dan benda-benda. Kelas-kelas tersebut adalah kelas atas (*upper class*), kelas menengah (*middle class*) dan kelas bawah (*lower class*) (Abu Ahmadi, 2003). Satu hal yang perlu diingat bahwa stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi ini bersifat terbuka. Artinya memungkinkan seseorang yang berada pada kelas bawah untuk naik ke kelas atas, dan sebaliknya memungkinkan seseorang yang berada pada kelas atas untuk turun ke kelas bawah atau kelas yang lebih rendah. Hal ini tergantung pada kecakapan dan keuletan orang yang bersangkutan. Salah satu contoh stratifikasi sosial berdasarkan faktor ekonomi adalah pemilikan tanah di lingkungan pertanian pada masyarakat Indonesia. Wujud stratifikasi sosialnya adalah petani pemilik tanah, petani penyewa dan penggarap, serta buruh tani.

1. Petani pemilik tanah dibagi dalam lapisan-lapisan berikut ini.
 - a. Petani pemilik tanah lebih dari 2 hektar.
 - b. Petani pemilik tanah antara 1-2 hektar.
 - c. Petani pemilik tanah antara 0,25-1 hektar.
 - d. Petani pemilik tanah kurang dari 0,25 hektar.
2. Petani penyewa dan petani penggarap, yaitu mereka yang menyewa dan menggarap tanah milik petani pemilik tanah yang biasanya menggunakan sistem bagi hasil.

3. Buruh tani, yaitu tenaga yang bekerja pada para pemilik tanah, petani penyewa, petani penggarap, atau pedagang yang biasanya membeli padi di sawah.

Adanya lapisan sosial dalam masyarakat atau kedudukan yang berbeda-beda tingkatannya dalam masyarakat, maka menimbulkan keberagaman tingkatan ekonomi dalam masyarakat itu sendiri. Berbedanya tingkatan ekonomi tersebut juga menimbulkan perbedaan tingkat kemakmuran dalam masyarakat tersebut. Hal ini juga dipicu oleh berbagai macam jenis pekerjaan yang menyebabkan persepsi bahwa setiap pekerjaan tersebut memiliki tingkat kemakmuran yang berbeda-beda.

Pandangan yang dianut orang-orang terhadap konsep kemakmuran tersebut tidak sama karena adanya persepsi bahwa setiap jenis pekerjaan memiliki tingkat kemakmuran yang berbeda pula. Misalnya buruh, guru, ulama, pegawai, karyawan swasta, pengusaha dan sebagainya. Bagi orang-orang yang biasa berpikir rasional dan eksak, kemakmuran seseorang atau masyarakat diukur dengan jumlah serta nilai bahan-bahan dan barang-barang yang dimiliki atau yang dikuasai untuk memelihara dan menikmati hidupnya. Makin banyak jumlahnya dan makin tinggi nilainya maka makin tinggi taraf kemakmuran hidupnya.

Kebutuhan hidup yang berbeda-beda dan biasanya digolongkan menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer berupa barang-barang pangan, sandang dan papan yang pertama-tama dituntut untuk menunjang hidup manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang tak dapat ditanggihkan penggunaannya disebut kebutuhan sekunder, misalnya barang-barang kenikmatan, kemewahan dan lain-lain.

Perbedaan pandangan terhadap tingkatan ekonomi berdasarkan kemakmuran dianut oleh masyarakat pada umumnya, terutama yang hidup di daerah pedesaan. Bagi mereka pengertian kemakmuran tidaklah berbeda daripada pengertian kebahagiaan. Kebahagiaan ialah suatu keadaan di mana keinginan-

keinginan seseorang atau sesuatu masyarakat seimbang dengan keadaan material atau sosial yang dimiliki atau dikuasainya.

Seseorang untuk memperoleh kemakmuran hidupnya di dalam keluarga, umumnya setiap orang akan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan kemampuan yang ada padanya. Persaingan-persaingan akan selalu terjadi. Faktor penyebabnya bukanlah karena persoalan keterbatasan lapangan kerja saja, tetapi masalahnya sangat kompleks. Individu sendiri telah ditakdirkan mempunyai watak bersaing antara sesama manusia untuk menguasai sumber-sumber daya alam dan kekuasaan yang pada gilirannya untuk memperoleh kemakmuran buta dia sendiri dan keluarganya. Persaingan antara sesama manusia dalam usaha memperoleh sumber-sumber alam dan dana adalah suatu yang wajar terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya pada petani, buruh, guru, dan lain-lain.

Tingkat kemakmuran suatu keluarga atau masyarakat ditentukan oleh standar nilai dan norma-norma yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu. Demikian pula, bahwa tingkat kemakmuran banyak dipengaruhi oleh keadaan faktor-faktor demografis, seperti fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.

Selain kemakmuran juga ada kemiskinan. Suparlan (1981) menyatakan kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi kemiskinan itu terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut, terutama adalah aspek sosial

dan ekonomi. Aspek sosial ialah adanya ketidaksamaan sosial di antara sesama warga masyarakat yang bersangkutan, seperti perbedaan suku bangsa, ras, kelamin, usia; yang bersumber dari corak sistem pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Aspek ekonomi ialah adanya ketidaksamaan di antara sesama warga masyarakat dalam hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi.

Sebuah semangat baru telah dihembuskan untuk mem-berdayakan ekonomi rakyat. Setelah sekian lama tidak diper-hatikan, kini usaha kecil mulai dibangkitkan dan diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional yang sedang mengalami keterpurukan akibat. Anggapan bahwa usaha kecil tak begitu berperan dalam perekonomian nasional, tampaknya harus segera dicampakkan. Di saat krisis, di mana banyak usaha besar yang gulung tikar namun di daerah pedesaan tidak begitu berpengaruh pada aktivitas usaha masyarakat.

Usaha kecil yang jumlahnya jutaan itu sebenarnya mempu-nyai potensi sebagai penggerak ekonomi nasional, krisis yang melanda negeri ini, setidaknya sebagai batu ujian bahwa usaha kecil memang perlu diberdayakan. Dengan kata lain usaha ke-cil mempunyai peranan cukup dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang serta penangu-angan kemiskinan. Di samping itu, usaha kecil juga merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagai gambaran, pada 2003 tenaga kerja yang diserap oleh industri rumah tangga dan industri kecil mencapai 59 persen dari tenaga kerja yang diserap oleh industri (Anonim, 2004). Dan tahun sebelumnya, pada 1986 terdapat unit industri kecil dan rumah tangga mencakup 99,5 persen dari kes-eluruhan unit industri yang ada di Indonesia, penyerapan tenaga kerja tercatat sebesar 86,6 persen dari keseluruhan tenaga kerja yang terserap di sektor Industrial ini menunjukkan betapa pent-ingnya keberadaan industri tersebut (Irsan Azhary Saleh, 1986).

Industri kecil di Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk berkembang, perkembangan ini sangat dihargai apabila dapat berlangsung atas prakarsa dan adanya kekuatan masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal membantu dengan fasilitas dan kemudahan serta perlindungan yang diperlukan, masyarakat desa biasanya mampu dengan kekuatannya sendiri menumbuhkan industri kecil. Unit industri kecil dan rumah tangga mencakup 99,5% dari keseluruhan unit industri yang ada di Indonesia, penyerapan tenaga kerja tercatat sebesar 86,6% dari keseluruhan tenaga kerja yang terserap di sektor Industrial ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan industri tersebut (Irsan Azhary Saleh, 1986).

Membina dan mengembangkan industri rumah tangga memang banyak kendala, karena sebagian besar pengusaha tersebut melakukannya sebagai usaha sampingan sehingga kecil peluangnya untuk berkembang lebih lanjut. Namun betapa pun sulitnya mengembangkan industri kecil dan rumah tangga ini, pada kenyataan industri tersebut tetap bertahan, yang antara lain disebabkan oleh:

1. Sebagian populasi industri tersebut berada di pedesaan merupakan strategi kelangsungan hidup rumah tangga.
2. Industri tersebut menggunakan bahan baku yang berada di lingkungan sekitarnya sehingga anggaran biaya produksi dapat diperkecil.
3. Harga produksi relatif murah sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat
4. Upah tenaga kerja lebih murah.
5. Tetap ada permintaan terhadap beberapa jenis barang komoditi yang diproduksi secara maksimal karena adanya aspek pendukung yang kuat (Ken Suratiyah 1994).

Lebih lanjut alasan yang bisa dikemukakan bahwa Industri kecil dan rumah tangga dalam kenyataannya: biasanya berkembang, karena sektor pertanian cenderung menurun dengan

lahan yang semakin sempit dan elastis tenaga kerja yang terbatas, persyaratan dan ketrampilan yang diperlukan tidak terlalu sulit, kebutuhan investasi terjangkau oleh kebanyakan masyarakat dan sifatnya mampu menciptakan struktur ekonomi pedesaan yang mapan dan mengurangi ketergantungan mutlak pada sektor pertanian (Muhammad Aliern, 1990: 24).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa industri kecil dan rumah tangga memiliki kontribusi dalam aspek pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia, kontribusi tersebut berupa:

1. Dapat menyediakan lapangan kerja dalam rangka waktu panjang dan dalam jumlah yang besar.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tingkat pemerataan yang lebih baik.
3. Meningkatkan optimalisasi sumber daya ekonomi.

Jadi industri merupakan bagian penting dan cukup menentukan dalam perekonomian nasional, bahkan bisa dikatakan bahwa industri kecil dan rumah tangga tersebut merupakan tumpuan dan harapan masa depan karena di manapun pengembangan industri kecil dan rumah tangga tersebut tidak memerlukan prasyarat yang terlalu sulit sebagaimana usaha besar dalam persyaratan modal, keahlian dan teknologi, selain itu dapat dijadikan sebagai salah satu wadah untuk mengembangkan usaha nasional dalam rangka), menghadapi kondisi krisis bangsa hari ini.

Adanya kondisi pertambahan penduduk dan sektor pertanian yang dianggap lamban pertumbuhannya serta penanaman modal di sektor pertanian kurang menguntungkan merupakan suatu pendorong bagi penduduk untuk membuka usaha di luar pertanian ditambah lagi adanya tekanan ekonomi menuntut perempuan bekerja di luar sektor pertanian.

Menyempitnya lahan pertanian dan semakin berkembangnya teknologi pertanian pada sawah di bidang teknologi dan bibit unggul, mengakibatkan penurunan kesempatan kerja

perempuan di pedesaan di sektor pertanian. Perempuan kehilangan kesempatan berburuh tani pada waktu menanam, menyang dan panen. Oleh karena itu mereka memerlukan alternatif untuk memperoleh pekerjaan di luar pertanian (Ken Sutiyah, 1991). Keadaan ini memperjelas bahwa rumah tangga petani tidak bergantung pada usaha tani, mereka bekerja di luar pertanian sebagai salah satu bentuk strategi kelangsungan rumah tangga. Oleh karena itu tumbuhnya sektor industri di pedesaan terutama industri rumah tangga sangat penting artinya karena kegiatan tersebut akan memberikan peluang berusaha, merangsang pertumbuhan dan mampu menekan migrasi tenaga kerja ke luar pedesaan.

Perempuan terlibat dalam pekerjaan di luar pertanian di pedesaan umumnya pilihan pekerjaan yang mereka geluti adalah sektor informal bidang perdagangan khususnya pangan, sebagai penjual atau pengelola usaha, karena sektor ini tidak terlalu membawa dampak atau risiko terhadap integrasi sosial keluarga, sektor ini selain mendatangkan penghasilan juga berperan penting terhadap kecukupan kebutuhan rumah tangga.

Penelitian Holmer (1992: 37-39) bidang pekerjaan yang banyak dilakukan oleh perempuan di pedesaan yaitu kerja rumahan (*home based work*), ciri pekerjaan ini antara lain: *pertama*, pekerja dapat juga menjadi pengelola usaha. *Kedua*, pendapatan berdasarkan hasil satuan produksi dan bukan berdasarkan jam kerja. *Ketiga*, pekerjaan ini merupakan pekerjaan sampingan artinya prospek penyediaan kerja pekerjaan tak terjamin terus menerus tergantung pasang surut permintaan. *Keempat*, pekerja dapat menentukan sendiri kapan mulai bekerja dan bebas untuk menghentikan sejenak. *Kelima*, berkaitan dengan barang yang dihasilkan yaitu aneka barang yang dihasilkan dalam rumah tangga. *Keenam*, rumah sebagai tempat tinggal pekerja pada dasarnya juga merupakan lokasi pekerjaan.

Bagaimanapun, industri rumah tangga adalah salah satu alternatif yang bisa jawab persoalan perempuan yang harus

bekerja tanpa meninggalkan kerja rumah tangga sehari-hari. Industri rumah tangga adalah kegiatan ekonomi yang berada di sekitar rumah (*home based production*). Sifat industri rumah tangga tersebut di atas sekaligus menjawab dilema perempuan pedesaan dalam berperan ganda yaitu antara tugas mencari nafkah dan serta tanggungjawabnya atas kegiatan rumah tangga sehari-hari, artinya perempuan bisa menjadi pekerja rumahan (*home based worker*) untuk diri sendiri (*Employed*) maupun untuk orang lain (buruh). Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa industri rumah tangga yang umumnya dikelola perempuan memiliki kontribusi yang tidak sedikit di saat negara mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi, sehingga industri tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut. Namun terdapat kekeliruan dalam pengembangan industri rumah tangga tersebut.

Ada kecenderungan pihak pengelola pengembangan usaha kecil bersikap pasif terhadap usaha industri rumah tangga yang dikelola oleh perempuan mereka tidak menyediakan fasilitas yang memadai, sangat terbatas dan salah sasaran. Salah satu contoh, modal usaha sulit didapat, apalagi pinjaman tanpa anggunan, kalau pun ada sangat terbatas. Selain itu ada bias kultural ketika pihak luar memandang pengelola usaha. Mereka membina kepala keluarga notabene laki-laki dalam suatu industri rumah tangga, sementara yang terlibat secara jauh dan intens adalah kaum perempuan tersebut. Hal serupa juga ditemukan pada kasus "Ayam Goreng NY Suharti" sebagai perempuan pengusaha, ia mengelola modal, mengajukan kredit dan pinjaman atas persetujuan suami. Ia dalam hal ini tidak memiliki NPWP sebab ada ketentuan dari pemerintah bahwa NPWP istri mengikuti suami, ketika bercerai, sang suami dapat menuntut ini itu dengan alasan klaim perusahaan atas surat perijinan suamilah perusahaan dapat berkembang pesat (Sobar Hartini, 2003). Ini semua menggambarkan ada keterabaian terhadap hak-hak sipil perempuan.

Dalam hal permodalan, ada kalanya pengusaha perempuan

tidak diberi kesempatan dan dipandang tidak mampu menanggung risiko. Ada kecemasan, kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap perempuan karena dianggap tidak mampu mengelola bisnis. Jika disimak latar sejarahnya, keberadaan industri rumah tangga yang telah berjalan puluhan tahun itu justru hasil pengelolaan kaum perempuan tersebut dan memiliki pengalaman yang tidak sedikit terhadap pasang surut usaha yang dilakukan selama ini.

Pada dasarnya harus segera dilakukan usaha untuk mengembangkan potensi perempuan dalam bidang ekonomi tersebut lebih lanjut, menyediakan fasilitas ketrampilan untuk mengembangkan desain dan penganekaan produk perlu digalakkan, memberikan fasilitas permodalan dan pengelolaan kerja supaya usaha tersebut tidak semata-mata sebagai usaha sampingan saja. Kaum perempuan harus memiliki rasa percaya diri dan menyakini bahwa industri rumah tangga yang telah dijalani puluhan tersebut dapat menjadi usaha yang lebih produktif yang mampu memberikan jaminan bagi ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini instansi, dinas-dinas dan masyarakat yang terkait perlu mempersiapkan diri lebih matang.

Adanya keberagaman ekonomi di kalangan masyarakat, juga tidak bisa dipungkiri akan memunculkan konflik. Misalnya kasus di awal bulan Desember ini yaitu di Kota Medan. Kasus tersebut merupakan kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap pembantu rumah tangga (PRT). Jika ditelusuri, si majikan atau tersangka juga memiliki CV yang memberangkatkan PRT ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) (untuk lebih jelas lihat Gambar 20). Para calon TKW tersebut juga dikurung oleh majikannya tersebut dan tidak diperkenankan keluar rumah dan menghubungi keluarga mereka masing-masing. Perlakuan ini juga disebabkan karena perbedaan latar belakang ekonomi. Si kaya memperlakukan si miskin dengan semena-mena tetapi tidak semua orang kaya seperti itu.

Selain itu, kesenjangan ekonomi juga memicu berbagai

kerusuhan dan demo. Misalnya demo buruh yang meminta kenaikan upah (lihat gambar 21). Buruh yang masih memiliki upah rendah sehingga merasa tidak adil terhadap perusahaan tempat mereka bekerja karena karyawan yang bekerja di kantor dan bos pemilik perusahaanlah yang semakin kaya. Buruh yang bekerja kasar dan berat memiliki upah yang rendah, kesenjangan inilah yang mereka tuntut untuk meningkatkan kebutuhannya.



Gambar 20.

**Kasus kekerasan pekerja rumah tangga (PRT) di Kota Medan
(awal Desember 2014)**

Sumber: www.tribunnews.com



Gambar 21. Demo buruh

D. KEBERAGAMAN JENIS KELAMIN

Jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri fisik biologis yang tidak dapat dipertukarkan. Berbeda dengan gender, gender memiliki pengertian yaitu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan ciri-ciri sosial dan budaya yang sebenarnya dapat dipertukarkan, karena diperoleh melalui proses belajar. Selain itu, Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang tersusun secara sosial dan budaya. Misalnya, perempuan itu secara umum dikenal lemah, lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara itu, laki-laki dianggap memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sementara itu, banyak laki-laki yang emosional dan lembah lembut. Jadi sifat gender dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan (*Sofi Sikumbang/http://sofi-sikumbang.blogspot.com, Struktur Sosial, Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial, 2013*). Misalnya, perempuan bekerja di dalam rumah dan laki-laki bekerja di luar rumah.

Pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, karena mempunyai kesempatan, status, dan peran sosial yang sama. Namun, di beberapa daerah tertentu status laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan fisik dan sosialisasi nilai dan norma yang membedakan mereka. Akan tetapi, perbedaan tersebut bersifat horizontal bukan pada tingkatan dalam masyarakat.

Jenis kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seks atau jenis kelamin (perbedaan biologis). Perbedaan biologis ini dapat dilihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan sebagainya. Atas dasar itu maka ada kelompok laki-laki/pria dan kelompok wanita/perempuan. Pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin menjadi dasar dari seluruh sistem sosial masyarakat kuna. Seluruh masyarakat memberikan sikap dan kegiatan yang berbeda kepada kaum laki-laki dan perem-

puan. Ketentuan tentang pembagian kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi dasar daripada pembagian pekerjaan, semata-mata adalah ditentukan oleh sistem kebudayaan itu sendiri. Misalnya kedudukan laki-laki di Jawa berbeda dengan kedudukan laki-laki di Minangkabau. Di Jawa kekuasaan keluarga di tangan ayah sedang di Minangkabau tidak demikian. Dalam hubungannya dengan pembagian pekerjaan pun setiap suku bangsa memiliki cara sendiri-sendiri. Di Irian dan di Bali misalnya, perempuan harus lebih bekerja keras daripada laki-laki (Abu Ahmadi, 2003), begitu juga perempuan dalam suku Batak.

Penstrataan sosial berdasarkan jenis kelamin ini dipengaruhi oleh adat tradisi dan ada ajaran agama yang membedakan antara hak dan kewajiban berdasarkan jenis kelamin. Akan tetapi, pergeseran sosial budaya juga berpengaruh pada pergeseran peran perempuan di mana kaum perempuan terkadang memiliki status sosial yang lebih tinggi dibanding dengan kaum laki-laki (*Arif Cahyalarifcahya. blogspot.com, Makalah Stratifikasi Sosial, 2011*). Misalnya dalam masyarakat tradisional, penggajian pekerjaan yang berbeda antara pria dengan perempuan. Hal itu dapat disebabkan karena tingkat produktivitas dan frekuensi jam kerja kaum perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Contoh lainnya adalah ajaran kaum laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan. Bahkan dalam pemahaman tradisional, terdapat pembagian tugas berdasarkan gender, di mana tugas perempuan itu di dapur, di kasur (mendampingi suami tidur), dan di sumur (mengurus segala keperluan rumah tangga). Akan tetapi, pergeseran faktor sosial budaya juga berpengaruh pada pergeseran peran perempuan di mana kaum perempuan terkadang memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Konsekuensi dari perbedaan jenis kelamin terhadap peran dan fungsi kedua jenis kelamin tersebut dapat dilihat sebagai berikut (Sofi Sikumbang, 2013):

1. Tugas-tugas sosial keseharian. Tugas ibu mengurus rumah tangga, sedangkan tugas ayah mencari nafkah untuk keluarga.
2. Psikologis keluarga. Secara psikologis anak-anak dekat dengan ibunya, hal ini karena ikatan batin yang dalam.
3. Fungsi anatomi. Secara kodrati perempuan telah dipersiapkan untuk melahirkan serta menyusui. Sementara laki-laki dipersiapkan untuk menjadi pelindung keluarga.

Tabel 1 di halaman berikut ini memperlihatkan perbedaan antara jenis kelamin dan gender beserta contohnya.

Terminologi gender digunakan untuk menandai perbedaan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dengan perbedaan seksual tersebut. Perbedaan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, harta milik, tabu, teknologi, media massa, mode, pendidikan, profesi, alat-alat produksi dan alat-alat rumah tangga (Siti, 1997: 11).

Secara sederhana dan umum, gender diartikan berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan ciri biologis manusia yang diperoleh sejak lahir. Secara biologis dibagi menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan ciri fisik yang berbeda. Laki-laki memiliki penis, jakun dan memproduksi sperma, sedang perempuan memiliki vagina, rahim, sel telur serta air susu. Ciri biologis ini akan melekat selamanya dan tidak bisa dipertukarkan. Adapun gender merupakan ciri yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural dengan mengaitkannya pada ciri biologis masing-masing jenis kelamin (Faqih, 1997; 22).

Ciri biologis khusus yang dimiliki perempuan, yang pada umumnya untuk reproduksi, secara sosial maupun kultural dipresentasikan sebagai makhluk yang lemah lembut, emosional sekaligus keibuan. Sementara laki-laki dengan ciri fisik yang dimiliki, dipandang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Melalui

Tabel 1. Perbedaan antara jenis kelamin dan gender

Jenis Kelamin (Seks)	Contoh	(Gender)	Contoh
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dapat berubah 2. Tidak dapat dipertukarkan 3. Berlaku sepanjang masa 4. Berlaku di mana saja 5. Merupakan kodrat Tuhan 6. Ciptaan Tuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alat kelamin laki-laki dan perempuan ▪ Jakun pada laki-laki dan payudara pada perempuan ▪ Status sebagai laki-laki atau perempuan ▪ Di rumah, di kantor, dan di manapun berada, seorang laki-laki atau perempuan tetap laki-laki dan perempuan. ▪ Laki-laki memiliki ciri-ciri utama yang berbeda dengan ciri-ciri utama perempuan. Misalnya: jakun ▪ Perempuan bisa haid, hamil, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak bisa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berubah 2. Dapat dipertukarkan 3. Tergantung kebudayaan dan kebiasaan 4. Tergantung kebudayaan setempat 5. Bukan merupakan kodrat Tuhan 6. Buatan manusia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peran dalam kegiatan sehari-hari, seperti lebih banyak perempuan jadi juru masak jika di rumah, tetapi jika di restoran lebih banyak laki-laki jadi juru masak. ▪ Di Jawa misalnya, pada zaman penjajahan Belanda kaum perempuan tidak memperoleh hak pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, perempuan memiliki kebebasan untuk mengikuti pendidikan. Di Maluku juga. ▪ Pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan terhadap perempuan dikarenakan budaya setempat, antara lain: diutamakan untuk menjadi perawat, guru TK, pengasuh anak. ▪ Pengaturan jumlah anak dalam suatu keluarga. ▪ Laki-laki dan perempuan berhak menjadi calon ketua RT, RW, kepala desa, bahkan presiden.

proses sosialisasi yang panjang, gender akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi. Akibatnya, perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Di sinilah terjadi kerancuan dan kekeliruan penjelasan

konsep yang berimplikasi terhadap penerapan dan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari, yang berpotensi terhadap terjadinya pengsubordinasian salah satu jenis kelamin tersebut.

Gender telah memunculkan dikotomi sifat, peran, dan posisi antara laki-laki dan perempuan. Dikotomi tersebut meliputi sifat feminim untuk perempuan dan maskulin untuk laki-laki serta posisi tersubordinasi yang dialami perempuan dan mendominasi bagi laki-laki. Untuk laki-laki bekerja di sektor publik (luar rumah) sementara perempuan di sektor domestik (dalam rumah). Sifat, peran dan posisi tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya dan sulit untuk dipisahkan secara tegas.

Perbedaan gender tidak akan masalah selagi menimbulkan keadilan dan kesetaraan, namun dalam realita kehidupan sehari-hari, perbedaan gender ternyata banyak melahirkan berbagai bias dan ketidakadilan, terutama sering menimpa kaum perempuan. Ketidakadilan gender tersebut termanifestasi dalam berbagai bentuk; misalnya marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan, stereotip atau pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan beban kerja lebih banyak dan panjang.

E. KEBERAGAMAN AGAMA

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Di tahun 2000, kira-kira 86,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 8,7% Protestan, 3% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% kepercayaan lainnya.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa "tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya". Walaupun

pemerintah membebaskan untuk memeluk agama kepada warga negaranya, namun secara resmi pemerintah hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Banyaknya agama maupun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, konflik antar agama sering kali tidak terelakkan. Lebih dari itu, kepemimpinan politis Indonesia memainkan peranan penting dalam hubungan antar kelompok maupun golongan. Program transmigrasi secara tidak langsung telah menyebabkan sejumlah konflik di wilayah timur Indonesia.

Berdasarkan sejarah, kaum pendatang telah menjadi pendorong utama keanekaragaman agama dan budaya di dalam negeri dengan pendatang dari India, Tiongkok, Portugal, Arab, dan Belanda. Bagaimanapun, hal ini sudah berubah sejak beberapa perubahan yang telah dibuat untuk menyesuaikan kultur di Indonesia. Hindu dan Buddha telah dibawa ke Indonesia sekitar abad kedua dan abad keempat Masehi ketika pedagang dari India datang ke Sumatera, Jawa dan Sulawesi membawa agama mereka. Hindu mulai berkembang di pulau Jawa pada abad kelima Masehi dengan kasta Brahmana yang memuja Siva. Pedagang juga mengembangkan ajaran Buddha pada abad berikut lebih lanjut dan sejumlah ajaran Buddha dan Hindu telah memengaruhi kerajaan-kerajaan kaya, seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan Sailendra. Sebuah candi Buddha terbesar di dunia yaitu Borobudur, telah dibangun oleh Kerajaan Sailendra pada waktu yang sama, begitu pula dengan candi Hindu, Prambanan juga dibangun. Puncak kejayaan Hindu-Jawa yaitu Kerajaan Majapahit, terjadi pada abad ke-14 M, yang juga menjadi zaman keemasan dalam sejarah Indonesia.

Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-14 M. Berasal dari Gujarat, India, Islam menyebar sampai pantai barat Sumatera dan kemudian berkembang ke timur pulau Jawa. Pada periode ini terdapat beberapa kerajaan Islam, yaitu kerajaan Demak, Pajang, Mataram dan Banten. Pada akhir abad ke-15 M, 20 kerajaan

Islam telah dibentuk, mencerminkan dominasi Islam di Indonesia. Selain Islam, Kristen Katolik dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis, khususnya di pulau Flores dan Timor, sedangkan Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 M dengan pengaruh ajaran *Calvinis* dan *Lutheran*.

Sejarah Islam di Indonesia sangatlah kompleks dan mencerminkan keanekaragaman dan kesempurnaan ke dalam budaya yang sudah ada sebelumnya. Pada abad ke-12, sebagian besar pedagang orang Islam dari India tiba di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Hindu yang dominan beserta kerajaan Buddha, seperti Majapahit dan Sriwijaya, mengalami kemunduran, di mana banyak pengikutnya berpindah agama ke Islam. Dalam jumlah yang lebih kecil, banyak penganut Hindu yang berpindah ke Bali, sebagian Jawa dan Sumatera. Dalam beberapa kasus, ajaran Islam di Indonesia dipraktikkan dalam bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan Islam daerah Timur Tengah.

Ada pula sekelompok pemeluk Ahmadiyah yang kehadirannya belakangan ini sering dipertanyakan. Aliran ini telah hadir di Indonesia sejak tahun 1925. Pada 9 Juni 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah surat keputusan yang praktis melarang Ahmadiyah melakukan aktivitasnya ke luar. Dalam surat keputusan itu dinyatakan bahwa Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajarannya.

Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda (VOC), pada sekitar abad ke-16. Kebijakan VOC yang mereformasi Katolik dengan sukses berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di Indonesia. Agama ini berkembang dengan sangat pesat di abad ke-20, yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua dan lebih sedikit di kepulauan Sunda. Pada 1965, ketika terjadi perebutan kekuasaan, orang-orang tidak beragama dianggap sebagai orang-orang yang tidak ber-Tuhan, dan karenanya tidak mendapatkan

hak-haknya yang penuh sebagai warganegara. Sebagai hasilnya, gereja Protestan mengalami suatu pertumbuhan anggota.

Protestan membentuk suatu perkumpulan minoritas penting di beberapa wilayah. Sebagai contoh, di pulau Sulawesi, 97% penduduknya adalah Protestan, terutama di Tana Toraja, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Sekitar 75% penduduk di Tana Toraja adalah Protestan. Di beberapa wilayah, keseluruhan desa atau kampung memiliki sebutan berbeda terhadap aliran Protestan ini, tergantung pada keberhasilan aktivitas para misionaris. Di Indonesia, terdapat tiga provinsi yang mayoritas penduduknya adalah Protestan, yaitu Papua, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara (Batak) dengan 90% - 94% dari jumlah penduduk. Di Papua, ajaran Protestan telah dipraktikkan secara baik oleh penduduk asli. Di Sulawesi Utara, kaum Minahasa, berpindah agama ke Protestan pada sekitar abad ke-18. Saat ini, kebanyakan dari penduduk asli Sulawesi Utara menjalankan beberapa aliran Protestan. Selain itu, para transmigran dari pulau Jawa dan Madura yang beragama Islam juga mulai berdatangan. Sepuluh persen lebih-kurang; dari jumlah penduduk Indonesia adalah penganut Kristen Protestan.

Kemudian ada kebudayaan dan agama Hindu tiba di Indonesia yang pada abad pertama Masehi, bersamaan waktunya dengan kedatangan agama Buddha, yang kemudian menghasilkan sejumlah kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai, Mataram dan Majapahit. Candi Prambanan adalah kuil Hindu yang dibangun semasa kerajaan Majapahit, semasa dinasti Sanjaya. Kerajaan ini hidup hingga abad ke 16 M, ketika kerajaan Islam mulai berkembang. Periode ini, dikenal sebagai periode Hindu-Indonesia, bertahan selama 16 abad penuh.

Hindu di Indonesia berbeda dengan Hindu lainnya di dunia. Sebagai contoh, Hindu di Indonesia, secara formal ditunjuk sebagai agama Hindu Dharma, tidak pernah menerapkan sistem kasta. Contoh lain adalah, bahwa Epos keagamaan Hindu Mahabharata (Pertempuran Besar Keturunan Bharata) dan Rama-

yana (Perjalanan Rama), menjadi tradisi penting para pengikut Hindu di Indonesia, yang dinyatakan dalam bentuk wayang dan pertunjukan tari. Aliran Hindu juga telah terbentuk dengan cara yang berbeda di daerah pulau Jawa, yang jadinya lebih dipengaruhi oleh versi Islam mereka sendiri, yang dikenal sebagai Islam Abangan atau Islam Kejawen.

Semua praktisi agama Hindu Dharma berbagi kepercayaan dengan banyak orang umum, kebanyakan adalah Lima Filosofi: *Pancā Srada*. Ini meliputi kepercayaan satu Yang Maha Kuasa Tuhan, kepercayaan didalam jiwa dan semangat, serta *karma* atau kepercayaan akan hukuman tindakan timbal balik. Dibanding kepercayaan atas siklus kelahiran kembali dan reinkarnasi, Hindu di Indonesia lebih terkait dengan banyak sekali yang berasal dari nenek moyang roh. Sebagai tambahan, agama Hindu disini lebih memusatkan pada seni dan upacara agama dibanding kitab, hukum dan kepercayaan.

Menurut catatan, jumlah penganut Hindu di Indonesia pada tahun 2006 adalah 6,5 juta orang), sekitar 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia, merupakan nomor empat terbesar. Namun jumlah ini diperdebatkan oleh perwakilan Hindu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). PHDI memberi suatu perkiraan bahwa ada 18 juta orang penganut Hindu di Indonesia. Sekitar 93 % penganut Hindu berada di Bali. Selain Bali juga terdapat di Sumatera, Jawa, Lombok, dan pulau Kalimantan yang juga memiliki populasi Hindu cukup besar, yaitu di Kalimantan Tengah, sekitar 15,8 % (sebagian besarnya adalah Hindu Kaharingan, agama lokal Kalimantan yang digabungkan ke dalam agama Hindu). Berikut contoh upacara keagamaan dalam agama Hindu (lihat Gambar 22).

Selain Hindu, ada agama yang juga merupakan agama tertua di Indonesia yaitu agama Buddha yang tiba pada sekitar abad keenam Masehi. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu, sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar periode yang sama. Seperti kerajaan Sailendra,



Gambar 22.
**Seorang perempuan Hindu Bali sedang menempatkan sesajian
di tempat suci keluarganya**

Sriwijaya dan Mataram. Kedatangan agama Buddha telah dimulai dengan aktivitas perdagangan yang mulai pada awal abad pertama melalui Jalur Sutra antara India dan Indonesia. Sejumlah warisan agama Buddha juga dapat ditemukan di Indonesia, mencakup candi Borobudur di Magelang dan patung atau prasasti dari sejarah Kerajaan Buddha yang lebih awal.

Pada masa pasca Kemerdekaan perkembangan agama Buddha di Indonesia mengalami perubahan, mengikuti kejatuhan Soekarno pada pertengahan tahun 1960-an, di mana dalam Pancasila ditekankan lagi pengakuan akan satu Tuhan (monoteisme). Sebagai hasilnya, pendiri Perbuddhi (Persatuan Buddha Indonesia), Bhikku Ashin Jinarakkhita, mengusulkan bahwa ada satu dewata tertinggi, Sang Hyang Adi Buddha. Hal ini didukung dengan sejarah di belakang versi Buddha Indonesia di masa lampau menurut teks Jawa kuno dan bentuk candi Borobudur.

Menurut sensus nasional tahun 1990, lebih dari 1% dari total penduduk Indonesia beragama Buddha, sekitar 1,8 juta orang. Kebanyakan penganut agama Buddha berada di Jakarta, walau-

pun ada juga di lain provinsi seperti Riau, Sumatra Utara dan Kalimantan Barat. Namun, jumlah ini mungkin terlalu tinggi, mengingat agama Konghucu dan Taoisme tidak dianggap sebagai agama resmi di Indonesia, sehingga dalam sensus diri mereka dianggap sebagai penganut agama Buddha. Berikut contoh pelaksanaan ibadah oleh biksu-biksu Buddha (lihat Gambar 23).

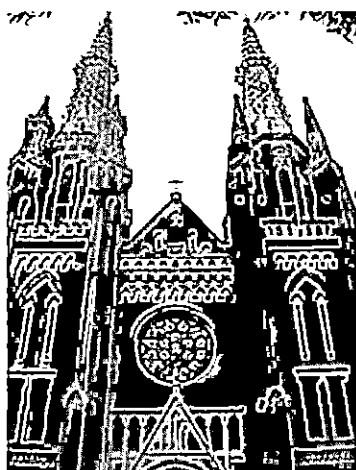


Gambar 23.

Bhiksu Buddha melakukan ritual keagamaan mereka di Borobudur

Kemudian agama Katolik yang pertama kalinya masuk ke Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis, yang kemudian diikuti bangsa Spanyol yang berdagang rempah-rempah. Banyak orang Portugis yang memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia, dimulai dari kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen, Fransiskus Xaverius, mengunjungi pulau itu dan membaptiskan beberapa ribu penduduk setempat. Pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol mulai memperluas pengaruhnya di Manado dan Minahasa, salah satunya adalah menyebarkan agama Kristen Katolik. Hal tersebut tidak bertahan lama sejak VOC berhasil mengusir Spanyol dan Portugis dari Sulawesi Utara. VOC pun mulai menguasai Sulawesi Utara, untuk melindungi kedudukannya di Maluku.

Selama masa VOC, banyak praktisi paham Katolik Roma yang jatuh, dalam hal kaitan kebijakan VOC yang mengkritisi agama itu. Yang paling tampak adalah di Sulawesi Utara, Flores dan Timor Timur. Pada tahun 2006, 3% dari penduduk Indonesia adalah Katolik, lebih kecil dibandingkan para penganut Protestan. Mereka kebanyakan tinggal di Papua dan Flores. Berikut salah satu tempat ibadah Katolik di Indonesia (lihat Gambar 24).



Gambar 24. Katedral di Jakarta

Selanjutnya ada agama Konghucu yang juga agama yang termasuk baru diakui lagi di Indonesia. Konghucu berasal dari Cina daratan dan yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan pada abad ketiga Masehi, orang Tionghoa tiba di kepulauan Nusantara. Berbeda dengan agama yang lain, Konghucu lebih menitikberatkan pada kepercayaan dan praktik yang individual, lepas daripada kode etik melakukannya, bukannya suatu agama masyarakat yang terorganisir dengan baik, atau jalan hidup atau pergerakan sosial. Di era 1900-an, pemeluk Konghucu membentuk suatu organisasi, disebut *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) di Batavia (sekarang Jakarta).

Setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, umat Konghucu di Indonesia terikat oleh beberapa huru-hara politis dan telah digunakan untuk beberapa kepentingan politis. Pada 1965, Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan presiden No. 1/Pn.Ps/1965 1/Pn.Ps/1965, di mana agama resmi di Indonesia menjadi enam, termasuklah Konghucu. Pada awal tahun 1961, Asosiasi Khung Chiao Hui Indonesia (PKCHI), suatu organisasi Konghucu, mengumumkan bahwa aliran Konghucu merupakan suatu agama dan Confucius adalah nabi mereka.

Tahun 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto, menandai era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, perundang-undangan anti Tiongkok telah diberlakukan demi keuntungan dukungan politik dari orang-orang, terutama setelah kejatuhan PKI yang diklaim telah didukung oleh Tiongkok. Soeharto mengeluarkan instruksi presiden No. 14/1967, mengenai kultur Tionghoa, peribadatan, perayaan Tionghoa, serta menghimbau orang Tionghoa untuk mengubah nama asli mereka. Bagaimanapun, Soeharto mengetahui bagaimana cara mengendalikan Tionghoa Indonesia, masyarakat yang hanya 3% dari populasi penduduk Indonesia, tetapi memiliki pengaruh dominan di sektor perekonomian Indonesia. Di tahun yang sama, Soeharto menyatakan bahwa "Konghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam negeri" di depan konferensi PKCHI.

Pada tahun 1969, UU No. 5/1969 dikeluarkan, menggantikan keputusan presiden tahun 1967 mengenai enam agama resmi. Namun, hal ini berbeda dalam praktiknya. Pada 1978, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan bahwa hanya ada lima agama resmi, tidak termasuk Konghucu. Pada tanggal 27 Januari 1979, dalam suatu pertemuan kabinet, dengan kuat memutuskan bahwa Konghucu bukanlah suatu agama. Keputusan Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan pada tahun 1990 yang menegaskan bahwa hanya ada lima agama resmi di Indonesia. Karenanya, status Konghucu di Indonesia pada era Orde Baru tidak pernah jelas. *De jure* berlawanan hukum, di lain pihak

hukum yang lebih tinggi mengizinkan Konghucu, tetapi hukum yang lebih rendah tidak mengakuinya. *De facto*, Konghucu tidak diakui oleh pemerintah dan pengikutnya wajib menjadi agama lain (biasanya Kristen atau Buddha) untuk menjaga kewarganegaraan mereka. Praktik ini telah diterapkan di banyak sektor, termasuk dalam kartu tanda penduduk, pendaftaran perkawinan, dan bahkan dalam pendidikan kewarga negara di Indonesia yang hanya mengenalkan lima agama resmi.

Setelah reformasi Indonesia tahun 1998, ketika kejatuhan Soeharto, Abdurrahman Wahid dipilih menjadi presiden yang keempat. Wahid mencabut instruksi presiden No. 14/1967 dan keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978. Agama Konghucu kini secara resmi dianggap sebagai agama di Indonesia. Kultur Tionghoa dan semua yang terkait dengan aktivitas Tionghoa kini diizinkan untuk dipraktikkan. Warga Tionghoa Indonesia dan pemeluk Konghucu kini dibebaskan untuk melaksanakan ajaran dan tradisi mereka.

Selain beberapa agama tersebut, juga terdapat beberapa kepercayaan di wilayah Indonesia misalnya penganut animisme yang terdapat di wilayah Indonesia bagian Timur, dan bagian lainnya, yang menjadi tujuan utama orang-orang Belanda, termasuk Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan Kalimantan. Kemudian, Kristen menyebar melalui pelabuhan pantai Borneo. Selanjutnya kaum misionaris pun mulai menyebarkan misinya di Toraja, Sulawesi. Wilayah Sumatera juga menjadi target para misionaris ketika itu, khususnya adalah orang-orang Batak, yang saat ini menjadi pemeluk Protestan.

Perubahan penting terhadap agama-agama juga terjadi sepanjang era Orde Baru. Antara tahun 1964 dan 1965, ketegangan antara PKI dan pemerintah Indonesia, bersama dengan beberapa organisasi, mengakibatkan terjadinya konflik dan pembunuhan terburuk di abad ke-20. Atas dasar peristiwa itu, pemerintahan Orde Baru mencoba untuk menindak para pendukung PKI, dengan menerapkan suatu kebijakan yang mengha-

ruskan semua untuk memilih suatu agama, karena kebanyakan pendukung PKI adalah *atheis*. Sebagai hasilnya, tiap-tiap warga negara Indonesia diharuskan untuk membawa kartu identitas pribadi yang menandakan agama mereka. Kebijakan ini mengakibatkan suatu perpindahan agama secara massal, dengan sebagian besar berpindah agama ke Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Karena Konghucu bukanlah salah satu dari status pengenalan agama, banyak orang Tionghoa juga berpindah ke Kristen atau Buddha.

Berbeda agama dengan perbedaan konsepsi dalam berTuhan dan konsepsi lainnya adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, namun realita perbedaan ini menjadi pemicu konflik dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bentrok fisik yang memakan korban jiwa manusia. Contoh beberapa konflik yang diiringi oleh isu perbedaan agama seperti Konflik Maluku, Poso, adalah konflik yang membawa issue perbedaan agama. Sebenarnya konflik Ambon ini bukan semata-mata konflik karena perbedaan agama namun, konflik ini terjadi karena adanya oknum yang tidak bertanggungjawab telah melakukan adu domba antar umat beragama sehingga konflik pun terjadi dan memakan korban kematian umat manusia. Kemudian ada Perang Salib (1096-1271) perang antara umat Kristen Eropa dan Islam, dan konflik ini semakin lebar dengan adanya intervensi negara luar yang memiliki kepentingan. Penyebaran agama yang terlalu berlebihan dan ada unsur paksaan dalam menganut suatu agama baik secara terselubung maupun terbuka dapat menjadikan hubungan antar umat menjadi retak dan tidak harmonis. Dalam jangka waktu yang panjang maka Pemerintah bersama DPR telah menetapkan SKB Menag dan Mendagri No. 1 tahun 1979 tentang peraturan Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Di Indonesia, pendirian rumah ibadah dapat menjadi konflik tersendiri karena pendirian rumah ibadah berakibat mengganggu hubungan antar umat dan perlu dipertimbangkan pendiriannya serta

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ada.

Adanya prasangka dan stereotipe yang terbangun dalam kelompok kepada kelompok lain adalah faktor terjadinya konflik antara kelompok manusia yang, berbeda agama sehingga timbul kejadian serang menyerang dan ejek mengecek. Kemudian cara pandang terhadap agama lain bisa menjadi pemicu konflik juga agama tertentu, misal ada cara pandang melihat agama lainnya sebagai musuh atau orang yang mesti disingkirkan dalam berbagai sisi kehidupan. Keragaman agama memiliki permasalahan tersendiri. Di satu sisi, agama dapat memberi kontribusi positif untuk pembangunan bangsa. Namun dibalik itu, keberagaman agama dapat juga pemicu konflik (lihat Gambar 25).

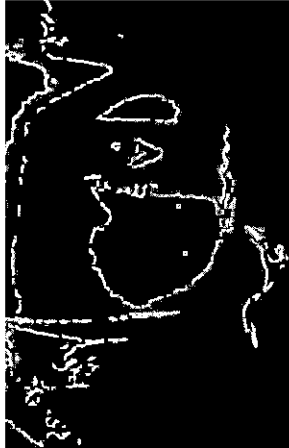


Gambar 25. Konflik agama di Poso

Sumber: www.voa-islam.com

Beberapa catatan tentang perbedaan agama. *Pertama*, tidak ada satu agamapun yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat. *Kedua*, ada banyak kemiripan dalam agama-agama. Misalnya, dalam agama Islam, Kristen, Konfusius, Buddha, ada ajaran yang sama tentang memperlakukan orang lain namun, ada perbedaan mendasar yang diajarkan agama, misalnya persoalan tentang menjalani hidup yang benar, persoalan masuk surga, kitab suci, dan tentang para nabi. *Ketiga*, membuktikan kebenaran agama masing-masing dalam praktik keseharian, ber-

bicara keyakinan secara dialogis dan saling menghormati lebih baik daripada menghabiskan waktu dengan saling menjelekan, menindas, dan melawan satu sama lain. *Keempat*, tidak boleh menggunakan kekerasan untuk memaksa seseorang menganut suatu agama atau kepercayaan. Dengan demikian, berikut ini akan dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk keberagaman dan proses terjadinya keanekaragaman tersebut di Indonesia.



3

Marginalisasi Perempuan dalam Konstruksi Gender

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perempuan termarginalisasi dalam berbagai hal. Ada yang disebabkan oleh faktor sosial budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Di bidang ekonomi misalnya, marginalisasi kaum perempuan terjadi akibat adanya diskriminasi terhadap pembagian kerja menurut gender. Ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap cocok untuk perempuan karena keyakinan gender. Karena perempuan dianggap tekun, sabar dan ramah maka pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah sekretaris, perawat atau suster, pramugari, kasir, guru TK atau resepsionis. Persoalannya, karena pekerjaan mereka dianggap pekerjaan yang feminim maka gajinya pun lebih rendah dari pekerjaan yang sifatnya maskulin, jika ada perempuan yang bekerja sebagai pramugari, sekretaris, pekerjaan-pekerjaan yang dianggap feminin itu selalu dinilai lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap maskulin.

Sebagai kelanjutan dari pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang emosional, maka ia dipandang tidak bisa

memimpin dan karena itu ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Hal ini melahirkan subordinasi bagi perempuan. Bentuk subordinasi bermacam-macam, berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain dari waktu ke waktu dan dari budaya satu dengan budaya yang lainnya. Misalnya, Budaya yang beranggapan bahwa perempuan setelah berumah tangga akan menjadi ibu rumah yang mengurus “dapur” (memasak), tempat tidur (melayani suami), dan sumur (mencuci) sehingga ia tidak perlu sekolah tinggi. Apabila terdapat keterbatasan di dalam ekonomi keluarga untuk biaya pendidikan biasanya perempuan menjadi pilihan pertama untuk tidak di sekolahkan.

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip itu adalah bersumber dari pandangan yang bias gender. Contoh stereotip adalah bahwa perempuan suka berdandan yang biasanya dianggap untuk menarik perhatian laki-laki, jika terjadi perkosaan terhadap perempuan sering kali yang disalahkan perempuan tersebut. Artinya, masyarakat akan cenderung menyalahkan perempuan yang menjadi korban karena dialah yang dianggap penyebab terjadinya pelecehan seksual tersebut. Contoh lain adalah ketika terjadi penertiban Pekerja Seks Komersil (PSK) penanganannya yang dilakukan oleh petugas sangat bias gender.

Ketidakadilan lain adalah sangat tampak ketika realitasnya beban kerja domestik lebih berat, paling tidak waktu yang digunakan lebih lama, tetapi sama sekali tidak dihargai secara ekonomis, bahkan status sosialnya dalam masyarakat dipandang lebih rendah dari pekerjaan publik.

Terjadinya kekerasan yang menimpa perempuan pada umumnya disebabkan karena adanya pandangan yang bias gender. Bentuk kekerasannya bisa kekerasan fisik maupun non fisik yang terjadi di tingkat rumah tangga, negara bahkan dalam tafsir agama. Catatan penting dalam perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah secara sepadan, jadi

mereka harus saling memperlakukan dengan adil. Hormati dan harga hak-hak orang yang berbeda jenis kelamin,

Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan termarginalisasi dan tersubordinasi;

A. FAKTOR EKONOMI

Marginalisasi kaum perempuan terjadi akibat adanya diskriminasi terhadap pembagian kerja menurut gender. Ada jenis pekerjaan tertentu yang dianggap cocok untuk perempuan karena keyakinan gender. Alasan perempuan dianggap tekun, sabar dan ramah maka pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah sekretaris, perawat atau suster, pramugari, kasir, guru TK atau resepsionis. Persoalannya, karena pekerjaan mereka dianggap pekerjaan yang feminim maka gajinya pun lebih rendah dari pekerjaan yang sifatnya maskulin, jika ada perempuan yang bekerja sebagai pramugari, sekretaris pekerjaan-pekerjaan yang dianggap feminin itu selalu dinilai lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap maskulin.

Adanya anggapan bahwa perempuan secara alami mempunyai sifat rajin, teliti, lemah lembut, pemelihara dan penyayang menyebabkan mereka dianggap paling cocok untuk bekerja mengurus rumah tangga (pekerjaan domestik). Akibatnya, semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya, maka beban pekerjaan perempuan menjadi lebih berat. Pada kalangan keluarga miskin biasanya beban kerja perempuan menjadi berlipat ganda; di samping harus membereskan urusan rumah tangga, mereka juga harus membantu bekerja di luar rumah untuk membantu mencari nafkah tambahan bagi keluarganya (Faqih, 1997: 34). Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian tentang perempuan dalam sektor informal yang selalu menunjukkan bahwa perempuan tersebut memiliki beban ganda dalam kesehariannya.

Status sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat yang dibagi dalam lapisan kelas atas menengah dan

bawah, tingkatan berdasarkan tingkatan pendapatan dan pendidikan dan lainnya, dan tingkatan pendapatan berdasarkan pendapatan yang dimiliki secara perbulan, Tingkatan pendapatan ini disesuaikan dengan harga barang pokok di pasaran.

Aristoteles membagi masyarakat dalam tingkatan status ekonomi dalam tiga golongan, yaitu golongan sangat kaya (pengusaha, tuan tanah dan bangsawan), golongan kaya (para pedagang) dan golongan miskin (yang biasa).

Kisah perbedaan status sosial ekonomi bias dilihat sebagaimana tertuang dalam buku: *Buku Ayah Anak Beda Warna* yang isinya antara lain:

Proses pemakaman tidak pernah sepi dari rapat-rapat adat. Tidak sepi dari jumlah orang yang terlibat. Rapat adat bukan untuk mendengarkan tingkat kesulitan keluarga yang ditinggalkan, tetapi lebih untuk mengedepankan adat dan keluarga mengikuti apa yang telah menjadi "kehendak" adat. Jadi, persiapan dan pembicaraan serta rancangan yang sudah dilakukan di Jakarta, di mana ayah Tino dan keluarganya tinggal, bukan menjadi rujukan. Keputusan adat yang berlaku.

Pada dimensi ekonomi, Tino menyebut angka-angka sebagai wujud betapa fantastisnya biaya ritual adat. Angka-angka yang ditulisnya di halaman 156 hanyalah sebagian kecil dari jumlah yang fantastis. Coba kita dengarkan apa kata Tino Saroengallo mengenai angka-angka itu:

Dalam perhitungan kasar, untuk membeli dua kerbau, kami memerlukan dana sebesar Rp 28.500.000. Biaya perjalanan mengantar jenazah sudah menghabiskan dana Rp 38.000.000. Kalau semula Tandi menyatakan maksimum anak ke-5 menyumbang Rp 50.000.000, maka hal itu jelas tidak mungkin lagi. Akhirnya angka sumbangan dinaikkan menjadi Rp 90.000.000 untuk lima orang anak atau masing-masing Rp 18.000.000. Dari jumlah itu, teoretis kami hanya mampu menyumbang sekitar Rp 20.000.000 untuk persiapan dan pelaksanaan upacara.

Dalam berkisah Tino sering bergerak menggunakan kata "saya" untuk menyebut dirinya. Namun, kadang beralih pada kata "kami" untuk menunjukkan bahwa bukan hanya dirinya yang berada pada satu situasi tertentu. Nama-nama selain dirinya disebutkan sebagaimana adanya sehingga terdapat tidak sedikit nama dalam buku ini. Selain menyebut

nama ibu kandungnya yang telah bercerai, Tino juga menyebut nama istri kedua ayahnya yang biasa dipanggilnya tante.

Dalam "kisah adat" yang diceritakan, Tino Saroengallo tak mampu "melawan" apalagi mengubah adat. Apa yang pernah ia pikirkan: lebih baik ayahnya dikuburkan di Jakarta. Simpel gampang dan tidak mahal, hanyalah pikiran belaka. Kuasa adat yang menentukan dan Tino serta saudara-saudaranya tidak kuasa menolaknya. Bahkan, kata Tino, kalau dihitung-hitung, utangnya baru akan lunas pada tahun 2014 (hlm. 335).

<http://theperspectiveofanthropology.wordpress.com/> Diunduh Sabtu, 10/11/2012.

Kesenjangan di bidang ekonomi juga terlihat dari tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Demikian juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi. Data BPS tentang Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2002 menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 45% (2002) sedangkan laki-laki 75,34%. Adapun ditahun 2003 TPAK laki-laki lebih besar dibanding TPAK perempuan yakni 76,12% berbanding 44,81%. (BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2003) (Eko Bambang Subiyantoro, Sensitivitas Gender Kebijakan pemerintahan SBY, *www.Theindonesianinstitute.com*, 2005). Rendahnya partisipasi perempuan ini tentunya terkait dengan banyak faktor, salah satunya adalah faktor pendidikan. Faktor ketidaksetaraan gender yang terjadi pada perempuan karena kebijakan pendidikan yang belum mencerminkan kesetaraan gender berdampak secara langsung pada tingkat partisipasi perempuan untuk pada angkatan kerja.

Lapangan kerja yang tersedia lebih banyak menekankan pada aspek pendidikan, yang menghambat partisipasi perempuan, karena memang jenjang pendidikan tinggi yang diterima perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Stereotipe tertentu yang ditujukan pada perempuan juga mempunyai dampak yang buruk bagi partisipasi perempuan pada angkatan kerja.

Stereotipe tertentu yang disebabkan oleh perbedaan gender seperti lemah lembut, emosional, kurang rasional kurang tegas, menyebabkan perempuan secara khusus tidak mempunyai kesempatan luas seperti halnya laki-laki dalam memperoleh pekerjaan. Stereotipe tersebut telah mempersempit ruang perempuan untuk bekerja. Akibat stereotipe itu, perempuan secara tidak langsung harus mencari pekerjaan-pekerjaan berdasarkan stereotipe tersebut, yang secara ekonomis kurang menguntungkan.

Akibat stereotipe ini pula tidak hanya kesempatan perempuan yang rendah untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi perempuan juga tidak mempunyai kesempatan dalam peningkatan upah dan karier. Karena stereotipe tersebut, perempuan bekerja pada pekerjaan yang tidak strategis dan jenis pekerjaan yang diperoleh lebih menekankan pada aspek keterampilan ketimbang pikiran. Dan umumnya jenis pekerjaan ini secara pendapatan cukup murah. Misalnya dalam sebuah pabrik rokok. Pekerjaan yang dianggap lazim bagi perempuan adalah melinting rokok. Pekerjaan ini hanya menekankan pada ketrampilan saja. Upah yang diterima juga rendah. Sementara itu pada jenjang yang lebih tinggi dalam pekerjaan ini banyak dimiliki oleh laki-laki misalnya menjadi supervisi di pabrik tersebut. Pendapatan laki-laki pun dalam hal ini juga jelas lebih tinggi. Faktor yang juga sangat berpengaruh bagi rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah masalah kultur sosial masyarakat yang belum bisa menerima perempuan untuk bekerja. Meskipun saat ini perempuan bekerja sudah masuk diberbagai sektor, perempuan bekerja masih dianggap miring bagi masyarakat.

Perempuan bekerja masih belum dianggap seperti halnya laki-laki bekerja. Perempuan masih belum dianggap secara kodrati untuk bekerja dan mencari nafkah, karena bekerja dan mencari nafkah adalah adalah tanggungjawab laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Kalau ada perempuan yang bekerja, umumnya dianggap sebagai pekerjaan tambahan, meskipun secara nominal penghasilan perempuan jauh lebih besar dari

laki-laki. Pandangan masyarakat ini juga diperkuat dengan UU Perkawinan tahun 74 yang menyatakan bahwa kepala rumah tangga adalah laki-laki. Tentunya anggapan demikian sungguh merugikan perempuan sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk bekerja. Perempuan akhirnya tidak mempunyai kepercayaan diri untuk mendapatkan penghasilan, apalagi ketika perempuan ini sudah menikah, dia tidak saja lemah secara kultur, tetapi juga lemah secara struktur. Pandangan ini juga menimbulkan ketidaksetaraan gender bagi perempuan yang ditinggal suaminya, akibat cerai atau kematian. Perempuan mau tidak mau harus tetap mempertahankan kehidupannya, apalagi jika perempuan mempunyai anak dan harus menanggung anak. Jika anggapan masyarakat yang mendeskreditkan perempuan tetap berlangsung, maka pandangan tersebut juga berpengaruh secara psikologis bagi para perempuan yang menjadi janda dan lemah secara ekonomi.

Marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, di dunia kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya juga berakibat pada pemiskinan ekonomi perempuan. Pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik, oleh sebab itu tidak pantas melakukan pekerjaan publik seperti laki-laki. Akibatnya perempuan terkurung dalam ruang dan wawasan yang sempit.

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, namun ada beberapa kasus marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan (Dwi Yuni Astuti: *www.scribd.com/doc/94176912/ Marginalisasi-Perempuan-Akibat-Perbedaan-Dan-Pembagian-Gender-Dalam-Kultur*, 2005).

Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan

dapat dilihat dari contoh-contoh berikut:

1. Masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja di sektor formal.
2. Rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.
3. Pembagian kerja yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan di mana perempuan telah terlibat dalam pekerjaan produksi, namun kerja reproduksi di dalam rumah tetap dianggap sebagai tanggung jawab perempuan (beban ganda).
4. Posisi perempuan di dalam bidang sosial politik (partisipasi politik) masih rendah dibandingkan dengan laki-laki;
5. Meskipun penghasilan perempuan pekerja memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penghasilan dan kesejahteraan keluarga, namun perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga, dan dianggap tenaga cadangan (sekunder).

Dalam kajian gender, kepentingan perempuan untuk memperbaiki posisi/statusnya dalam masyarakat menjadi semakin terganggu jika kesulitan ekonomi menekan mereka. Karenanya, mengintegrasikan perspektif gender dalam program pembangunan menjadi keharusan dengan alasan objektif, yaitu perbaikan perekonomian sekaligus alasan subjektif, yaitu demi keadilan ekonomi dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi semua pihak, khususnya para pemerintah dan pengambil kebijakan untuk secara sengaja melakukan tindakan khusus dengan mempertimbangkan kondisi spesifik perempuan yang ditujukan untuk memperbaiki status mereka. Akhirnya, memungkinkan perempuan khususnya untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi sebagai subjek pembangunan itu sendiri (Josep Antonius Ufi: <http://oceufi.wordpress.com/category/gender-sebagai-konstruksi-sosial-budaya/>, 2009).

Banyak hal yang terkait dengan dengan ekonomi yang menyebabkan

perempuan tidak diakui peranannya karena kiprahnya hanya di sekitar ekonomi keluarga dan rumah tangga. Masih sedikit pengakuan pada kaum perempuan ketika mereka sukses dan berhasil menjadi pelaku ekonomi karena dianggap itu hanya kerja main-main bukan kerja yang prestisius, seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki. Kiprah laki-laki di dunia ekonomi diakui karena mereka bisa masuk pada level penentu kebijakan dan duduk pada jabatan-jabatan strategis pada kantor-kantor yang terkait dengan perekonomian. Sementara perempuan belum banyak yang menduduki level tersebut, akibatnya kegiatan perempuan di bidang ekonomi yang terpusat pada sekitar keluarga dan dirinya sendiri. Meskipun perempuan menghasilkan bahkan menjadi penunjang hidup keluarga, tidak diakui dan hanya dianggap sebagai pekerja sambilan (Rumah Sosiologi, Gender dan Ketidakadilan Gender, <http://mbaawoeland.blogspot.com/2011/12/gender-dan-ketidakadilan-gender.html>, 2011).

Banyak hal yang masih mencerminkan ketimpangan di bidang ekonomi, misalnya upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki untuk tanggung jawab yang sama besar, karena perempuan dianggap lajang bukan kepala keluarga. Contohnya: bila akan mengajukan kredit di bank masih harus memerlukan tanda tangan suami sementara jika suami yang mengajukan tidak perlu minta tanda tangan istri, meskipun keadaannya istri yang bertanggung jawab terhadap utang tersebut. Dalam hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Fatimah pada 2011 di Kota Bukittinggi, menunjukkan bahwa pelaku industri kreatif yang belum mendapatkan legalitas atau izin usaha hampir seluruhnya dilakukan oleh perempuan. Anehnya ketika usaha itu dilegalkan sebagai sebuah perusahaan maka nama yang dicantumkan diambil alih oleh nama laki-laki (suami). Dengan demikian, pada level menengah atas yang dianggap menjadi pelaku ekonomi utama tersebut adalah jenis kelamin laki-laki.

Kerasnya dunia publik menunjukkan bahwa perempuan be-

lum diakui sebagai pekerja profesional. Perempuan sebagai objek masih mendapatkan penekanan saat mereka terlibat dalam bidang publik, padahal perempuan sudah mampu memainkan peran sebagai subjek dalam berbagai proses ekonomi. Sektor publik belum disiapkan untuk menerima kehadiran kaum perempuan dengan semestinya. Hal ini memaksa perempuan untuk selalu berusaha menjadi laki-laki di dunia kerja. Dia harus bersaing ketat dengan rekan sesama kerja yang tidak saja laki-laki tetapi juga perempuan. Dia harus menunjukkan kemampuannya bahwa dia tidak hanya bisa menjadi ibu dan istri tetapi juga harus menunjukkan bahwa dia juga bisa menjadi pekerja yang profesional.

Ketika melamar pekerjaan seorang perempuan tidak saja dipandang kualitas intelektualitasnya, melainkan juga sosok dan status sebagai perempuan. Biaya ideologis yang harus dibayar adalah, perempuan harus mampu memenuhi kriteria tersebut, tidak hanya berkualitas tapi juga berusaha menampilkan diri habis-habisan agar sebagai pendaftar dia bisa diterima.

Praktik-praktik perdagangan perempuan (*Trafficking in woman*) dan bisnis prostitusi banyak menimpa perempuan-perempuan di negeri kita. Kedua hal ini saling berkaitan, pada umumnya disebabkan faktor kemiskinan, artinya kemiskinan telah membawa banyak perempuan untuk menjadi objek perdagangan manusia dan bisnis prostitusi (lihat Gambar 26 dan gambar 27). Jika dilihat latar belakang asal perempuan-perempuan tersebut, mereka umumnya berasal dari desa dan daerah tertinggal, dengan kata lain perempuan-perempuan di desa-desa tertinggal di Indonesia berada dalam kondisi tekanan ekonomi yang sulit, kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu dan adanya sebuah asa (harapan) untuk memperbaiki masa depan keluarga di desa telah menjerumuskan mereka dalam jaringan internasional *trafficking* dan prostitusi. Agen *trafficking* atau di sebut dengan *trafficker* dengan iming-iming mendapat kesempatan kerja dan gaji tinggi telah menjadikan desa-desa tertinggal

di Indonesia sebagai sasaran utama, dan menurut studi yang dilakukan oleh American Center For International Labor Solidarity (ACLS), jenis pekerjaan yang dijadikan tujuan dari perdagangan perempuan adalah buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks, perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk penganten pesanan, dan pekerja anak.



Gambar 26. Korban Perdagangan Perempuan

Sumber; store.tempo.com



Gambar 27. Perempuan Korban bisnis Prostitusi

Linda Darnela dalam jurnal Yin Yang 2007, mengemukakan, kondisi sosial yang masih tradisional dengan tingkat pendidikan yang rendah telah menyebabkan orang-orang tua di desa telah merelakan anak-anak perempuan mereka bekerja dikota atau ke luar negeri dengan harapan perbaikan ekonomi keluarga, namun demikian dapat disebutkan bahwa faktor-faktor kesulitan dan tekanan ekonomi, budaya patriarkhis atau subordinasi posisi perempuan dan tingkat pendidikan yang rendah, ketiadaan akte kelahiran, kebijakan bias gender dan pengaruh globalisasi menjadi penyebab maraknya praktik *trafficking* dan prostitusi di desa-desa tertinggal di Indonesia.

Sesungguhnya, sebelum terjadi krisis moneter di Indonesia, kecenderungan perempuan Indonesia lebih banyak bekerja sebagai ibu rumah tangga. Setelah krisis terjadi, banyak perempuan Indonesia harus keluar dari urusan rumah tangga mereka menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) dalam rangka usaha memenuhi tuntutan ekonomi keluarga dan kemudian mereka terjebak dalam perdagangan manusia dan anak untuk tujuan eksploitasi kerja.

Perempuan-perempuan korban *trafficking* berasal dari desa dan daerah tertinggal. Karena ketertinggalan itulah yang memberi alasan keluarga untuk mendorong perempuan berangkat menjadi TKW dan berharap sepulangnya membawa uang untuk memperbaiki nasib perekonomian keluarga dan kampungnya.

Wilayah tertinggal atau daerah tertinggal adalah suatu daerah yang kabupatennya terdiri dari masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang di dibandingkan dengan daerah lain. Ketertinggalan ini dan segala permasalahannya ini dapat menjadi faktor di balik perdagangan perempuan dan anak. Proses feminisasi kemiskinan, pengangguran yang kronis dan kurangnya kesempatan ekonomi adalah beberapa faktor yang memengaruhi perdagangan perempuan dan anak (ILO, 2004). Miskin, suatu yang rentan terhadap perdagangan perempuan dan anak ini, rentan dalam artian, keluarga tidak dapat memenuhi kebu-

tuhan pokok, mata pencaharian yang berbasis pada pekerjaan yang sulit, tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah dari kota, pengangguran yang tinggi serta kurangnya mata pencarian yang memiliki tindak lanjut masa depan mereka.

Kondisi miskin dan daerah tertinggal ini memancing para *trafficker* dan agen perekrut untuk turun ke desa atau dusun untuk mengidentifikasi para perempuan dan anak, kemudian membujuk dan melakukan pendekatan kepada keluarga termasuk aparat desa untuk mendapatkan persetujuan tanpa protes. Para *trafficker* itu bekerja dengan berkedok perusahaan jasa tenaga kerja.

Sistem migrasi yang tidak teratur juga alasan yang membuat posisi calon tenaga kerja semakin terjebak dalam perdagangan manusia, sistem itu meliputi pemalsuan dokumen. Perusahaan tenaga kerja yang memberangkatkan para calon TKW juga tidak melindunginya, mulai dari keberangkatan sampai mereka bekerja di luar negeri, begitu juga saat pemulangan mereka.

Selayaknya pemerintah dengan adanya kebijakan negara untuk mengeksplor tenaga kerja sebagai kebutuhan devisa negara haruslah diimbangi dengan kebijakan perlindungan terhadap calon maupun yang sudah bekerja baik itu yang bekerja di luar negeri, nasional maupun lokal. Selain itu, jangan lupa melihat akar persoalan munculnya perdagangan manusia, yang dalam hal ini kebanyakan adalah kaum miskin, masyarakat daerah tertinggal. Perlunya sikap yang sungguh-sungguh dalam mengatasi wilayah tertinggal ini melalui perencanaan yang memiliki sensitivitas, memahami keberagaman budaya, serta respek dan respon yang tepat terhadap perkembangan sebuah wilayah.

Pemerintah hendaklah secara sadar, respek dan empati terhadap permasalahan pembangunan wilayah tertinggal yang meliputi masalah tingkat kemiskinan yang tinggi, *income* perkapita yang rendah, buruknya sarana dan prasarana lingkungan, terbatasnya transportasi, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang masih rendah, sumber daya manusia yang terbatas, adat istiadat

yang sulit menerima perubahan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain.

Yang menjadi persoalan juga, apabila di dalam melakukan pembangunan wilayah tertinggal, masyarakat khususnya perempuan dianggap sebagai konsumen pasif dalam perencanaan wilayah tersebut. Seharusnya mereka tidak diabaikan dalam proses perencanaan dan proses pelaksanaan kebijakan pembangunan itu. Mereka harus diberikan kesempatan untuk ikut andil dalam proses penentuan kebijakan agar masyarakat memiliki rasa "memiliki, menjaga serta melestarikan" apa yang direncanakan tersebut. Pelibatan ini akan dapat memengaruhi penduduk untuk tidak tergoda bekerja ke luar negeri.

Pada dasarnya bekerja ke luar negeri bukanlah suatu yang dilarang namun harus dengan catatan bekerja ke luar negeri setelah memang sistem migrasi tenaga kerja berjalan dengan teratur dan tertib sehingganya perndagangan manusia itu bisa terhindari. Pemerintah diharapkan bekerja langsung pada akar rumput dan langsung menjangkau masyarakat terutama perempuan dan anak yang rentan di perdagangan.

Keluarga dari perempuan dan anak yang rentan di perdagangan perlu dilakukan intervensi terutama dalam hal informasi tentang bahaya dan duka perdagangan manusia ini dan juga memberikan alternatif mata pencaharian dalam rangka pengentasan kemiskinan dan dapat juga diciptkan program khusus pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di daerah tertinggal serta memberi kesempatan mengenyam pendidikan, karena lewat informasi dan pengetahuan yang jelas, mereka tidak mudah tergoda untuk bekerja ke luar negeri secara serampangan.

B. FAKTOR SOSIAL BUDAYA

Ann Oakley (dalam Sutinah, 2004) mengatakan bahwa gender merupakan alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Ditegaskan bahwa *gender adalah pembagian laki-laki dan*

perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Ternyata, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, konstruksi sosial budaya bahkan melalui kekuasaan negara. Sedemikian panjang dan lamanya proses “genderisasi” secara sosial budaya tersebut sehingga lambat laun perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial budaya menjadi seolah-olah ketentuan dari Tuhan, atau bersifat kodrati dan biologis yang tidak dapat diubah lagi. Artinya, ada anggapan sebagian besar masyarakat yang namanya kodrat perempuan adalah hasil konstruksi sosial dan budaya atau gender. Gender memengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Perbedaan yang ditentukan oleh aturan masyarakat dan bukan biologis itu dianggap sebagai ketentuan Tuhan (Josep Antonius Ufi: <http://oceufi.wordpress.com/category/gender-sebagai-konstruksi-sosial-budaya/>, 2009).

Masyarakat sebagai suatu kelompok, menciptakan perilaku pembagian gender untuk menentukan apa yang mereka anggap sebagai suatu keharusan, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga, atau urusan domestik seperti mencuci, memasak dan merawat anak sering kali dianggap sebagai kodrat perempuan. Padahal peran gender semacam itu adalah hasil konstruksi sosial budaya dalam masyarakat. Peran-peran gender semacam itu bisa pula dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, jenis pekerjaan bisa dipertukarkan dan tidak bersifat spesifik.

Sebagai kelanjutan dari pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang emosional, maka dia dipandang tidak bisa memimpin dan karena itu ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Hal ini melahirkan subordinasi bagi perempuan. Bentuk subordinasi bermacam-macam, berbeda dari satu tempat

dengan tempat yang lain dari waktu ke waktu dan dari budaya satu dengan budaya yang lainnya. Misalnya, Budaya yang beranggapan bahwa perempuan setelah berumah tangga akan menjadi ibu rumah yang mengurus dapur (memasak), tempat tidur (melayani suami), dan sumur (mencuci) sehingga ia tidak perlu sekolah tinggi. Ketika terdapat keterbatasan di dalam ekonomi untuk biaya pendidikan biasanya perempuan menjadi pilihan pertama untuk tidak disekolahkan atau dikorbankan.

Menurut UU no 23 tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan orang secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain terhadap seorang perempuan atau pihak lain yang ada dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga terancam melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam UU ini, kekerasan dapat dibagi atas 4 bentuk: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Berikut ini contoh kasus kekerasan terhadap perempuan yang berawal dari konstruksi sosial budaya bias gender.

Kasus Persepsi Perempuan

"AKU INGIN MASUK SURGA"

Aku seorang pembantu rumah tangga yang bekerja pada keluarga pak Halim, yang pada saat ini mereka belum dikarunai seorang anak, sama dengan diriku, sampai saat ini aku juga belum di karunia seorang anak. Namun keluarga pak Halim berbeda dengan keluargaku, mereka orang kaya, sedangkan aku orang miskin. Mereka sama-sama memiliki pekerjaan yang mapan, beda dengan aku. Aku seorang pembantu, sedangkan suami seorang tukang ojek. Bedanya lagi pak Halim tak pernah memukul istrinya, sedangkan aku sering dipukul sama suami apabila aku nggak bisa memenuhi keinginanya.

Pagi ini, ada suatu yang inginku ungkapkan sama bu Halim. "Ibu bo-

lehan aku meminjam uang sebesar tujuh juta rupiah, nanti aku cicil dari gaji per bulanku."

"Lha, buat apa uang sebanyak itu oleh bu Surti?"

"Anu bu, buat beli motor suamiku."

"Kan suamimu sudah punya motor, walaupun motor seken, dan itu-pun juga dari hasil tabunganmu."

"Iya, kata suami, katanya orang-orang pada gak mau ngojek kalau motornya butut."

"Nanti ibu pikirkan dulu."

Aku sedih sekali, kayaknya bu Halim kurang bersedia dengan permintaanku. Aku sedih karena aku nggak bisa membahagiakan suamiku, aku masih ingat wejangan nenek dan ibuku, "Nduk, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus bahagiakan suamimu, kamu harus mengabdikan kepada suami."

Ah, wejangan itu selalu membuat aku bingung. Aku ingin mengabdikan kepada suami dengan cara memenuhi keinginannya, tapi gimana lagi, aku kan gak punya uang banyak dan aku juga takut

"Pra... prak... prak..." Aduh sakit, tamparan itu menyakitkan

"Masak sih majikanmu tidak mau memberikan uang itu, kan kamu gak minta, cuma minjam, toh nanti diganti ama gajimu tiap bulan, apa susahnyanya."

Begitulah suamiku, kalau keinginannya tak dipenuhi, aku hanya bisa diam, aku takut..., aku diperlakukan lebih kejam oleh suamiku. Dan aku lebih takut, aku gak bakalan masuk surga, karena aku gak mampu mengabdikan kepada suami dengan baik.

Hari ini aku baru bisa berangkat kerja, beberapa hari ini kepalaku pusing.

"Surti, ibu sebenarnya sudah lama ingin ngobrol denganmu, dan rasanya sikap ini bukan karena ingin mencampuri urusan rumah tangga, cuma ada suatu keprihatinan dan ingin mencoba memecahkan persoalan rumah tanggamu."

"Tidak apa-apa kok bu, apa yang ingin dibicarakan dengan saya."

"Begini, apa sebenarnya yang membuatmu sakit dan sedih beberapa hari ini?"

"Saya sedih, sedih dan takut, saya gak bakalan masuk surga."

"Apa hubungannya?"

"Saya gak bisa membahagiakan dan mengabdikan kepada suami saya."

“Lha selama ini, kamukan baik dengan suami.”

“Tapi beberapa hari ini, tidak, aku gak bisa membelikan motor buatnya.”

Aku lihat bu Halim terpana dan bingung.

Narasi di atas adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga yang didasarkan adanya suatu hubungan suami sebagai ordinat (yang berkuasa) dan istri sebagai subordinat (yang dikuasai). Dan ada suatu persepsi yang salah pengertian akan hakikat pengabdian terhadap suami dalam rangka memperoleh pintu surga. Hakikatnya mengabdikan kepada suami, menjadi suatu jalan menuju surga adalah berbuat baik dan mengabdikan suami adalah suatu amal di kala perbuatan tersebut masih dalam tatanan kemaslahatan bersama dan tidak merugikan antara satu pihak dengan pihak lain. Suatu pengabdian yang diakui adalah pengabdian pada seseorang yang masih dalam tatanan kehidupan yang baik dan lurus, tatanan kehidupan yang tidak menyimpang dari akidah agama itu sendiri.

Narasi di atas hanya satu dari sekian bentuk kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT). Dalam fakta KDRT tidak hanya pada masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah, namun pada keluarga yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang tinggi. KDRT tidak hanya dilakukan oleh laki-laki yang “preman” tapi oleh laki-laki yang memiliki karier yang bagus juga melakukan KDRT. KDRT tidak hanya dilakukan oleh lelaki yang kasar dan tidak bisa bergaul namun KDRT juga dilakukan oleh suami yang santun.

Dalam realita KDRT merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, secara garis besar ada beberapa faktor terjadinya KDRT yaitu: *pertama*, adanya budaya patriarki yang masih bercokol kuat dalam kehidupan masyarakat, budaya yang menyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferiornya. *Kedua*,

interpretasi keliru terhadap suatu ajaran agama, misalnya “jika istri durhaka, pukullah.” *Pukullah* di sini memiliki makna menegur dengan kasih sayang, tetapi bisa saja ditafsirkan memang memukul dengan kekerasan fisik.

Ketiga, contoh perilaku yang ada dalam keluarga, jika di dalam keluarga selama ini dalam penyelesaian masalah dilihat dan disaksikan oleh anak dalam bentuk kekerasan, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan kekerasan tersebut yang kemudian setelah dewasa pola kekerasan tersebut juga menjadi acuan dia bertindak kelak. *Keempat*, KDRT tetap langgeng karena adanya pengabaian kasus kekerasan yang ada baik oleh keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum dengan argumentasi bahwa KDRT adalah persoalan internal dalam keluarga yang hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan juga.

Beberapa penelitian Rifka Annisa dari Women Crisis Center menunjukkan bahwa kekerasan verbal terhadap istri diperkirakan ada 48 persen dan 23 persen kekerasan yang bersifat fisik. Ini menyebar dalam tingkat pendidikan dasar dan perguruan tinggi, tingkat keragaman profesi mulai dari buruh, PND, pegawai BUMN, ABRI sampai wiraswatawan, pada isteri bekerja dan tidak bekerja.

KDRT tidak hanya memiliki dampak secara fisik dan psikis bagi korban KDRT, melainkan memiliki dampak pada anak seperti depresi dalam menghadapi problem yang dihadapi orangtuanya, dan anak “bingung” terhadap pola apa yang menjadi acuan baginya untuk bertingkah laku jika pola hubungan yang ada dalam keluarganya adalah pola hubungan yang identik kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

KDRT harus dihilangkan dalam kehidupan masyarakat, dengan mencari upaya-upaya untuk mengatasi KDRT terhadap perempuan tersebut:

1. Mitos-mitos seperti “ingin masuk surga” dengan jalan mengabdikan pada suami tidaklah salah, namun “mengabdikan pada suami karena ingin masuk surga” dipandang secara buta

dan tidak di tafsirkan “Selagi suami masih dalam kebaikan” hendaklah di hilangkan. Begitu juga mitos KDRT adalah masalah internal dalam keluarga sehingga diabaikan penyelesaiannya ke ranah publik. Mitos KDRT hanya terjadi pada keluarga dengan tingkat status sosial ekonomi rendah saja. Mitos KDRT hanya terjadi pada suami kasar. Semua itu harus diluruskan persepsinya.

2. Melakukan sosialisasi “pengarusutamaan gender” yang berkelanjutan dan membangun kerja sama dengan instansi yang terkait.
3. Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam konteks kerumah-tangga.
4. Membentuk lembaga tempat konsultasi dan pelaporan kasus KDRT ini, dan memberikan pendampingan pada masyarakat akan proses pelaporan KDRT.

Hal yang terpenting adalah adanya payung hukum dalam penyelesaian masalah KDRT ini.

Berikut ini, contoh kasus lain tentang pelecehan seksual terhadap perempuan melalui plesetan simbol atau teks. Pedagang keliling Yakult dapat julukan “*Cintailah Ususmu*” diplesetkan menjadi “*Cintailah Susumu*”. *Yakult lady* adalah proses pengiriman minuman Yakult (minuman kesehatan) melalui seorang perempuan dewasa yang telah menikah kepada pelanggan dan masyarakat umum, pelanggan di sini adalah keluarga, pedagang di pasar, pedagang toko dan lain-lain. *Yakult lady* dalam melakukan penjualan dan pengiriman minuman prebiotik ini menggunakan sepeda serta memakai pakaian seragam yang unik. Dalam hal ini ada suatu ketertarikan penulis melihat fenomena *Yakult lady*, tidak hanya kekhasan mereka dengan sepeda dan pakaian seragamnya namun mencoba melihat dari sisi kajian gender.

Penjual Yakult di lapangan didominasi oleh perempuan

dengan asumsi untuk menarik penjual dan pelanggan harus dilakukan dengan ramah, senyum, lemah lembut, ramah serta senyum yang manis, sebagaimana stereotipe masyarakat yang diberikan kepada perempuan, namun jika kita bertanya apa senyum yang manis, lembut, serta ramah hanya dimiliki oleh kaum perempuan, dan dalam realitanya banyak kaum lelaki yang ramah, lembut, dan memiliki senyum yang manis. Maka sebaiknya pekerjaan ini tidak perlu didominasi oleh perempuan, hendaknya laki-laki juga memiliki kesempatan yang luas sebagai penjual keliling daripada *Yakult lady*. Jadi dapat dikatakan bahwa pemilihan penjual Yakult keliling tak lepas dari stereotipe masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk lembut, ramah dan murah senyum. *Cintailah ususmu* diplesetkan *cintailah susumu*, hal tersebut bentuk ejekan yang diberikan kepada *Yakult lady*, bahkan mereka dicolek yang merupakan bentuk pelecehan seksual terhadap *Yakult lady*.

Anggapan bahwa perempuan secara alami memiliki sifat rajin, teliti, lemah lembut, pemelihara dan penyayang menyebabkan mereka dianggap paling cocok untuk bekerja mengurus rumah tangga (pekerjaan domestik). Akibat semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya (faqih, 1997:24) maka beban pekerjaan perempuan menjadi lebih berat. Pada pekerja perempuan ada kecenderungan beban kerja perempuan menjadi berlipat ganda; di samping harus membereskan urusan rumahtangga, mereka juga harus bekerja di luar rumah untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Situasi keluarga di mana ibu bekerja menurut data dari *International Institute of Population Science*, di Indonesia terdapat lebih dari 40% perempuan menjalankan fungsi ganda, yaitu membesarkan anak sambil bekerja (www.sinarharapan.co.id). Para ibu yang bekerja tidak hanya melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan dunia pekerjaannya sebagai pedagang keliling melainkan semua aktivitas dan kegiatan kerumahtanggaan semuanya dilakoninya tanpa mempedulikan rasa letih dan lelah

setelah mengerjakan tugas publiknya. Mereka dituntut untuk tetap berpartisipasi penuh dalam ekonomi rumah tangga dan pekerjaan rumah tangganya

Dalam sistem masyarakat yang masih memiliki budaya patriarkhi, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin tampak jelas diasumsikan bahwa: suami berkewajiban bekerja di sektor publik atau pencari nafkah utama sedangkan istri lebih diidentikkan dengan kewajiban bekerja di sektor domestik yaitu rumah tangga. Meskipun dalam perkembangan zaman sekarang di mana perempuan sudah banyak memasuki sektor publik dalam artian mampu menambah pendapatan keluarga, akan tetapi pekerjaan domestik masih mendominasi dilakukan oleh perempuan tersebut. Alasan yang dikemukakan, kenapa mereka tidak berbagi pekerjaan domestik dengan suami, tidak pantas pekerjaan rumah tangga diberikan kepada suami, aib jika pekerjaan mencuci, memasak dan mensterika diberikan kepada suami mereka. Ditambah dengan ada suatu ketidak yakinan pada suami bahwa pekerjaan domestik akan di kerjakan dengan baik dan rapi, alhasil dengan asumsi demikian aktivitas *lady yakult* sudah di mulai subuh hari dengan segala tetek bengek pekerjaan domestik, menyiapkan sarapan, mencuci baju, mencuci piring, menyapu rumah dan persiapan barang dagangan untuk berkeliling dengan sepeda sebagai *yakult lady*, sepulang dari berdagang keliling, sore dan malam, mereka harus menyiapkan makan malam, memperhatikan PR anak dan mensterika baju pada malam hari. Alangkah lelahlah mereka, itulah beban ganda perempuan, yang kadang-kadang perempuan tidak mau mengelakkan dengan alasan “tidak pantas” stereotipe yang ada dalam masyarakat bahwa apa pun kondisinya pekerjaan domestik adalah pekerjaan perempuan tanpa harus berbagi.

Contoh permasalahan lain terjadi dalam bidang reproduksi kesehatan perempuan, yang tidak hanya bicara tentang alat kesehatan, obat-obatan, dan diagnosis kesehatan melainkan juga terkait dengan hubungan sosial yang melibatkan jenis kelamin

laki-laki dan perempuan. Hubungan itu dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dibentuk oleh lingkungannya dan dilestarikan oleh pihak tertentu dalam kerangka kepentingannya. Kepentingan-kepentingan inilah yang akhirnya menyebabkan ketimpangan-ketimpangan.

Beberapa kasus kesehatan gender dan kesehatan terungkap dalam observasi dan wawancara penulis di lapangan, di antaranya:

Kasus seorang ibu yang sedang mengalami menstruasi:

“Aku sebenarnya tidak mau berhubungan, aku itu lagi haid, tapi suami gak ngerti, tetap saja minta berhubungan, aku itu bingung, bagaimana mengatakannya, suamiku marah jika aku menolak.”

Kasus perempuan yang bekerja sebagai pedagang keliling:

“Aku seharian dagang keliling, sampai di rumah, aku harus masak untuk persiapan makan malam serta cuci piring. Aku lelah. Malamnya aku sebenarnya mau tidur dengan tenang, tapi mau gimana lagi, aku harus memenuhi keinginan suami untuk berhubungan, kalau gak mau, dia menjadi garang terhadapku.”

Kasus seorang perempuan dan dokter di kamar pemeriksaan:

“Aku itu malu dan nggak mau buka dadaku apalagi baju, tapi kayaknya dokter agak marah, katanya mau diobati atau nggak, akhirnya ... ya uwes, dibuka aja, walau malu.”

Beberapa fakta ketimpangan gender dalam bidang kehidupan kesehatan, sebagai berikut:

1. Adanya dominasi yang berlapis, yaitu hampir selalu dicitrakan dokter adalah laki-laki dan perawat dicitrakan kepada perempuan, yang akhirnya memengaruhi perempuan harus ditempatkan di posisi tertentu.
2. Dalam proses pemeriksaan dan pengobatan di rumah sakit, pasien perempuan tidak mendapat kesempatan untuk bernegosiasi untuk tidak melepaskan pakaiannya.
3. Lemahnya posisi negosiasi (*bergaining position*) perempuan dalam berhubungan seks sehingga menimbulkan kekerasan seksual bagi perempuan. Contoh, sulitnya menolak

berhubungan seks dalam keadaan lelah dan mentruasi karena adanya interpretasi dalam masyarakat, bagaimana tidak pantas menolak berhubungan seks dengan suami ketika suami membutuhkannya sekalipun dalam keadaan tidak nyaman.

4. Maraknya kasus perkosaan terhadap perempuan dan tindakan pelecehan terhadap perempuan, sebagaimana diberitakan media massa yang berdampak pada perempuan menderita secara fisik, menderita secara psikologis dan sosial.
5. Pemakaian alat kontrasepsi kesehatan, dalam keputusannya lebih didominasi oleh laki laki, dan pemakaian alat kontrasepsi lebih di bebankan kepada perempuan seperti suntik KB, IUD, Spiral dan pil KB yang memiliki efek samping terhadap perempuan tersebut.
6. Perempuan menjadi korban HIV akibat perselingkuhan suaminya (lihat Gambar 28).



Gambar 28. Perempuan Korban HIV

Sumber: m.tribunnews.com

Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan perempuan dan reproduksi seks mengalami suatu ketimpangan yang membuat rasa tidak aman dan problem bagi perempuan. Ini semua merupakan refleksi dari struktur sosial yang timp-

ng yang menempatkan perempuan sebagai sub ordinat. Oleh karena itu penting dalam kebijakan yang mencakup persoalan reproduksi perempuan memperhitungkan kultur dan struktur hubungan yang ada di dalam masyarakat.

Mengingat budaya patriarki di Indonesia sangatlah kuat pengaruhnya, maka pria yang melakukan budaya semacam ini akan berpengaruh secara mutlak di keluarga. Pria lah yang berhak mengambil keputusan ketika ada masalah dan pria jugalah yang menentukan iya atau tidaknya sesuatu yang dilakukan oleh keluarganya itu boleh dilakukan atau tidak. Hal ini jugalah yang menghambat kaum perempuan untuk berkembang karena mereka akan merasa menjadi orang yang tidak berguna karena bisanya hanya tinggal di rumah dan mengurus urusan rumah tangga saja. Tentu saja hal ini membuat sekelompok perempuan yang merasa dirinya ingin dihargai menjadi memberontak dan kontra dengan yang namanya patriarki.

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Kebanyakan sistem patriarki juga adalah patrilineal. Patriarki adalah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi referensi feministas. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual.

Pada dasarnya budaya patriarki sangatlah sulit diperdebatkan karena sangat tertanam dan sifatnya sudah turun tem-

urun. Ide bahwa tugas pria untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, di mana menjadi pemimpin yang harus mengurus semua dan mengambil keputusan sangatlah tertanam dan diakui serta disahkan sehingga “*style/sistem partnership*” dalam rumah tangga sangatlah tidak diakui di sini. Hal ini mengakibatkan, apa pun pendapat/input dari pihak perempuan, tidak didengar maupun dihargai.

Dampak lain dari budaya patriarki di Indonesia adalah jika sang suami bukanlah orang yang bisa diandalkan dan maunya menang sendiri, pria semacam ini akan menyengsarakan keluarganya dan mereka tidak akan bisa membuat keluarganya bahagia. Karena itu, sistem patriarki hanya bisa dilakukan secara sempurna oleh pria yang baik dan bertanggung jawab dan bukan pria yang *ecek-ecek* yang bisanya hanya santai-santai dan bermain kesana kemari yang tidak tentu arahnya ke mana. Ini mungkin penyebab utama munculnya gerakan anti patriarki. Namun memang pada dasarnya patriarki ini juga akan bisa membantu banyak pada kubu istri di mana mereka tidak perlu bersusah payah untuk mencari uang karena mereka telah memberikan tanggung jawab untuk mencari uang kepada sang suami.

Dalam masyarakat feodal yang termanifestasikan ke dalam bentuk pemerintahan monarkhi, di mana sebagian besar status kebangsawanan diwariskan secara tradisional lewat garis keturunan laki laki. Bahkan yang mempunyai hak untuk mewarisi kekuasaan sebagai raja adalah anak laki-laki pertama dari istri permaisuri. Untuk menunjukkan kekuasaan serta status raja, maka seorang raja dibenarkan untuk memiliki sejumlah istri yang berstatus sebagai istri pendamping yang sering disebut “selir”. Semakin banyak selir cantik yang dimiliki semakin tinggi status raja. Apalagi bila selir-selir tersebut merupakan “hadiah” dari kerajaan yang ditaklukkan (Herwanto, *Diskriminasi Gender dan Hegemoni Patriarki*, [http:// herwanto-a-d-fisip.web. unair. ac.id /artikel_detail-68475-Umum-Diskriminasi%20Gender%20dan%20Hegemoni%20Patriarkhi.html](http://herwanto-a-d-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-68475-Umum-Diskriminasi%20Gender%20dan%20Hegemoni%20Patriarkhi.html)).

Demikian juga dalam masyarakat yang menggunakan budaya patriarki, seseorang yang diklasifikasikan kaya apabila secara ekonomi jauh di atas rata-rata warga masyarakat. Untuk memanifestasikan kekayaannya mereka ini memiliki sejumlah istri. Oleh karena itu, semakin banyak wanita yang bisa diperistri maka semakin tinggi status seseorang tersebut, karena itu sejumlah istri tersebut sebagai status simbol orang yang kaya.

Dapat juga dicermati adanya kebiasaan atau adat menetap pasangan perkawinan di pihak laki-laki atau di rumah mertua perempuan dan atau di rumah pihak laki-laki mencerminkan adanya konsekuensi terkabulnya peminangan yang sekaligus sebagai kewajiban dan hak laki-laki untuk membawa istri ke rumahnya. Adat menetap di rumah pihak laki-laki demikian ini tidak lebih dari pencerminan tingginya status laki-laki karena diikuti perempuan (istri) dan bukannya laki-laki (suami) yang ikut istri (patrilineal). Oleh karena itu, adat menetap setelah perkawinan berlangsung berada di rumah pihak laki-laki tersebut merupakan tingginya harga diri laki-laki. Artinya apabila laki-laki (suami) tinggal menetap di rumah pihak perempuan (istri), berarti merendahkan harga diri laki-laki.

Namun ada efek positifnya pula budaya patriarki di Indonesia bagi sekelompok orang. Budaya ini akan membuat pria sadar bahwa dirinya harus bertanggung jawab penuh untuk mengayomi keluarganya sehingga dia pastinya tidak ingin ada keluarganya yang menderita. Ini juga menunjukkan bahwa seorang pria itu harus mapan dan juga mampu menjadi tulang punggung keluarganya ketika membutuhkan sesuatu. Hal ini lah yang membuat sistem patriarki masih diakui oleh banyak orang dan dilakukan sampai sekarang. Pihak istri yang mengaku setuju dengan sistem patriarki juga mengaku setuju dengan hal ini asalkan suaminya memang benar-benar mapan dan bisa diandalkan dalam melakukan sehari-hari dengan baik dan benar. Selain itu juga sang istri bisa lebih fokus untuk mendidik anak di rumah. Efek positif lain dari budaya ini adalah pihak perempuan bisa

meluangkan waktunya lebih banyak untuk anaknya yang mungkin membutuhkan kasih sayang lebih dari orangtuanya. Alhasil pihak perempuan bisa mendidik anaknya dengan baik dan si anak akan menjadi anak yang penurut pada orangtuanya. Memiliki anak yang berbakti merupakan hal yang akan dimiliki oleh keluarga yang menggunakan sistem ini, begitulah opini beberapa orang yang mengalami pengalaman seperti ini.

Bagaimanapun juga, budaya patriarki adalah budaya yang tidak hanya ada di Indonesia namun juga ada di seluruh dunia. Bahkan budaya ini telah ada sejak tahun 1550an dan pada masa itu kaum perempuan hanya diperbolehkan tinggal di dalam rumah saja. Untungnya dengan perkembangan zaman sekarang, baik perempuan maupun laki laki mempunyai pilihan apakah masih mau meneruskan budaya patriarki ini atau tidak. Yang pasti, kedua belah pihak tidak boleh merasa dirugikan (Pro dan Kontra Budaya Patriarki Di Indonesia, <http://missdk.blogdetik.com/2012/11/07/pro-dan-kontra-budaya-patriarki-di-indonesia/>, 2012).

C. FAKTOR POLITIK

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor hal itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah pandangan stereotipe bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan sebagai milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur atau domestik. Tidak bisa berpikir rasional dan kurang berani mengambil risiko, yang kesemuanya itu sudah menjadi stereotipe perempuan. Akibatnya baik perempuan maupun laki-laki dan masyarakat secara umum sudah menarik kutub yang berbeda, dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan.

Politik dan perilaku politik di pandang sebagai aktivitas maskulin. Perilaku politik disini mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Karena itu, masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan. Dengan ungkapan lain, perempuan dengan karakter seperti itu bukan tipe perempuan ideal (Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, 2005).

Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan dan kekuasaan. Saat berada dalam posisi sebagai pemimpin perempuan mengalami lebih banyak hambatan ketimbang laki-laki. Mengapa? Karena perempuan harus selalu membuktikan bahwa dirinya memang pantas dan bisa diandalkan. Ada tiga unsur yang merajut kepemimpinan dalam diri seseorang, yaitu kekuasaan, kompetensi diri, dan agresi kreatif. Kekuasaan, sebagai unsur paling penting dalam membangun kemampuan memimpin seseorang, selalu didefinisikan sebagai kekuatan atau ketegaran atau kemampuan bertindak yang diperlukan guna mencapai sesuatu demi tujuan yang lebih besar. Pada hakikatnya, kekuasaan bersifat netral, bisa digunakan untuk kebaikan dan sekaligus juga untuk kejahatan.

Persoalannya, mengapa perempuan sulit sekali menggapai kekuasaan? Jawabannya sangat sederhana. Stereotip perempuan tradisional tidak mengenal kekuasaan. Kefemininan juga tidak memuat ketegaran, keperkasaan, atau ketegasan yang merupakan unsur inti kekuasaan. Stereotip klasik mengenai perempuan dan kefemininan tidak mencantumkan gagasan kekuasaan, dan meskipun kondisi telah berubah, stereotip tersebut sulit dihilangkan.

Perempuan jika ingin berkuasa mereka harus maskulin dan mengeliminir sikap dan aspek kefemininan dalam dirinya, seperti lemah lembut, untuk bisa disebut kuat, tegas dan berpengaruh. Kondisi seperti ini menjadi isu gerakan feminisme pada era

1970-an. Kaum perempuan lalu berupaya menganut kekuasaan model laki-laki dengan menyingkirkan ciri feminin karena dianggap kurang pantas.

Persoalannya, norma budaya masih tetap mengklasifikasikan aktivitas politik sebagai monopoli kaum laki-laki. Perempuan, ironisnya, juga melanggengkan gagasan bahwa kekuasaan adalah tidak feminin. Bahkan, banyak perempuan yang terbiasa menolak kekuasaan menjadi bagian atau gambaran diri mereka.

Fatalnya lagi, laki-laki mendominasi kebudayaan dan menganggap perempuan kurang berdaya. Dominasi laki-laki terhadap perempuan merupakan perwujudan dari perebutan kekuasaan melawan ibu mereka, yang berakar dari pembagian kerja yang muncul sejak awal sejarah manusia. Laki-laki ditetapkan sebagai pemburu, sedangkan perempuan sebagai pengasuh anak. Dalam perkembangan selanjutnya, laki-laki menjadi makhluk yang lebih mengutamakan nalar, sedangkan perempuan lebih mengandalkan emosi atau perasaan.

Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang acap kali dijadikan slogan oleh partai politik menjelang pemilu. Slogan itu dimaksudkan sebagai kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik tersebut. Itu hanya menjadi sebatas slogan, karena pada saat pemilu berakhir parpol lupa dengan janjinya. Kepentingan perempuan, yang saat kampanye berlangsung dijanjikan akan dijadikan sebagai agenda politik atau *platform*, tidak pernah direalisasikan. Bahkan jauh sebelum itu, ketika proses penjaringan calon anggota legislatif dilakukan, perempuan tidak pernah diajak. Kalaupun diajak, mereka kemudian “diganjal” atau namanya ditempatkan pada urutan bawah, nomor “tidak jadi”, yang dikenal dengan nomor sepatu. Akibatnya, jumlah perempuan di lembaga legislatif atau DPR, baik tingkat pusat maupun daerah, terus menurun.

Sebagai contoh dan gambaran, pada periode 1992-1997, jumlah perempuan menjadi anggota DPR sebanyak 63 orang atau sekitar 12,5 persen. Namun, pada 1997-1999 turun menjadi

57 orang atau 11,5 persen. Saat reformasi, ketika demokrasi mulai diwujudkan yaitu periode 1999-2004, angka tersebut malah turun menjadi 45 orang atau hanya 9 persen (Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, 2005).

Berbagai alasan dikemukakan oleh para pemimpin partai perihal penurunan keterwakilan perempuan di DPR. Pertama, partai politik kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan. Persoalan tidak hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas calon. Alasan ini kadang perlu kiranya dicurigai, karena minimnya kader perempuan terkait dengan sistem pengkaderan partai yang memang tidak memberi tempat, perhatian, serta peluang pada perempuan. Kedua, parpol mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, apalagi mengajaknya terlibat dalam politik praktis. Pemimpin parpol beralasan, banyak perempuan yang masih alergi dengan politik, karena mereka belum sadar politik. Tentu saja alasan terakhir ini tidak secara gampang bisa dipercayai. Sebaliknya, perlu ada kecurigaan, jangan-jangan kesadaran politik pada perempuan tidak pernah muncul karena wilayah politik selama ini diklaim sebagai milik laki-laki. Rendahnya kesadarn politik, dengan demikian, bukan hanya kesalahan perempuan, tetapi kesalahan bersama, terutama kesalahan dalam mendefinisikan kata politik.

Naiknya para politikus perempuan di Asia misalnya, melalui perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Serangkaian permasalahan mengawali naiknya para politikus perempuan, seperti Cory Aquino di Filipina, Benazir Bhuto di Pakistan, Megawati di Indonesia, Gloria Arroyo-Macapagal di Filipina, atau Sirimavo Bandaranaike di Sri Lanka. Megawati, misalnya, untuk dapat mencapai posisi politik tertinggi di partai harus menelan pil pahit akibat tragedi berdarah 27 Juli 1996.

Menarik untuk dicermati, nama-nama politikus perempuan Asia tersebut memiliki hubungan geneologis atau perkawinan dengan politikus laki-laki. Megawati, Benazir Bhuto, dan Gloria Arroyo misalnya, adalah anak kandung mantan presiden,

orang terkuat di negeri masing-masing. Sementara Cory Aquino dan Sirimavo Bandaranaike adalah istri mantan oposan di negerinya. Naiknya perempuan ke tampuk kekuasaan politik dan kemampuan mempertahankannya hampir-hampir tidak dapat dilepaskan dari figur laki-laki, baik ayah atau suami. Artinya, figur laki-laki merupakan faktor penting untuk menggugah emosi dan memperkuat basis dukungan massa. Seberapa banyak dukungan massa yang diperoleh oleh politikus perempuan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga siapa yang berada di balik perempuan tersebut. Contohnya, setiap kali Megawati melakukan kampanye politik, gambar atau patung Bung Karno selalu menyertainya sebagai alat untuk menggugah emosi massa. Kerinduan akan figur Bung Karno sebagai politikus andal dilampiaskan pada Megawati. Diharapkan kehadiran Megawati di pucuk pimpinan politik dapat mengobati kerinduan terhadap politikus laki-laki. Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa politik adalah dunia laki-laki, tertutup bagi perempuan. Oleh karena itu, perempuan selalu disubordinir dan terkesan berada di bawah bayangan laki-laki setiap waktu.

D. FAKTOR INTERPRETASI YANG BIAS TERHADAP TEKS-TEKS AGAMA

Manusia sejak lahir sudah dibuatkan identitas oleh orangtuanya. Melalui proses belajar, manusia membedakan jenis laki-laki dan perempuan. Tidak hanya aspek biologisnya saja, tetapi juga dikaitkan dengan fungsi dasarnya dan kesesuaian pekerjaannya. Dalam kehidupan berbudaya, manusia menciptakan berbagai aturan main untuk mengatur hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Agama merupakan salah satu wujud dari kebudayaan manusia. Seperti hasil budaya yang lain, agama dikembangkan berdasarkan pola berpikir yang sudah ada dalam masyarakat. Ideologi gender juga mewarnai munculnya agama-agama dan perkembangannya.

Shahin Irvani dalam tulisannya menyebutkan Islam selalu

mempunyai definisi sendiri tentang hak-hak perempuan, juga sebuah definisi yang jelas mengenai posisi perempuan. Meskipun memiliki perbedaan biologis tetapi mempunyai kedudukan yang sama secara etis-moral. Menurut Al-Quran, alasan kesetaraan dan keserupaan kedua jenis kelamin adalah bahwa keduanya diciptakan untuk hidup bersama dalam kerangka saling mencintai dan mengakui satu sama lain. Dalam Al-Quran laki-laki dan perempuan justru bersumber dari diri yang sama, pada saat yang bersamaan dan dengan cara yang sama, artinya keduanya adalah setara dan berasal dari sumber yang sama (Hendra Prijatna, Study Gender (Modul Untuk Lingkungan Sendiri), Universitas Bale Bandung, 2012).

Laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas agensi, pilihan dan individualitas moral yang sama, yaitu:

1. Al-Quran menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dan menetapkan standar penilaian yang sama bagi keduanya, artinya Al-Quran tidak mengaitkan agensi (wakil) moral dengan jenis kelamin tertentu.
2. Al-Quran menyebut laki-laki dan perempuan sebagai penuntun dan pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain.

Prinsip-prinsip kesetaraan (dalam buku *Perempuan dalam Pasungan*):

1. (Adam dan Hawa) sama-sama menjadi hamba dan khalifah di bumi, termaktub dalam Al-Quran surat Az-Zariyat (51): 56, Al-Hujarat (49): 13, An-Nahl (16): 97, Al-An'am (7): 165, Al-Baqarah (2): 30.
2. (Adam dan Hawa) sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis.
 - a. Keduanya diciptakan disurga dan memanfaatkan surga. (Al-Baqarah (2): 35).

- b. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (al-A'raf (7): 20).
 - c. Keduanya makan buah kuldi dan sama-sama menerima akibat jatuh dibumi (al-A'raf (7): 22).
 - d. Keduanya mohon ampun dan sama-sama diampuni (al-A'raf (7): 23).
3. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial, berikrar akan keberadaan Tuhan (al-A'raf (7): 172).
 4. Sama-sama berpotensi meraih prestasi, (Ali-Imran (3): 195, an-Nissa (4): 124, al-An'am (6): 97, al-Mukmin (40): 40).

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai *rahmatan lil'alamin* (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Tuhan adalah prestasi adalah kualitas takwanya, tanpa membedakan ras, etnik, dan jenis kelamin (QS. al-Hujurat, 13) (Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, 2005).

Al-Qur'an tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic*, yang mengistimewakan suku tertentu. Setiap orang, tanpa dibedakan jenis kelamin dan suku bangsanya, memiliki potensi yang sama untuk menjadi 'abid dan khalifah (QS. Al-Nisa', 124 dan al-Nahl, 97) (Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, 46).

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan tidak berhak bersuara, berkarya dan berharta. Bahkan dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Islam secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Berhak menyuarakan keyakinan, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Ini merupakan gerakan emansipatif yang tiada tara di

masanya, saat saudara-saudara perempuan mereka di belahan bumi Barat terpuruk dalam kegelapan:

Kaum perempuan di masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Bahkan, dalam Al-Qur'an, figur ideal seorang Muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik, *al-istiqlal al-siyasah* (QS. al-Mumtahanah, 12), seperti figur Ratu Bulqis yang memimpin kerajaan superpower (*'arsyun 'azhim*) (QS. al-Naml, 23); memiliki kemandirian ekonomi, *al-istiqlal al-iqtishadi* (QS. al-Nahl, 97), seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (QS. al-Qashash, 23); bagi perempuan yang sudah menikah, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi, *al-istiqlal al-syakhshi* yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami (QS. al-Tahrim, 11) atau menentang pendapat orang banyak (*public opinion*) bagi perempuan yang belum menikah (QS. al-Tahrim, 12). Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan "oposisi" terhadap segala bentuk sistem yang bersifat tirani demi tegaknya kebenaran (QS. al-Taubah, 71).

Islam memberikan kebebasan yang begitu besar kepada perempuan, sehingga tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan yang memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang dimiliki kaum laki-laki. Dalam jaminan Al-Qur'an, perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya.

Gambaran itu berbeda jauh dengan realitas masa kini. Di berbagai dunia muslim, tidak banyak perempuan yang dapat berkiprah di dunia publik, terutama di bidang politik. Kondisi yang demikian tampaknya lebih disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, masa kenabian yang berlangsung sangat singkat, yakni hanya selama kurang lebih 22 tahun. Meskipun Nabi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan *gender equality*, kultur masyarakat belum kondusif untuk menerima kenyata-

an itu. Masa Nabi terlalu singkat untuk melanggengkan relasi perempuan dan laki-laki yang adil dan setara di masyarakat. *Kedua*, dunia Islam mengalami proses enkulturasi dengan mengadopsi kultur-kultur *androsentris*. Masa pasca Nabi, wilayah Islam meluas ke bekas-bekas wilayah jajahan Persia dan Romawi, membentang dari Spanyol di barat sampai ke anak benua India di timur. Kultur yang berlaku di sepanjang wilayah tersebut masih kuat dipengaruhi oleh kultur patriarki yang memperlakukan perempuan sebagai *the second sex*. Para ulama yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut sulit melepaskan diri dari tradisi dan kebudayaan lokalnya dalam menafsirkan teks-teks ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan.

Akibatnya, kedudukan perempuan pasca Nabi bukannya membaik, melainkan menjauh dari kondisi ideal. Sepeninggal Nabi, perempuan mukimin kembali mengalami keterpisahan dari ruang publik. Buktinya, pada masa khalifah Umar ibn al-Khattab, kaum perempuan tidak dianjurkan mengikuti shalat jamaah di masjid sebagaimana yang berlaku pada masa Nabi. Hal itu mengindikasikan bahwa umat Islam pasca Nabi tak sepenuhnya berhasil menepis bias-bias patriarkisme yang sudah terlanjur kuat mengakar dalam masyarakat Arab pra-Islam, dan di wilayah-wilayah tempat Islam tersiar. Lebih parah lagi karena Islam dipahami sebagai salah satu variabel utama pembentukan kesadaran sosial dan determinan atas berbagai tradisi yang ada dalam masyarakat. Tidak heran jika inferioritas perempuan itu kemudian diyakini sebagai hasil suatu kesadaran keberagaman masyarakat tempat perempuan berada.

Selain Islam, dalam tradisi Hindu tidak mengakui bahwa kehidupan religius hanya bersumber pada kitab suci saja. Ada pula ajaran-ajaran yang diperoleh dari tradisi lisan dan praktik ritus. Dalam ajaran ini, perempuan dikaitkan dengan status sosial. Perempuan dilihat sebagai pemberi keberuntungan karena mereka haid, menjadi istri, dan melahirkan anak. Perempuan ideal "sati", yaitu perempuan yang menikah dan berkorban un-

tuk menyelamatkan suami. Dengan demikian, perempuan tidak pernah mandiri, karena sebagai perempuan ideal mereka dibebani tugas yang sangat berat. Ini menghalangi hak-hak perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya.

Dalam agama Buddha lain lagi, perempuan dianggap kotor, dituduh sebagai penggoda laki-laki yang ingin menjadi suci. Sekularisasi dalam Buddha, telah mengubah aturan beragama, tidak hanya dalam prinsipnya tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan tidak boleh:

1. Brahma/dewa pencipta/dewa tertinggi.
2. Dewa pelindung kaum Buddha.
3. Mara/setan penghancur kehidupan dan kemauan manusia.
4. Raja dari empat penjuru (utara, barat, selatan, timur).

Contoh lain dapat dipelajari dari agama Yahudi, yang tradisinya kemudian diteruskan oleh agama Kristen dan Katolik. Dalam Perikopa, "manusia jatuh ke dalam dosa", status perempuan dijadikan subjek penyebab dosa. Sehingga perempuan dihukum dengan kesakitan saat melahirkan. Kitab Kejadian ini, kemudian diikuti oleh kitab-kitab yang lain, seperti Amsal 31: 10-31 yang memuat ajaran bagaimana istri yang sempurna. Kitab Imamat 15: 19-24 mengatur bagaimana perempuan berperilaku selama menstruasi yang dianggap sebagai masa kotor dan najis. Beberapa perikopa dalam kitab suci, ditafsirkan oleh Bapa Gereja dengan sangat memojokkan perempuan. Misalnya perempuan tidak diberi hak berbicara pada saat pertemuan jemaat.

Tentunya masih banyak contoh dari berbagai sudut pandang agama tentang bagaimana budaya patriarki yang dikonstruksi oleh manusia itu sendiri. Perlahan-lahan ditemplei label agama, sehingga peminggiran peran-peran perempuan seolah menjadi sah, kodrat Ilahi, dan tidak pantas diberontaki karena dosa. Begitu banyak ayat yang ditafsirkan dalam bahasa laki-laki dan cerminan dari konstruksi sosial masyarakatnya. Yang kemudian kondisi itu terkadang membuat kaum perempuan sendiri

menjadi tidak kritis dan pasrah.

Pada hal dasarnya perempuan juga mempunyai hak-hak untuk megaktualisasikan diri mereka. Hal seperti ini juga sudah dipaparkan dari berbagai sisi agama. Namun sayangnya, banyak laki-laki dan perempuan yang masih belum menyadari akan hal ini. Sehingga budaya patriarki seolah-olah adalah harga mati untuk meminggirkan peran wanita. Berikut ini adalah beberapa hak-hak perempuan yang telah dipaparkan dari berbagai segi agama.

Dalam agama Islam kedudukan wanita bisa dikatakan lebih tinggi karena memiliki rahim. Wanita lebih banyak keunggulannya, seperti yang dikatakan Al-Qur'an dalam ayat berikut:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan (Tali-rahim).

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa pria dan wanita dalam Islam setara secara intrinsik dalam peristiwa penciptaan, dan secara ekstrinsik dalam hubungan mereka satu sama lain maupun kewajiban-kewajiban mereka terhadap Tuhan. Al-Qur'an seakan lebih meninggikan perempuan karena ia menyebutkan rahim di akhir ayat ini, tentu sebagai penghormatan atas peran mereka sebagai ibu. Dalam Islam juga telah diajarkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan-Nya.

Dalam agama Hindu juga telah disebutkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain Dewi Saraswati, Hindu juga memuja simbol-simbol Tuhan dalam wujud perempuan, seperti Dewi Lakshmi, Parwati, dan Savitri. Dalam pengertian ini teologi Hindu memandang bahwa perwujudan perempuan sebagai suatu eksistensi yang suci muncul dari pengertian Shakti. Shakti dimaknai dalam metafisika Hindu sebagai unsur atau aspek feminin dari Brahman atau Tuhan. Shakti atau kekuatan

feminin dari Tuhan merupakan faktor penting dalam harmonisasi alam semesta. Dari pengertian ini, sesungguhnya Veda memandang perempuan sebagai sosok yang vital, sebagai pengampu pengetahuan, dan subjek yang patut untuk dihormati.

Dalam agama Buddha, sempat pernah ada pernyataan bahwa perempuan tidak boleh menjadi Buddha. Itu artinya mereka tidak dapat diselamatkan. Ajaran ini sangat bertentangan dengan ajaran Buddha sejati, bahwa semua manusia dapat mencapai Buddha (Nunuk Murniarti, 2004: 8). Bahkan dalam Buddha juga memperbolehkan seorang perempuan untuk menjadi seorang bhiksuni.

Dalam agama Katolik, mengangkat Maria, yakni ibunda Yesus sebagai simbol perempuan dan memasukkan dalam tradisi Katolik. Dalam sudut pandang kitab suci, dimunculkan tafsir dari pilihan perikop tertentu, yang menunjukkan bahwa Bunda Maria berperan aktif dalam pewartaan kasih. Dalam agama Kristen, sekurangnya dua kali dalam tamsil-tamsil Yesus, digunakan figur seorang perempuan yang patut diteladani iman dan kesungguhan hatinya, yaitu perempuan yang gigih membela perkaranya terhadap seorang hakim yang tidak adil (Lukas 18: 2-8) dan perempuan yang mencari mata uang yang hilang (Lukas 15: 8-10).

Isa Almasih a.s. tidak pernah mengucapkan kata-kata yang eksplisit atau implisit mendukung pandangan bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dari kaum lelaki. Kaum perempuan selalu dihormati dalam ajaran beliau dan mereka tidak pernah direndahkan dan fakta ini patut diperhatikan serta diikuti oleh para pengkhotbah modern zaman sekarang. Dalam gereja, perempuan kerap dijadikan objek olok-olok, pada hal kelakuan demikian tidak pernah dilakukan oleh Almasih a.s. sendiri.

E. FAKTOR PENDIDIKAN

Pendidikan bagi setiap bangsa merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warganya, tidak terkecuali bagi bangsa Indo-

nesia. Pentingnya pendidikan bagi bangsa ini tercermin dari sejumlah produk perundang-undangan yang telah dibuat, tidak terkecuali pula tercantum dalam UUD 1945, yang menekankan arti penting kecerdasan sebuah bangsa. Bangsa Indonesia menilai bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan masyarakatnya. Bahkan, masalah pendidikan ini pemerintah mengalokasikan secara khusus sebesar 30% dari total APBN. Namun demikian, hasil pembangunan bidang pendidikan yang selama cukup gencar dilakukan pemerintah, nampaknya masih menyimpan sejumlah persoalan menyangkut kesetaraan gender. Secara nyata, kesenjangan di bidang pendidikan ini terlihat dari jumlah perempuan yang buta aksara masih dua-tiga kali lipat dibandingkan laki-laki.

Perempuan juga merupakan jumlah terbesar dari penduduk usia 24 tahun ke atas yang belum pernah sekolah yaitu sebanyak 17,36 persen dibandingkan dengan laki-laki sebesar 7,68 persen. Data BPS tahun 2003 menunjukkan bahwa angka buta huruf perempuan sebanyak 10.643.823, sementara itu untuk laki-laki berjumlah 5.042.338 yang berarti terjadi perbedaan angka sebanyak seratus persen. Tidak hanya dalam skala nasional perbandingan buta huruf antara perempuan dan laki-laki juga mengalami perbedaan di hampir semua wilayah di Indonesia (Eko Bambang Subiyantoro, *Sensitivitas Gender Kebijakan pemerintahan SBY*, [www. Theindonesianinstitute.com](http://www.Theindonesianinstitute.com), 2005).

Tingginya angka buta huruf yang terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki ini jelas menunjukkan bahwa masalah pendidikan masih belum bisa memberi kesetaraan bagi kaum perempuan secara khusus. Masalah buta huruf adalah masalah yang sangat mendasar dalam dunia pendidikan. Bagaimana mungkin seseorang bisa melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi sementara pendidikan yang mendasarnya tidak terpenuhi. Berkaitan dengan tingginya angka buta huruf yang banyak menimpa perempuan maka secara

otomatis kesempatan perempuan untuk menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga akan terhambat.

Ada dua hal yang dapat dijadikan analisis mengapa kesenjangan pendidikan ini terjadi. Pertama, persepsi masyarakat tentang anak perempuan. Di bandingkan dengan anak laki-laki, anak perempuan tidak diuntungkan secara kultur. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah penom-pang ekonomi keluarga, untuk itu pendidikan bagi anak laki-laki merupakan suatu keharusan untuk dicapai, karena dengan semakin tinggi pendidikan anak laki-laki diharapkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya.

Anak laki-laki oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap sebagai sarana mencari nafkah. Sementara itu nilai-nilai yang diberlakukan pada anak perempuan didasarkan pada anggapan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dalam konteks itu maka, masyarakat kurang memberi toleransi kepada anak perempuan untuk mengenyam pendidikan secara lebih tinggi, karena pada akhirnya anak perempuan harus kembali ke rumah menjadi ibu rumah tangga. Kedua, orientasi pendidikan tidak melihat aspek perbedaan gender sebagai variabel utama kebijakan. Kebijakan pendidikan lebih ditujukan kepada masyarakat secara umum tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Orientasi pendidikan semacam itu boleh saja, namun orientasi itu mengesampingkan kaum perempuan yang secara kultur belum cukup baik untuk mengenal sekolah dalam kehidupannya. Dalam konteks ini, maka perempuan yang secara kultur tidak diberi ruang, secara struktur, kebijakan negara tidak dapat mendorong secara khusus anak perempuan untuk melakukan aktivitas sekolah.

Ketiga, akses pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah kurang menjangkau masyarakat yang berada di pedalaman. Dalam situasi yang serba kekurangan dan secara akses juga sulit maka pilihan bagi sejumlah keluarga tertuju pada pilihan untuk membuat anak perempuannya bekerja dibandingkan harus

sekolah yang justru mengeluarkan biaya yang semakin berat di tanggung.

Akibat dari sejumlah kondisi tersebut maka, perempuan pada akhirnya tidak memperoleh haknya untuk mendapat pendidikan. Dengan rendahnya pendidikan dan bahkan tidak adanya dasar pendidikan bagi perempuan maka kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja secara formal juga rendah, karena pekerjaan formal secara umum menekankan pada legitimasi formal pendidikan sebagai prasyarat minimalnya. Akibatnya, pilihan pekerjaan perempuan pada akhirnya jatuh pada pilihan pekerjaan informal dan ter subordinasi dengan konsekuensi upah yang diterima cukup murah dan rentan diskriminasi serta kekerasan sebagai perempuan.

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan yang berakibat rendahnya peluang dan kesempatan perempuan bekerja di sektor formal juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan ke luar negeri. Bekerja diluar negeri adalah pilihan yang paling mungkin dilakukan ditengah rendahnya kesempatan perempuan mendapat pekerjaan di dalam negeri. Mereka sebagian besar bekerja menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang cukup rentan mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Tidak sedikit pula tenaga kerja perempuan yang berasal dari Indonesia harus tewas karena siksaan, perkosaan atau bunuh diri karena tidak tahan menerima perlakuan yang tidak berperikemanusiaan.

Rendahnya pendidikan perempuan ini juga berkonsekuensi pada rendahnya mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik, semakin terasa bagi keluarga miskin. Perempuan dalam keluarga miskin mau tidak mau harus memenuhi kebutuhannya untuk mencari nafkah keluarga. Namun demikian, meskipun perempuan telah bekerja dengan cukup berat, didalam kultur masyarakat kita, perempuan masih belum dianggap sebagai pihak pencari nafkah utama.

Tanggungjawab utama perempuan adalah rumah tangga,

jadi meskipun perempuan terus bekerja, perempuan juga tidak bisa meninggalkan seandainya urusan domestik, seperti mengurus rumah, suami, anak dan sebagainya. Masalah kesenjangan pendidikan yang diterima perempuan ini juga terkait dengan besarnya dana pendidikan yang dikucurkan pemerintah khususnya untuk anggaran pendidikan bagi perempuan. Jika pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 30 persen, namun dalam realisasinya pemerintah kurang terfokus pada upaya peningkatan pendidikan perempuan. Investasi pendidikan bagi perempuan ini seharusnya mendapat perhatian utama, karena masalah ini berpengaruh pada tingkat pendapatan suatu negara. Dengan demikian diperoleh anggaran oleh pemerintah yang responsive gender.

Dari aspek kesehatan, masalah rendahnya tingkat buta huruf dan keterbatasan jenjang pendidikan ibu secara langsung merugikan anak-anak. Jenjang pendidikan yang rendah berakibat pada kualitas perawatan anak yang buruk dan juga angka kematian bayi kurang gizi yang lebih tinggi. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi lahir hidup selama satu tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Di Indonesia sendiri, angka kematian bayi termasuk besar tiap tahunnya. Hal ini bias disebabkan perilaku hidup sehat masyarakat terutama perempuan dan perilaku perawatan bayi masih tergolong rendah (Asnawi, *Kematian Bayi: Antara Takdir dan Kesalahan Pola Asuh*, 2005: 5). Hal ini juga berhubungan dengan tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu, semakin besar kemungkinannya menyesuaikan diri dengan standar kesehatan, misalnya memberikan imunisasi kepada anaknya. Dengan demikian, ketidakadilan gender dalam pendidikan telah menempatkan perempuan dalam situasi yang kurang baik. Perlakuan diskriminatif, kekerasan, subordinasi serta mengalami beban ganda dalam pekerjaan adalah beban berat yang harus ditanggung perempuan.

Contoh kasus kekerasan terhadap perempuan mulai dari

anak-anak misalnya; anak perempuan di jalanan, yang memiliki risiko lebih berat daripada anak laki-laki, hasil penelitian Pusat Studi Wanita Universitas Diponegoro mengungkapkan dari 28 % anak perempuan di jalanan mengalami kekerasan seksual, diperdagangkan, dieksploitasi demi tujuan pornografi, serta kekerasan berbasis gender lainnya. Shalahudin (2004) mengungkapkan beberapa pengertian yang diberikan kepada anak perempuan jalanan, pengertian ini didasarkan sejarah, pola aktivitas, dan pola hubungan sosialnya. *Children on the street* adalah anak yang memiliki kegiatan ekonomi di jalanan, namun mereka masih memiliki hubungan dengan keluarga. Dalam artian walau mereka hidup seharian di jalanan namun mereka masih memiliki hubungan dan tinggal bersama orangtua dan pulang tiap hari, tapi ada juga pulang dalam jangka tertentu saja, atau dalam waktu yang tidak rutin. *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh dan sebagian besar waktunya di jalanan namun tidak memiliki hubungan dengan orangtua atau keluarganya lagi. *Children in the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktu di jalanan dikarenakan memang keluarganya juga hidup di jalanan.

Adapun kegiatan anak perempuan di jalanan dalam keseharian, antara lain, membawa adik perempuan untuk mengemis, mereka mengamen dan mengemis dengan diawasi oleh orangtua dalam jarak agak jauh, mereka melakukan kegiatan sampai larut malam (lihat Gambar 29, anak perempuan mengamen di jalanan). Selain itu mereka itu menjadi joki *Three in One*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang orangtua dari anak perempuan jalanan; “Dia anak saya, saya suruh mengamen, saya tidak menyekolahkan itu urusan saya, lagian sekolah buat apa, sarjana sekarang toh banyak yang menganggur, dengan saya menghimpun anak untuk mengamen dan menjadi peminta, saya sudah memiliki penghasilan” (Wawancara, 14 September 2011).

Ini menggambarkan bagaimana sosok orangtua daripada

anak perempuan di jalanan bahwa anaknya tidak diberi hak untuk memperoleh pendidikan melainkan juga di eksploitasi secara ekonomi, terlihat bahwa si anak di tuntut orangtua untuk bekerja seperti pengemis, pengasong, mengamen dengan jumlah penghasilan yang ditargetkan orang, jika tidak mencukupi mereka akan kena sangsi, dimaki dan dimarahi dan mereka juga tidak mendapat kesempatan dalam pendidikan karena tuntutan kerja yang diberikan kepada mereka.



Gambar 29. Anak perempuan yang mengamen di jalanan/bus

Sumber: Dokumentasi Melsy Aswandi 2013

Melihat kasus ini dapat disimpulkan, suatu keluarga di dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga juga di limpahkan kepada anak. Dan ini juga tak lepas dari suatu pandangan orangtua terhadap nilai seorang anak. Anak di pandang sebagai nilai produksi di dalam keluarga, dalam artian bahwa setiap anak harus memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga.

Pada sisi kehidupan lainnya anak jalanan yang tidak lagi berhubungan dengan keluarga mengalami kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh senior laki-laki anak jalanan kepada anak perempuan yunior di mana si anak perempuan tersebut mempunyai

kewajiban memberikan setoran kepada ketua geng dalam jumlah tertentu dari hasil mengemis, dan mengamen. Jika hal ini tidak dipenuhi, mereka akan disingkirkan dan dimaki. Dalam hal ini terlihat suatu budaya patriarki, kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, ada suatu konstruksi yang terbangun bahwa laki-laki dan senior memiliki kekuasaan yang lebih dari pada junior dan perempuan.

Di bawah ini diberikan contoh kasus kekerasan psikologis pada anak perempuan:

Tita, (bukan nama sebenarnya) adalah anak seorang pengusaha mikrolet, sementara ibunya, seorang ibu aktivis masyarakat/pengurus PKK, namun Tita berada di jalanan bahkan sempat diperkosa oleh pemulung, ada apa sebenarnya?

“Tita, anak yang tidak diharapkan orangtuanya, orangtuanya mengharap anak laki-laki,” ungkap tetangga mereka. Memang ketika menemui orangtua Tita, ada suatu keengganan untuk membicarakan permasalahan anaknya, dan ibu malah mengutarakan *“saya akan memberi uang makan dan uang lainnya, jika saudara mau milihara anak saya”* (17 September 2011).

Ini menggambarkan, bagaimana anak perempuan ditelantarkan dijalanan bukan karena masalah ekonomi keluarga, tapi ada persoalan jenis kelamin yang dimiliki anak, orangtua tidak mengharap anak perempuan. Jadi, anak perempuan ditelantarkan oleh orangtua dijalanan bukan faktor kemiskinan tapi dikarenakan si anak berkelamin jenis perempuan. Anak perempuan lari ke jalanan karena tidak sanggup menghadapi tekanan orangtua yang tidak gembira atas kehadirannya sebagai perempuan di muka bumi ini. Kasus ini memperlihatkan bahwa di dalam masyarakat ada perbedaan akan nilai anak perempuan dan anak laki-laki, anak perempuan dianggap lebih rendah nilai daripada anak laki-laki. Dalam hal ini, pendidikan dalam keluarga menjadi sangat penting.

Selain itu juga didapati bahwa anak perempuan masuk dalam kegiatan jalanan karena tidak betah berada dalam kelu-

arga yang tidak harmonis, lalu mencari kenyamanan di jalanan, yang mereka tidak tahu bahwa hidup di jalanan rentan dengan kekerasan dan ketidaknyamanan. Ketiadaan kasih sayang dan tidak terjalani fungsi afeksi serta adanya konflik dalam keluarga telah menyebabkan anak lari ke jalanan

Contoh potongan kalimat berikut memperlihatkan bagaimana kekerasan fisik terhadap anak perempuan jalanan. Anak perempuan di jalanan ditempatkan untuk mengerjakan pekerjaan domestik kelompok anak jalanan:

“Setiap hari aku disuruh mencuci pakaian, membeli makanan, atau dianggap tidak penting” (*Wawancara, 15 September 2011*)

“Aku benci sekali, aku sering di suruh beli makanan dan rokok, padahal aku capek karena seharian ngamen, jika aku nggak mau, aku dipukul dan ditendang pantat, kan sakit.” (*idem*)

“Setiap kita yang menjadi anggota baru anak jalanan di kolong jembatan ini, harus diplonco oleh senior di sini, katanya supaya patuh pada aturan anak jalanan ala mereka.” (*idem*)

Potongan kalimat di atas sedikitnya mengungkapkan, ada suatu kekerasan fisik yang dilakukan oleh komunitas anak jalanan, yang katanya dalam rangka *plonco anak baru*, yang tujuannya agar anak baru itu tidak “macam-macam” dan tidak mengganggu keamanan komunitas dan mengikuti aturan-aturan yang ada dalam komunitas anak jalanan tersebut.

Dalam hal ini terlihat ada stratifikasi antara senior dan junior, senior memiliki kekuasaan yang lebih luas yang diperlihatkan melalui perploncoan dan juga terlihat anak perempuan di jalanan di dalam komunitasnya sering ditempatkan untuk mengerjakan tugas-tugas domestik seperti mencuci pakaian, membeli makanan dan minuman dan cenderung dituntut untuk mengikuti saja apa yang diputuskan oleh kelompok komunitas yang laki-laki. Mereka kurang memiliki suara terhadap keputusan yang ada dalam komunitas mereka. Jika mereka terlambat di dalam menjalankan keputusan atau perintah yang diberikan, mereka akan mendapat tamparan, pukulan, bahkan tendangan.

Kasus ini memperlihatkan, betapa budaya patriarki menjadi *mainstream* tersendiri dalam kehidupan anak jalanan, budaya yang menganggap laki-laki memiliki hak istimewa daripada perempuan, budaya yang menganggap laki-laki lebih berkuasa dari perempuan. Hal ini juga tidak lepas dari stereotipe atau labelling yang ada pada perempuan umumnya bahwa pekerjaan perempuan adalah pekerjaan yang terkait dengan sektor domestik (kerumahtanggaan).

Contoh lain kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan jalanan seperti yang diungkapkan oleh Nila (nama samaran):

"Aku tidak akan diterima oleh kelompok ini bahkan diusir, kalau aku gak mau dipegang-pegang payudaraku, aku juga disuruh tidur, setelah itu aku kesakitan, aku sedih, aku sebenarnya ingin pulang, tapi bapakku benci aku, aku takut..." (Wawancara, 17 September 2011)

Tidak hanya kelompok anak jalanan laki-laki yang tidak senonoh terhadap mereka, tetapi orang luar juga melakukan hubungan yang tidak senonoh terhadap anak perempuan jalanan. Tampak ada suatu anggapan masyarakat bahwa anak jalanan sebagai objek. Hal ini diungkapkan oleh Ita (nama samaran):

"Aku lagi tidur nyenyak di gerbong, tiba-tiba aku dibangunkan dan mulutku segera disekap, aku kaget, aku mau diapain, aku gak bisa teriak-teriak, tak ada orang mendengar rintihanku, aku diperkosa, setelah aku ditiduri aku ditendang, sakit tapi lebih sakit hatiku, setelah itu aku lari, menangis menemui teman-temanku yang lain, oleh teman-temanku, aku diajak ke rumah sakit untuk di periksa..." (Wawancara, 17 September 2011)

Jadi kekerasan seksual juga terjadi pada anak perempuan yaitu kekerasan yang menyangkut pemaksaan demi pelampiasan nafsu seksual. Selain perkosaan juga perilaku merusak dari organ reproduksi dan pelecehan terhadap anak perempuan tersebut misalnya; meraba payudara, menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke tubuh anak perempuan bahkan menjual anak

perempuan dengan tujuan prostitusi. Menjalani ritual melayani anggota komunitas yang laki-laki juga terjadi, jika mereka menolak, mereka akan keluar dari kelompok dan di usir. Hal yang memprihatinkan hubungan seksual dilakukan dengan pemaksaan satu pihak yang akan menimbulkan sakit secara fisik dan trauma yang berkepanjangan, apalagi jika anak perempuan hamil tidak ada pertanggungjawaban atas semua ini. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan tidak hanya dilakukan oleh anggota komunitasnya, tapi juga pihak luar yaitu masyarakat yang beranggapan bahwa anak perempuan di jalanan adalah objek.

Dalam kondisi mereka hamil dan tidak ada yang mau bertanggung jawab, di situ ada stigma didalam masyarakat terhadap anak perempuan yaitu mereka adalah objek seksual, jika mereka mengalami kekerasan seksual itu suatu hal lumrah karena mereka berada di jalanan. Hal semacam ini semakin membuat mereka jauh dari perlindungan sekalipun dari masyarakat umum yang tidak termasuk dalam komunitas mereka, terlihat di dalam masyarakat suatu pandangan perempuan hamil tanpa suami adalah pelaku tindak asusila yang dipersalahkan kepada anak perempuan, dianggap tidak mampu menjaga diri. Dalam hal ini tidak mempersoalkan laki-laki yang menghamili padahal mereka korban perkosaan, ini suatu yang memprihatinkan.

Semua bentuk kekerasan pada anak perempuan di jalanan biasanya disimpan sendirian. Tidak ada tempat untuk men-curahkan perasaan yang sakit karena telah di perkosa, dianiaya, dimaki bahkan dijebak untuk diperdagangkan dalam dunia prostitusi. Kata mereka, mereka menerima karena ini akibat mereka hidup di jalanan, bukan di rumah.

Dari beberapa kasus ada situasi anak Indonesia tergambar banyak ketidakadilan yang serius yang dialami anak jalanan terkhusus anak perempuan di jalanan. Di sini diperlukan upaya penyelesaian problem anak jalanan dan memberi perlindungan oleh semua pihak yang terkait dalam perlindungan anak. Pihak

tersebut mulai dari keluarga sebagai kelompok masyarakat yang paling kecil sampai pada pihak masyarakat dan negara.

UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 menegaskan bahwa setiap anak dengan prinsip non diskriminatif harus diakui hak sipil dan kebebasannya, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan. Dalam hal ini anak jalanan menurut UU perlindungan masuk dalam katagori anak berkebutuhan khusus dalam mendapat perlindungan baik itu pihak keluarga, aparat hukum, masyarakat dan negara. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus menjadi bahan pemikiran, di antaranya:

Pertama, mengoptimalkan sosialisasi tentang undang-undang dan peraturan tentang perlindungan anak ke segenap komponen masyarakat yang ada, di mana sosialisasi ini hendaknya di barengi oleh monitoring dan evaluasi terhadap sosialisasi dengan segala aktivitas dan program agar tercapai upaya perlindungan yang tepat sasaran dan keberlanjutan.

Kedua, melakukan penanganan anak jalanan khusus anak perempuan di jalanan secara holistik, yaitu adanya koordinasi dan kerja sama antar instansi yang terkait, dan dalam penanganannya tidak hanya semata menertibkan dan kemudian di pulangkan ke keluarga atau daerah asal mereka tapi bagaimana pihak terkait melakukan penanganan dengan cara mencari akar permasalahan mengapa anak, khususnya anak perempuan berada di jalanan dan mengapa mereka di eksploitasi, di siksa dan lain-lain.

Ketiga, memberikan layanan kecakapan hidup bagi anak jalanan khususnya anak perempuan sebagai bekal hidup untuk mandiri yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya dan tak lupa melakukan pendekatan sesuai dengan karakteristik budaya mereka agar layanan tersebut memiliki makna yang berguna bagi kehidupan mereka ke depan.

Keempat, memberikan sanksi pidana dan sanksi sosial pada pihak yang melakukan eksploitasi sekalipun orangtua mereka. Dalam hal ini badan atau sektor instansi menanggapi anak

jalanannya hendaknya juga mempersiapkan infra struktur yang menopangnya

Saat ini, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengembalikan anak-anak jalanan ke habitat yang normal. Mereka, orang yang harus mendapat perlindungan, kasih sayang dan tidak seharusnya mereka tumbuh dan hidup di jalanan. Mereka tidak layak mendapat kekerasan baik fisik, psikologis, ekonomis dan kekerasan seksual. Kekerasan akan membawa mereka menjadi perilaku yang agresif dan anti sosial sementara eksploitasi, kekerasan seksual dan terabainya hak-hak produksi mereka dapat menyebabkan gangguan organ reproduksi dan mengancam nyawanya.

Peristiwa dan kejadian di atas erat kaitannya dengan arti pentingnya pendidikan. *Pertama*, keluarga tidak menyadari bahwa pendidikan terhadap anak semenjak dini, sangat menentukan akan menjadi apa dan siapa anak mereka ke depan. *Kedua*, Negara masih lalai dalam memberikan tanggung jawabnya yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa seluruh warga Negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Untuk itu, perlu suatu disain kebijakan yang kongkrit dalam penanganan pendidikan. Faktor anggaran yang memadai dan berlebih sekalipun, belum tentu dapat menyelesaikan persoalan dalam penanganan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, secepatnya dibutuhkan semacam disain kebijakan yang tematik dan integratif.



Bagaimanapun proses sosialisasi yang responsif gender dapat direalisasikan dalam keluarga, sekolah, dan di luar keluarga dan sekolah. Isu tentang Pendidikan Multikultural bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia pendidikan. Karena bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan yang disebabkan oleh berbagai faktor kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan tersebut secara teori dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan bermacam realitas. Penyebab faktor kesenjangan itu antara lain adalah geografis dan iklim, faktor politik, faktor budaya dan seterusnya. Kondisi iklim yang berbeda misalnya, dapat menyebabkan jenis pekerjaan yang berbeda dengan penghasilan yang berbeda pula. Adanya dominasi dari satu kelompok terhadap kelompok lain dalam bidang politik pun mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang sangat luar biasa. Adapun faktor budaya memberikan kontribusi yang sangat urgen dalam kesenjangan dan ketidakseimbangan tersebut.

Sehubungan dengan aspek budaya ini, banyak hal yang bisa

dianalisis berkenaan dengan ketidaksetaraan dan kesenjangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Salah satu di antaranya adalah yang berhubungan dengan pemahaman masyarakat tentang gender. Konsepsi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari dibangun atas dasar budaya masyarakatnya. Dari banyak penelitian yang dikemukakan bahwa konstruksi demikian lebih banyak melahirkan ketidakadilan, konflik, bahkan kekerasan terhadap salah satu jenis atau kelompok yang didominasi. Dengan demikian, bagian bab ini penulis berusaha menawarkan solusi dalam bentuk pendidikan multikultural yang responsif gender. Terdapat tiga kategorisasi atau sudut pandang dalam rangka mengimplementasikan pendidikan yang responsif gender ini, antara lain melalui pendidikan dalam rumah tangga, pendidikan melalui institusi sekolah, dan pendidikan yang responsif gender di luar sekolah. Hal ini memiliki beberapa persamaan dan sedikit perbedaan dengan dasar pembagian atau klasifikasi pendidikan secara konvensional selama ini, yaitu; pendidikan formal yang disamakan dengan pendidikan melalui sekolah, pendidikan informal melalui pendidikan rumah tangga atau keluarga, dan pendidikan non-formal melalui pendidikan lembaga-lembaga tertentu. Perbedaan terdapat pada polarisasi yang ketiga. Pendidikan responsif gender di luar rumah tangga dan sekolah tidak hanya terbatas pada pendidikan formal yang meliputi lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi lebih luas daripada itu.

A. PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI RUMAH TANGGA

Secara sosiologis rumah tangga adalah sebuah institusi sosial yang memiliki peran penting dalam proses sosialisasi. Dalam perspektif dunia pendidikan pendidikan keluarga tersebut diterjemahkan dengan pendidikan informal. Ketika membicarakan konsep keluarga, ada yang dikenal dengan keluarga inti (*intended family*) dan keluarga luas (*extended family*). Dari konsepsi ilmu

budaya, keluarga inti, terdiri dari ibu, ayah, dan anak, sedangkan keluarga luas tentu melebihi dari itu. Dalam batasan ilmu antropologi, keluarga luas itu meliputi kekerabatan lainnya, bisa saudara dari ayah atau saudara dari keluarga ibu. Pengertian ini masih terpaku dalam batasan teori-teori antropologi klasik. Jika dikaitkan dengan teori budaya kritis, *konsep extended family* tentu tidak seketat itu lagi. Bisa saja yang dimaksud dengan keluarga luas itu adalah di samping keluarga yang ada dalam kekerabatan ayah dan ibu, tetapi juga orang lain yang tidak punya ikatan secara biologis tetapi dia sudah masuk ke dalam keluarga tersebut, misalnya pembantu rumah tangga yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah, saudara-saudara angkat yang sudah menjadi keluarga sendiri.

Meskipun demikian, yang memiliki peran penting pada umumnya dalam sebuah keluarga, tentu adalah ayah dan ibu. Sementara, yang paling banyak keterlibatannya secara umum adalah ibu. Dengan demikian, sasaran sosialisasi yang responsif gender itu tentu harus ditujukan kepada keluarga. *Pertama*, keluarga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat tentang kesetaraan gender; *kedua*, pelatihan atau pembiasaan melalui pemahaman fungsi-fungsi organik yang tepat dengan latihan mewas diri; *ketiga*, mereduksi norma atau tata nilai yang tidak responsif gender dengan kata lain bias gender.

Berikut ini bagaimana pendidikan yang responsif gender itu bisa tersosialisasi melalui pendidikan keluarga. Pengetahuan dan keterampilan yang responsif gender mutlak dimiliki oleh kedua orangtua melalui bacaan-bacaan dan pelatihan-pelatihan pada tingkat pedesaan. Dengan demikian, akan terjadi pengarahannya yang responsif gender dalam mempersiapkan anak laki-laki dan perempuan menuju kualitas sumber daya manusia yang kuat. Misalnya, seperti yang diungkapkan (Talcott Persons, 1955) dalam bukunya "Family Socialization and Interaction Proses", bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga tidak ada yang dominan, semua pekerjaan rumah tangga harus dikerjakan oleh

laki-laki dan perempuan setara. Kekerasan rumah tangga biasanya terjadi, karena salah satu jenis kelamin merasa superior terhadap pasangannya.

Banyak laki-laki mengatakan, sungguh tidak mudah menjadi laki-laki karena masyarakat memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadapnya. Mereka haruslah sosok kuat, tidak cengeng, dan perkasa. Ketika seorang anak laki-laki diejek, dipukul, dan dilecehkan oleh kawannya yang lebih besar, biasanya tidak ingin menunjukkan bahwa ia sebenarnya sedih dan malu. Sebaliknya, ia ingin tampak percaya diri, gagah, dan tidak memperlihatkan kekhawatiran dan ketidakberdayaannya.

Ini menjadi beban yang sangat berat bagi anak laki-laki yang senantiasa bersembunyi di balik topeng maskulinitasnya. Kenyataannya juga menunjukkan, menjadi perempuan pun tidaklah mudah. Stereotip perempuan yang pasif, emosional, dan tidak mandiri telah menjadi citra baku yang sulit diubah. Karenanya, jika seorang perempuan mengekspresikan keinginan atau kebutuhannya maka ia akan dianggap egois, tidak rasional dan agresif. Hal ini menjadi beban tersendiri pula bagi perempuan.

Kedua di atas menunjukkan adanya ketimpangan atau bias gender yang sesungguhnya merugikan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Membicarakan gender tidak berarti membicarakan hal yang menyangkut perempuan saja. Gender dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat.

Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan keluarga. Jika ibu atau pembantu rumah tangga (perempuan) yang selalu mengerjakan tugas-tugas domestik seperti memasak, mencuci, dan menyapu, maka akan tertanam di benak anak-anak bahwa pekerjaan domestik memang menjadi pekerjaan perempuan.

Kesetaraan gender seharusnya mulai ditanamkan pada anak sejak dari lingkungan keluarga. Ayah dan ibu yang saling melayani dan menghormati akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Demikian pula dalam hal memutuskan berbagai persoalan keluarga, tentu tidak lagi didasarkan atas “apa kata ayah”. Jadi, orangtua yang berwawasan gender diperlukan bagi pembentukan mentalitas anak baik laki-laki maupun perempuan yang kuat dan percaya diri.

Memang tidak mudah bagi orangtua untuk melakukan pemberdayaan yang setara terhadap anak perempuan dan laki-lakinya. Sebab di satu pihak, mereka dituntut oleh masyarakat untuk membesarkan anak-anaknya sesuai dengan “aturan anak perempuan” dan “aturan anak laki-laki”. Di lain pihak, mereka mulai menyadari bahwa aturan-aturan itu melahirkan ketidakadilan baik bagi anak perempuan maupun laki-laki. Pembagian feminim dan maskulin pada anak perempuan dan laki-laki mulai menimbulkan berbagai perdebatan. Dalam hal ini tidak hanya anak perempuan yang harus lemah lembut tetapi tidak menutup kemungkinan anak laki-laki juga harus bersikap lemah lembut. Anak perempuan juga bisa bersikap maskulin dan tegas serta berpikir logis.

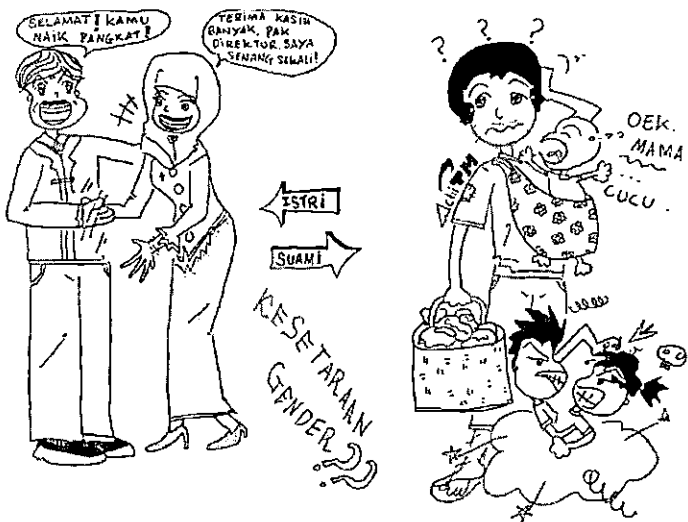


Gambar 30. Pembagian maskulin dan feminim pada anak usia dini

Sumber: majalahembun.com

Bentuk pembagian tugas dalam keluarga yang responsif gender terlihat pada Gambar 31 dan Gambar 32 berikut. Dalam

hal berkarier tidak menutup kesempatan bagi perempuan ataupun istri untuk mendapatkan yang lebih dari laki-laki. Suami juga bisa mengasuh anak-anaknya dalam rumah tangga. Ini juga berangkat dari kesetaraan gender berdasarkan hasil “kesepakatan” antara suami dan istri. Terlepas setara atau tidaknya, responsif gender dalam keluarga dimulai dari dua orang individu yaitu suami dan istri. Dari suami dan istri inilah, nantinya kesetaraan gender diajarkan kepada anak-anak dalam keluarga. Pengenalan gender pun diajarkan sedini mungkin, mulai dari kandungan yang menganggap jika yang dilahirkan anak perempuan harus mempersiapkan perlengkapan bayi yang serba berwarna pink dan jika yang dilahirkan anak laki-laki perlengkapan bayi yang dibeli berwarna biru. Hal ini secara tidak langsung mulai mengajarkan pada bayi bahwa yang lembut-lembut itu identik dengan anak perempuan dan warna-warna biru yang dianggap maskulin identik dengan anak laki-laki.



Gambar 31. Kesepakatan gender dalam keluarga

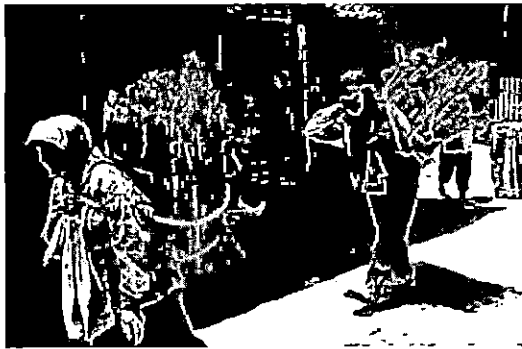
Sumber: Wahyu Nuryaprutz,

<http://whyjeyex.blogspot.com/2011/06/kesetaraan-berbasis-gender.html>, 2011.



Gambar 32. Kesepakatan gender dalam keluarga

Perempuan sebagai pejuang keluarga tidak hanya dalam hal bekerja di kantor tetapi juga dalam hal pekerjaan berat. Pendapat yang mengatakan perempuan itu bertubuh lemah tidak bisa menjadi acuan lagi. Hal ini terlihat dari Gambar 33 dan Gambar 34. Pada Gambar 33 para ibu-ibu mengangkat kayu bakar untuk dimasak padahal biasanya laki-laki yang dianggap kuatlah yang bisa memikul beban tersebut. Pada Gambar 34 juga terlihat perempuan memanen padi sambil berpanas-panasan dan biasanya juga laki-laki yang memanen padi. Jadi, anggapan bahwa perempuan itu lemah sudah lama tidak benar. Perempuan juga bisa mengangkat beban berat dan berpanas-panasan untuk mencari nafkah. Dalam hal berjuang mencari nafkah dan menghidupi rumah tangga perempuan tidak hanya sebagai pelengkap saja tetapi juga bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Selain itu, peran dan posisi kaum perempuan sejak masa lampau hingga saat ini telah menempatkan perempuan sebagai mitra yang sejajar dengan kaum pria. Perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang.



Gambar 33. Perempuan pejuang keluarga

Sumber: Mahmudi Siwi, SP, <http://fema.ipb.ac.id/index.php/kesetaraan-gender-dalam-organisasi-kemahasiswaan-harapan-dan-realita/>, 2003



Gambar 34. Perempuan petani

Sumber: moh ramli, <http://fakultaspertanianunars.blogspot.com/>, 2014

1. Pelatihan Kesadaran Perempuan dengan Metode Andragogi

Salah satu langkah untuk melakukan pemberdayaan perempuan adalah melakukan proses pembelajaran kepada perempuan. Adapun metode yang tepat dalam pembelajaran perempuan salah satunya dengan pendekatan andragogi.

Andragogi perempuan adalah suatu metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran bagi perempuan dewasa secara me-

nyeluruh dan berkelanjutan, adapun hal yang mendasar dalam pendekatan andragogi pada pembelajaran perempuan dewasa adalah:

- a. Peserta belajar perempuan dipandang sebagai perempuan yang memiliki citra diri perempuan dewasa yang matang dan mandiri maka menjadi penting memahami peserta pendidikan citra diri perempuan dewasa sebagai perempuan yang telah matang dan mandiri, proses pembelajaran akan tidak optimal jika mereka diperlakukan sebagai anak kecil dan hubungan yang dibangun antara guru/fasilitator pembelajaran dan peserta belajar perempuan adalah hubungan yang bersifat timbal balik dan saling membantu.
- b. Peserta belajar perempuan dipandang sebagai orang yang memiliki pengalaman. Perempuan dewasa dalam realita kehidupan adalah orang yang memiliki pengalaman beragam. Pengalaman yang beragam dianggap sumber kekayaan dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dengan cara-cara yang lebih bersifat diskusi kelompok, simulasi, permainan peran, dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran perempuan ini, semua pengalaman peserta belajar didayagunakan sebagai sumber dan inspirasi belajar.
- c. Peserta belajar perempuan dipandang sebagai orang yang memiliki kesiapan dalam belajar. Dalam proses pembelajaran perempuan dewasa, peserta belajar lebih diarahkan pada proses pemilihan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta belajar, guru hanya sebagai fasilitator saja. dikarenakan mereka adalah orang yang dianggap sudah memiliki kesadaran dan kesiapan untuk melakukan proses pembelajaran
- d. Belajar bagi perempuan dewasa dipandang sebagai proses pemecahan masalah. Belajar bagi perempuan adalah upaya pemecahan masalah perempuan itu sendiri, seperti ketimpangan gender dalam berbagai segi kehidupan, mulai dari problem pendidikan, kesehatan, politik, dan lainnya.

Pembelajaran bagi perempuan dewasa dengan metode andragogi ini berbicara “memecahkan masalah hari ini”.

Dari uraian dapat kita tarik benang merahnya, bahwa pembelajaran yang dilakukan pada perempuan dewasa dalam rangka peningkatan kualitas diri dari perempuan tersebut hendaklah dilakukan dengan cara belajar yang konteks dengan pengalaman kehidupan perempuan tersebut.

2. Prinsip-prinsip Belajar bagi Perempuan Dewasa

Ada beberapa hal yang bisa di kemukaan dalam proses pembelajaran perempuan dewasa dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan kualitas hidup dari pada perempuan agar terwujud kesempatan untuk berkarya dan mendapat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, di antaranya:

- a. Dalam proses pembelajaran peserta belajar harus dapat mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang ada.
- b. Topik dan tema yang dikembangkan adalah topik dan tema yang menarik bagi mereka, memiliki keterkaitan dengan kehidupan perempuan beserta dinamikanya.
- c. Materi yang disampaikan dan didiskusikan berisifat praktis dan berdaya guna bagi kehidupan perempuan.
- d. Menumbuhkan semangat belajar adalah kunci utama dalam proses pembelajaran.
- e. Selain melakukan proses pembelajaran di dalam ruang lingkup pelatihan atau lokakarya atau workshop dan lainnya, diharapkan memiliki keberlanjutan
- f. Proses pembelajaran perempuan ini di tuntutan untuk menghargai pengalaman-pengalaman dan daya pikir dari pada warga belajar.
- g. Menciptakan suasana saling pengertian antara peserta belajar sebagaimana layaknya orang dewasa.

Hal diatas adalah sebagian dari acuan dalam melakukan pembelajaran dalam proses pendidikan dan pemberdayaan

perempuan, namun hakikatnya kontekstual dan kondisi lapangan akan memiliki pengaruh tersendiri dalam proses pembelajaran perempuan dewasa tersebut.

Selanjutnya metode yang dapat dilakukan pada pembelajaran perempuan dewasa dengan pendekatan andragogi ini, di antaranya metode diskusi, kunjungan lapangan, metode demonstrasi, metode pelatihan, dan lain-lain.

Di bawah ini contoh kasus ketimpangan gender dalam rumah tangga, yang sebelumnya contoh kasus, penulis telah menuliskan dalam buku Catatan keluarga Wirdaningsih (2012: 34-37).

Aku seorang pembantu rumah tangga yang bekerja pada keluarga pak Halim, yang pada saat ini mereka belum dikarunai seorang anak, sama dengan diriku, sampai saat ini aku juga belum dikarunia seorang anak. Namun keluarga pak Halim berbeda dengan keluargaku, mereka orang kaya, sedangkan aku orang miskin. Mereka sama-sama memiliki pekerjaan yang mapan, beda dengan aku. Aku seorang pembantu, sedangkan suami seorang tukang ojek. Bedanya lagi pak Halim tak pernah memukul istrinya, sedangkan aku sering dipukul sama suami apabila aku nggak bisa memenuhi keinginannya.

Pagi ini, ada suatu yang inginku ungkapkan sama bu Halim. "Ibu bolehkan aku meminjam uang sebesar tujuh juta rupiah, nanti aku cicil dari gaji per bulanku."

"Lha, buat apa uang sebanyak itu oleh bu Surti?"

"Anu bu, buat beli motor suamiku."

"Kan suamimu sudah punya motor, walaupun motor seken, dan itu pun juga dari hasil tabunganmu."

"Iya, kata suami, katanya orang-orang pada gak mau ngojek kalau motornya butut."

"Nanti ibu pikirkan dulu."

Aku sedih sekali, kayaknya bu Halim kurang bersedia dengan permintaanku. Aku sedih karena aku nggak bisa membahagiakan suamiku, aku masih ingat wejangan nenek dan ibuku, "Nduk, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus bahagiakan suamimu, kamu harus mengabdikan kepada suami."

Ah, wejangan itu selalu membuat aku bingung. Aku ingin mengabdikan kepada suami dengan cara memenuhi keinginannya, tapi gimana lagi, aku kan gak punya uang banyak dan aku juga takut ...

"Pra... prak... prak..." Aduh sakit, tamparan itu menyakitkan

"Masak sih majikanmu tidak mau memberikan uang itu, kan kamu gak minta, cuma minjam, toh nanti diganti ama gajimu tiap bulan, apa susahnya."

Begitulah suamiku, kalau keinginannya tak dipenuhi, aku hanya bisa diam, aku takut..., aku diperlakukan lebih kejam oleh suamiku. Dan aku lebih takut, aku gak bakalan masuk surga, karena aku gak mampu mengabdikan kepada suami dengan baik.

Hari ini aku baru bisa berangkat kerja, beberapa hari ini kepalaku pusing.

"Surti, ibu sebenarnya sudah lama ingin ngobrol denganmu, dan rasanya sikap ini bukan karena ingin mencampuri urusan rumah tangga, cuma ada suatu keprihatinan dan ingin mencoba memecahkan persoalan rumah tanggamu."

"Tidak apa-apa kok bu, apa yang ingin dibicarakan dengan saya."

"Begini, apa sebenarnya yang membuatmu sakit dan sedih beberapa hari ini?"

"Saya sedih, sedih dan takut, saya gak bakalan masuk surga."

"Apa hubungannya?"

"Saya gak bisa membahagiakan dan mengabdikan kepada suami saya."

"Lha selama ini, kamukan baik dengan suami."

"Tapi beberapa hari ini, tidak, aku gak bisa membelikan motor buatnya."

Aku lihat bu Halim terpana dan bingung.

3. Gender dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Narasi diatas adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga yang didasarkan adanya suatu hubungan suami sebagai yang berkuasa/ordinat dan istri sebagai sub-ordinat/yang dikuasai. Dan ada suatu persepsi yang salah pengertian akan hakikat pengabdian terhadap suami dalam rangka memperoleh pintu sorga. Hakikatnya mengabdikan

kepada suami, menjadi suatu jalan menuju sorga adalah berbuat baik dan mengabdikan suami adalah suatu amal di kala perbuatan tersebut masih dalam tatanan kemaslahatan bersama dan tidak merugikan antara satu pihak dengan pihak, suatu pengabdian yang diakui adalah pengabdian pada seseorang yang masih dalam tatanan kehidupan yang baik dan lurus, tatanan kehidupan yang tidak menyimpang dari akidah agama itu sendiri.

Narasi di atas hanya satu dari sekian bentuk kekerasan didalam rumah tangga (KDRT). Dalam fakta KDRT tidak hanya pada masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah, namun pada keluarga yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang tinggi. KDRT tidak hanya dilakukan pada laki-laki yang "preman", tetapi pada laki-laki yang memiliki karier yang bagus juga melakukan KDRT. KDRT tidak hanya dilakukan oleh lelaki yang kasar dan tidak bisa bergaul namun KDRT juga dilakukan pada suami yang santun.

Dalam realita KDRT merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, secara garis besar ada beberapa faktor terjadinya KDRT yaitu: *pertama*, adanya budaya patriarki yang masih bercokol kuat dalam kehidupan masyarakat, budaya yang menyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferiornya. *Kedua*, interpretasi keliru terhadap suatu ajaran agama, misalnya "jika istri durhaka, pukullah." *Pukullah* di sini memiliki makna menegur dengan kasih sayang, tapi bisa saja ditafsirkan memang memukul dengan kekerasan fisik.

Ketiga, contoh perilaku yang ada dalam keluarga, jika didalam keluarga selama ini dalam penyelesaian masalah dilihat dan disaksikan oleh anak dalam bentuk kekerasan, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan kekerasan tersebut yang kemudian setelah dewasa pola kekerasan tersebut juga menjadi acuan dia bertindak kelak. *Keempat*, KDRT tetap langeng karena adanya pengabaian kasus kekerasan yang ada baik oleh keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum dengan argumen-

tasi bahwa KDRT adalah persoalan internal dalam keluarga yang hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan juga

Beberapa penelitian Rifka Annisa dari Women Crisis Center menunjukkan bahwa kekerasan verbal terhadap istri diperkirakan ada 48 persen dan 23 persen kekerasan yang bersifat fisik. Ini menyebar dalam tingkat pendidikan dasar dan perguruan tinggi, tingkat keragaman profesi mulai dari buruh, PND, pegawai BUMN, ABRI sampai wiraswatawan, pada isteri bekerja dan tidak bekerja .

KDRT tidak hanya memiliki dampak secara fisik dan psikis bagi korban KDRT, melainkan memiliki dampak pada anak seperti depresi dalam menghadapi problem yang dihadapi orangtuanya, dan anak “bingung” terhadap pola apa yang menjadi acuan baginya untuk bertingkah laku jika pola hubungan yang ada dalam keluarganya adalah pola hubungan yang identik kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

KDRT harus dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Kita hendaknya mencari upaya-upaya untuk mengatasi KDRT terhadap perempuan di antaranya:

- a. Mitos-mitos seperti “ingin masuk surga” dengan jalan mengabdikan pada suami tidaklah salah, namun “mengabdikan pada suami karena ingin masuk surga” dipandang secara buta dan tidak ditafsirkan “selagi suami masih dalam kebaikan” hendaknya dihilangkan. Begitu juga mitos KDRT adalah masalah internal dalam keluarga sehingga diabaikan penyelesaiannya ke ranah publik. Mitos KDRT hanya terjadi pada keluarga dengan tingkat status sosial ekonomi rendah saja. Mitos KDRT hanya terjadi pada suami kasar. Semua itu harus diluruskan persepsinya.
- b. Melakukan sosialisasi “pengarusutamaan gender” yang berkelanjutan dan membangun kerja sama dengan instansi yang terkait.
- c. Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran akan kesetaraan

antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam konteks kerumahtanggaan.

- d. Membentuk lembaga tempat konsultasi dan pelaporan kasus KDRT inidan memberikan pendampingan pada masyarakat akan proses pelaporan KDRT .

Dan yang terpenting adalah payung hukum dalam penyelesaian masalah KDRT ini

B. PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI SEKOLAH

Sehubungan dengan pentingnya pendidikan yang responsif gender di sekolah, maka terdapat beberapa komponen atau sistem yang memilki peranan penting. Komponen tersebut antara lain adalah guru, kurikulum, dan manajemen sekolah. Ketiga hal ini akan dicoba menjelaskannya dalam bentuk bagaimana pendidikan multikultural di sekolah yang berbasis kepada responsif gender, karena gender atau sosialisasi dalam perbedaan jenis kelamin sering kali menimbulkan akibat ketimpangan dan ketidakadilan antara kedua jenis kelamin tersebut.

Dalam pendidikan multikultural, guru memiliki peran strategis untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjunjung tinggi hak-hak perempuan (Edi Hidayat: 205: 89) Dengan demikian, guru dituntut memiliki peran dalam membangun kesadaran peserta didik terhadap nilai-nilai kesadaran gender dan sikap anti diskriminatif, khususnya terhadap kaum perempuan di sekolah melalui cara: *pertama*, guru harus memiliki wawasan yang cukup tentang kesadaran gender. Wawasan ini penting, karena guru merupakan figur utama yang menjadi pusat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. *Kedua*, seorang guru dituntut mampu mempraktikkan nilai-nilai keadilan gender secara langsung di kelas atau di sekolah. *Ketiga*, sensitif terhadap permasalahan di dalam maupun di luar kelas. Urgensi dari pendidikan multikultural perlu mendorong perubahan perilaku dan sikap guru terhadap bias gender. Ste-

reotip bias gender yang sudah terbangun selama ini, perlu diluruskan.

Di sisi lain, khususnya yang berhubungan dengan manajemen sekolah pun memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai tentang kesadaran dan kesetaraan gender dengan cara: *pertama*, sekolah harus memiliki undang-undang atau aturan yang menerapkan anti didkriminasi gender. *Kedua*, sekolah berperan aktif untuk memberikan pelatihan gender terhadap seluruh staf termasuk guru, dan seluruh peserta didik agar penanaman nilai-nilai tentang persamaan hak dan sikap anti diskriminasi gender dapat berjalan dengan baik dan efektif. *Ketiga*, untuk memupuk dan menggugah kesadaran peserta didik tentang kesadaran gender dan sikap anti diskriminasi terhadap kaum perempuan, maka pihak sekolah dapat mengadakan acara-acara seminar atau kegiatan-kegiatan social lainnya yang berkaitan dengan penegmbangan kesetaraan gender(Inul Yaqin, 205: 134-135).

Pendidikan di sekolah dengan komponen pembelajaran seperti media, metode, serta buku ajar yang menjadi pegangan para siswa ternyata sarat dengan bias gender. Dalam buku ajar misalnya, banyak ditemukan gambar maupun rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebut saja gambar seorang pilot selalu laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan dan kekuatan yang “hanya” dimiliki oleh laki-laki (lihat Gambar 35). Sementara gambar guru yang sedang mengajar di kelas selalu perempuan karena guru selalu diidentikkan dengan tugas mengasuh atau mendidik (lihat Gambar 36). Ironisnya siswa pun melihat bahwa meski guru-gurunya lebih banyak berjenis kelamin perempuan, tetapi kepala sekolahnya umumnya laki-laki.

Dalam rumusan kalimat pun demikian. Kalimat seperti “Ini ibu Budi” dan bukan “ini ibu Suci”, “Ayah membaca koran dan ibu memasak di dapur” dan bukan sebaliknya “Ayah memasak di dapur dan ibu membaca koran”, masih sering ditemukan dalam



Gambar 35.

Pilot yang diidentikkan sebagai pekerjaan maskulin (untuk laki-laki)

Sumber: www.antaragorontalo.com



Gambar 36.

Guru yang diidentikkan sebagai pekerjaan feminin (untuk perempuan)

Sumber: bankfotowol.blogspot.com

banyak buku ajar atau bahkan contoh rumusan kalimat yang disampaikan guru di dalam kelas. Rumusan kalimat tersebut mencerminkan sifat feminim dan kerja domestik bagi perempuan serta sifat maskulin dan kerja publik bagi laki-laki.

Demikian pula dalam perlakuan guru terhadap siswa, yang berlangsung di dalam atau di luar kelas. Misalnya ketika seorang guru melihat murid laki-lakinya menangis, ia akan mengatakan “Masak laki-laki menangis. Laki-laki nggak boleh cengeng”. Sebaliknya ketika melihat murid perempuannya naik ke atas meja

misalnya, ia akan mengatakan “anak perempuan kok tidak tahu sopan santun”. Hal ini memberikan pemahaman kepada siswa bahwa hanya perempuan yang boleh menangis dan hanya laki-laki yang boleh kasar dan kurang sopan santunnya.

Dalam upacara bendera di sekolah selalu dapat dipastikan bahwa pembawa bendera adalah siswa perempuan. Siswa perempuan itu dikawal oleh dua siswa laki-laki. Hal demikian tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi bahkan di tingkat nasional. Paskibraka yang setiap tanggal 17 Agustus bertugas di istana negara, selalu menempatkan dua perempuan sebagai pembawa bendera pusaka dan duplikatnya. Belum pernah terjadi dalam sejarah: laki-laki yang membawa bendera pusaka itu (lihat Gambar 37).



Gambar 37. Perempuan pembawa bendera merah putih

Sumber: www.ediginting.com

Hal ini menanamkan pengertian kepada siswa dan masyarakat pada umumnya bahwa tugas pelayanan seperti membawa bendera, lebih luas lagi, membawa baki atau pemukul gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas perempuan. Semuanya ini mengajarkan kepada siswa tentang apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh laki-laki dan apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh perempuan.

Bias gender yang berlangsung di rumah maupun di sekolah tidak hanya berdampak negatif bagi siswa atau anak perempuan tetapi juga bagi anak laki-laki. Anak perempuan diarahkan untuk selalu tampil cantik, lembut, dan melayani. Sementara laki-laki diarahkan untuk tampil gagah, kuat, dan berani. Ini akan sangat berpengaruh pada peran sosial mereka di masa datang. Singkatnya, ada konversi tertentu yang dituntut oleh masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Jika perempuan tidak dapat memenuhinya ia akan disebut tidak tahu adat dan kasar. Demikian pula jika laki-laki tidak dapat memenuhinya ia akan disebut banci, penakut atau bukan laki-laki sejati.

William Pollacek dalam *Real Boys* menunjukkan penemuannya, sebenarnya, bayi laki-laki secara emosional lebih ekspresif dibandingkan bayi perempuan. Namun ketika sampai pada usia sekolah dasar, ekspresi emosionalnya hilang. Laki-laki pada usia lima atau enam tahun belajar mengontrol perasaan-perasaannya dan mulai malu mengungkapkannya. Penyebabnya adalah *pertama*, ada proses menjadi kuat bagi laki-laki yang selalu diajari untuk tidak menangis, tidak lemah, dan tidak takut. *Kedua*, proses pemisahan dari ibunya, yakni proses untuk tidak menyerupai ibunya yang dianggap masyarakat sebagai perempuan lemah dan harus dilindungi. Meski berat bagi anak laki-laki untuk berpisah dari sang ibu, namun ia harus melakukannya jika tidak ingin dijuluki sebagai “anak mami” (Sri Suciati, Kesetaraan Gender dalam Pendidikan, <http://www.Suaramerdeka.com/harian/0408/09/opi04.htm>, 2004).

Tidak mengherankan jika banyak guru mengatakan bahwa siswa laki-laki lebih banyak masuk dalam daftar penerima hukuman, gagal studi, dan malas. Penyebabnya karena anak laki-laki lebih banyak mempunyai persoalan hiperaktif yang mengakibatkan kemunduran konsentrasi di kelas. Sementara itu, menjelang dewasa, pada anak perempuan selalu ada tuntutan-tuntutan di luar dirinya yang memaksa mereka tidak memiliki pilihan untuk bertahan. Satu-satunya cara yang dianggap aman adalah dengan

membunuh kepribadian mereka untuk kemudian mengikuti keinginan masyarakat dengan menjadi suatu objek yang diinginkan oleh laki-laki. Objek yang diinginkan ini selalu berkaitan dengan tubuhnya. Kemudian jadilah mereka anak-anak perempuan yang mengikuti stereotip yang diinginkan seperti tubuh langsing, wajah putih nan cantik, kulit halus dll. Tidak heran jika semakin banyak anak perempuan mengusahakan penampilan sempurna seperti peragawati dengan cara-cara yang justru merusak tubuhnya. Padahal, di sekolah, siswa perempuan umumnya memiliki prestasi akademik yang lebih baik jika dibandingkan dengan laki-laki. Situasi dan kondisi memungkinkan mereka jauh lebih tekun dan banyak membaca buku.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh proses pendidikan di sekolah yang bias gender. Biasanya, laki-laki ditempatkan pada posisi yang selalu tinggi dalam beberapa proses pendidikan seperti memimpin kelas, memimpin organisasi, memimpin diskusi, memimpin kelompok belajar serta mengemukakan pendapat harus laki-laki. Selain itu, muatan buku pelajaran masih mengungkapkan status dan peran laki laki dan perempuan yang bias gender

Perlu dilakukan sistem pengelolaan sekolah yang berwawasan gender mulai dari Lingkungan sekolah artinya sekolah nyaman buat anak laki-laki dan perempuan namun dalam realitanya lingkungan sekolah belum nyaman buat anak perempuan, contoh ketikamengalami mentruasi dan belum ada kebijakan yang terkait keterlambatan/ketergangguan belajar ketika anak perempuan mengalami mentruasi.

Pada Tabel 2 diberikan contoh integratif pembelajaran yang terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan.

1. Integrasi Gender Pada Satuan Pendidikan di Sekolah

Praktik ketidakadilan gender saat ini, dapat dikatakan masih berlangsung, seperti dalam proses pembelajaran terbangun

Tabel 2.
Contoh integratif pembelajaran yang terkait dengan
perbedaan laki-laki dan perempuan

<p>Laki-laki dan perempuan</p> <p>"Laki-laki perempuan sama-sama manusia"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sepadan oleh Allah. 2. Siswa memahami baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban mengerjakan amal saleh. 3. Siswa memahami perbedaan yang ada dalam diri laki-laki atau perempuan adalah untuk saling melengkapi. 4. Siswa memahami tindakan yang harus dilakukan dan yang mesti dihindari antara laki-laki dan perempuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah secara sepadan, jadi mereka harus saling memperlakukan dengan adil. 2. Hormati dan hargai hak-hak orang yang berbeda jenis kelamin. <p>Hanya untuk laki-laki:</p> <p>Jangan melecehkan, mendiskriminasi atau mengintimidasi (menakut-nakuti, mengancam kaum yang lebih lemah secara fisik).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Melecehkan:</i> Bersuit-suit pada seorang gadis yang berjalan sendirian, mencolek, menganggap perempuan sebagai objek seksual semata-mata. Pornografi juga salah satu cara tidak langsung melecehkan perempuan. Sebuah angket memperlihatkan bahwa 91 persen siswa perempuan merasa tidak suka atau terganggu ketika digoda oleh anak laki-laki dengan cara seperti bersuit-suit, memanggil-manggil, dan lain-lain. ▪ <i>Diskriminasi:</i> Selalu menganggap semua perempuan tidak bisa mengerjakan semua hal, kecuali pekerjaan rumah saja, seperti memasak, menjahit, mengurus anak, dan lain-lain. Tidak mau melibatkan perempuan dalam kegiatan yang memerlukan kekuatan fisik karena menganggap perempuan lemah. ▪ <i>Intimidasi:</i> Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam, memaksa perempuan agar menuruti apa yang diperintahkan. Jika tidak mau, mereka dipukuli. <p>Hanya untuk perempuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mempermainkan:</i> Sering perempuan mempermainkan laki-laki, baik dengan maksud agar diperhatikan atau sekadar menyakiti perasaan teman laki-laki. ▪ <i>Membeda-bedakan teman:</i> Dalam berteman, baik laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan sama secara adil.
---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Menyakiti dengan kata-kata:</i> Membalas perbuatan yang menyakiti perempuan dengan mengucapkan kata-kata tajam, sinis, dan menyakitkan hati laki-laki. <p>Laki-laki dan perempuan harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengerti dan menghargai peran dan perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan. Sebaliknya perlakukan orang yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. ▪ Bergaul dengan sehat, sepuh hati, namun tahu batas-batas dalam bergaul. <ol style="list-style-type: none"> 3. Kisah teladan tentang laki-laki dan perempuan. 4. Pemecahan masalah tentang laki-laki dan perempuan. 5. Doa penutup.
--	--	---

suatu stereotipe, di mana anak laki-laki cenderung diberi motivasi untuk menjadi kuat, pemberani sehingga diberi kegiatan yang menantang, di dorong untuk menjadi pemimpin dan beraktivitas di luar rumah. Berbeda dengan motivasi yang di berikan kepada siswa perempuan, yaitu, motivasi menjadi orang yang penurut, tidak independen, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan bekerja secara sosial. Ini merupakan pembagian pekerjaan yang kaku yang berakibat kurang menguntungkan bagi siswa karena mereka tidak tumbuh kembang sebagai pribadi yang utuh dalam menghadapi fenomena dan dinamika kehidupan di dunia yang komplek ini. Dengan adanya ketimpangan gender di sekolah ini, maka perlu dilakukan pendidikan yang responsif gender.

Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam rangka integrasi gender di sekolah, di antaranya, *pertama*, merencanakan dan melaksanakan rencana manajemen pendidikan yang memuat ketegasan arti penting kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai program, aktivitas dan kebijakakan sekolah. *Kedua*, merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi

proses pembelajaran yang peka gender mulai dari pembuatan silabus, standar kompetensi serta media pembelajaran.

Ketiga, Mengajak komite sekolah untuk berpartisipasi dalam manajemen pendidikan berbasis gender.

2. Manajemen Sekolah Pendidikan Berbasis Gender

Manajemen sekolah diharapkan membangun sekolah berprestasi bagi peserta didik laki dan perempuan. Artinya anak laki maupun anak perempuan sama-sama memiliki kesempatan untuk beprestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik seperti cinta ilmu, semangat sekolah, berdisiplin dan lain-lain.

Pada saat ini, perlu digalakkan manajemen berbasis gender ini. Isu gender perlu di desain dalam budaya sekolah karena budaya sekolah selama ini lebih banyak menguntungkan perlakuan yang lebih baik kepada anak laki-laki, contoh kesempatan menjadi ketua OSIS lebih diberikan kepada anak-laki-laki walaupun ada perempuan yang juga memiliki potensi menjadi ketua OSIS.

3. Gender dalam Sarana dan Prasarana di Sekolah

Sarana dan prasarana di sekolah yang berbasis gender juga menjadi penting, Sarana dan prasana hendaknya memperhatikan kebutuhan antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Misalnya, meja sekolah hendaknya didesain tidak terbuka, agar siswa perempuan menjadi nyaman ketika mereka duduk memakai rok. Seharusnya disediakan ruang ganti pakaian olah raga yang membuat mereka jauh dari pelecehan seksual, disediakan perlengkapan bagi siswa perempuan ketika mereka mengalami menstruasi.

4. Gender dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Sekolah

Tak kalah penting, kesetaraan laki-laki dan perempuan juga

diwujudkan dalam kesempatan pengembangan diri misalnya memberikan kesempatan yang sama dalam “ beasiswa pendidikan “ karena selama ini ada kecenderungan tawaran beasiswa diberikan pada guru laki-laki. Proses ini jika diamati juga dialami di sekolah tinggi seperti di Universitas.

Issue perempuan yang sering diperbincangkan saat ini adalah bagaimana megupayakan dan membangun otonomi perempuan. Otonomi perempuan diartikan berupa kemampuan perempuan dalam memperoleh informasi yang bermanfaat sebagai dasar untuk menentukan pilihan, terutama yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, pendidikan formal merupakan modal dasar bagi perempuan untuk lebih mandiri karena ilmu pengetahuan membuat perempuan sulit dihasut, memiliki pandangan luas, mampu membela kepentingannya, tidak bersifat pasrah dan menggantungkan diri pada nasib. Kesempatan maupun peluang yang sama dalam memperoleh pendidikan harus diberikan pada perempuan dan begitu juga kesempatan dan peluang lainnya, seperti kesempatan kerja, kesehatan dan gizi yang cukup serta pengembangan karier secara wajar.

Pendidikan formal bagi kaum perempuan sudah diperkenalkan sejak abad 20, yang telah memberikan kemajuan bagi perempuan tersebut. Melalui pendidikan perempuan bisa berperan aktif dalam pergerakan nasional dan perjuangan bangsa, seperti Putri Sima dari kerajaan Kalingga, RA.Kartini, Christina Marta Tiahahu, Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, dan Rasuna Said yang merupakan pejuang-pejuang perempuan yang gigih melawan penjajahan.

Pendidikan membawa perempuan untuk dapat memperoleh status, kedudukan dan martabat. Pendidikan juga telah menempatkan perempuan dalam berbagai profesi dan posisi dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Namun disisi lain bukan berarti ada hal yang tidak menguntungkan telah terjadi dalam proses pendidikan bagi perempuan di Indonesia ini?

Pendidikan bagi kaum perempuan baru berkembang sejak sekitar tahun 1900. Pada masa kolonialisme Belanda pendidikan perempuan lebih terorientasi hanya untuk mampu membaca, menulis dan berhitung sedangkan untuk melanjutkan kepada pendidikan tingkat lanjutan memiliki jumlah yang terbatas. Perempuan tersebut lebih banyak diarahkan untuk belajar mengenai tugas rumah tangga seperti memasak, menjahit, menisik, menyulam, mengatur dan memelihara rumah dan pengertian pokok tentang ilmu kesehatan (C.Lekker-cerker,1914).

Meskipun perempuan telah memperoleh pendidikan pada masa itu namun lembaga pendidikan memiliki kecenderungan dimanfaatkan untuk memengaruhi *mainstream* masyarakat bahwa perempuan terletak di bawah hegemoni laki-laki. Pendidikan tersebut juga memperkuat stereotipe kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga semata dan pada taraf tertentu perempuan tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengikuti pendidikan formal. Kemudian bagaimana pula dengan realita pendidikan perempuan saat ini?

Dalam perkembangan sosial kemasyarakatan perempuan Indonesia ada dimensi kontinuitas dan diskontinuitas. Kontinuitas yang dimaksud adalah tetap adanya pola tradisional dalam kehidupan perempuan meskipun telah mengalami pendidikan tinggi dan modern. Dalam arti ada dua sisi dikotomis dalam kehidupan perempuan Indonesia, disatu pihak status dan peranan perempuan memiliki perkembangan yang lebih maju namun dipihak lain akar status dan peran perempuan sebagai orang kedua tetap dipertahankan. Dan hasil sensus 1990 menunjukkan bahwa golongan umur 25-30 tahun sedikit sekali perempuan mengikuti proses pendidikan.

Beberapa kasus dalam dunia pendidikan menggambarkan adanya sexism yang dipengaruhi oleh berbagai pandangan stereotipe seperti, sejumlah buku teks yang ditentukan oleh Depdikbud untuk Sekolah Dasar terdapat pengaruh pandangan stereotipe yang terkait dengan gender yaitu perempuan adalah

pekerja rumah tangga, dan laki-laki adalah pencari nafkah/ bekerja di luar rumah. Hal semacam ini tergambar pada buku pelajaran serta kegiatan instruksional, misalnya perempuan tidak berbakat menjadi ilmuwan yang secara tidak langsung juga mengesankan bahwa perempuan tidak cocok mengembangkan ilmu yang lebih tinggi.

Peran gender yang terkait dalam buku teks tersebut memperlihatkan suatu pola yang konsisten dan jelas berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di mana keluarga yang ideal terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga yang bekerja di luar rumah dan ibu selalu ada di rumah dan di dapur yang dibantu oleh putri-putrinya, sedangkan anak laki-laki membantu ayah dalam kegiatan ekonomi untuk mencari nafkah keluarga.

Lebih lanjut, dalam bidang studi tersebut, ada gejala “bidang studi yang dianggap khas buat laki-laki” seperti matematika, teknik dan “bidang studi yang khas untuk perempuan” seperti kesusastraan. Adanya dampak “sexisme” dalam kurikulum pendidikan, peran dan kebijaksanaan pendidikan sangat diperlukan dalam rangka mengawasi terjadinya pembentukan seksist yang lebih lanjut dalam dunia pendidikan.

Dalam dunia perguruan Tinggi, lembaga yang merupakan tempat berkumpulnya para intelektual yang umumnya memiliki pengetahuan luas, dalam realitasnya pengaruh pandangan stereotipe juga mendominasi dalam kehidupan mereka. Contoh, pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), ada kecenderungan pembagian tugas berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan kapasitas dan kualitas dari masing peserta. Dalam hal ini mahasiswa perempuan lebih ditempatkan pada posisi yang kurang memberi “nilai kreatif” sebagai mahasiswa KKN dan anggota masyarakat, mereka lebih dominan ditugaskan pada penyiapan konsumsi, memasak air, menanak nasi, ke pasar sedangkan pria lebih berperan pada kegiatan di luar “Camp” ke instansi yang secara langsung tidak mendapatkan kesempatan akan pengalaman baru dan akses jaringan sosial.

Hal yang sangat riskan, ketika ada anggapan bahwa dosen perempuan tidak perlu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, hal ini tidak lepas dari adanya anggapan laki-laki adalah pencari nafkah sehingga perlu pendidikan tinggi sehingga yang didahulukan dan diprioritaskan untuk mendapat kesempatan bea siswa melanjutkan pendidikan S2 dan S3. Salah satu upaya pendidikan responsif gender adalah adanya kesadaran tanggung jawab kita bersama dalam melakukan "*reinforcement*" terhadap pengaruh stereotipe yang terkait dengan dunia pendidikan dan gender. Praktik "*Silent Diskrimination*" terhadap perempuan dalam dunia pendidikan ini mutlak dikikis, bukan diwaktu mendatang melainkan mulai dari sekarang.

Anak remaja sekarang suka dalam kehidupan yang berkelompok dengan istilah *Geng*. Alasan-alasan mengapa para siswa bergabung dalam sebuah geng, karena mereka ingin merasa penting dan "merasa diterima". Mereka takut pada orang lain dan merasa terlindungi dalam geng. Bergabung dengan geng merupakan pemberontakan terhadap orangtua, sekolah, dan masyarakat. Kelihatan menyenangkan dan menarik. Mereka biasanya adalah orang yang rendah diri, punya nilai mata pelajaran yang buruk, atau karena masalah kemiskinan. Namun kehidupan "geng" sering menghasilkan tingkah laku yang merusak dan berpotensi berbuat kekerasan. Keinginan yang kuat untuk diterima orang lain dan sering mengarah kepada godaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama anggota geng yang lain yang melawan hati nurani dan perintah Allah, misalnya seks, minum minuman keras, dan penggunaan obat-obat terlarang.

Nilai pendidikan multikultural diberikan dengan prinsip misalnya yakinkan diri bahwa kita adalah ciptaan Allah yang berharga dan diberi bakat-bakat serta talenta, berjuanglah sampai berhasil, berbicaralah dengan seorang dewasa atau kelompok tentang ketakutan-ketakutan dan tekanan-tekanan yang dihadapi. Selanjutnya libatkan diri dengan kegiatan-kegiatan se-

hat, seperti olah raga, klub-klub atau kelompok belajar dan pilih teman-teman yang bijaksana.

Pemahaman yang benar tentang keanekaragaman di antaranya dengan berpandangan bahwa Tuhan itu Maha kreatif dan Dia menciptakan beragam hal untuk memperindah dunia ini. Dalam hal ini kita unik dan saling melengkapi dengan adanya perbedaan, serta tidak membosankan “Meski berbeda, tetapi bisa satu”. Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang berdasarkan ciri khas masing-masing. Kemuliaan seseorang dinilai berdasarkan ketakwaan kepada-Nya serta mengamalkan kebenaran. Terkait dengan banyaknya konflik di negeri ini perlu disadari bahwa konflik pasti akan terjadi. Kalau kita sadar bahwa akan menghadapi konflik, kita tidak akan kaget ketika menghadapinya. Konflik adalah kesempatan untuk menjadi dewasa. Jika bisa mengelola konflik dengan baik, kita punya kesempatan untuk mendewasakan sikap kita. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengelola konflik, yang terjadi adalah kita akan mengalami krisis hubungan dengan orang lain. Respon kita terhadap konflik akan menentukan apakah kita terpeleset atau mengambil jalan damai.

Jika pandai mengelola dan menyelesaikan konflik, kita akan mendapatkan keuntungan di antaranya hati tenang. Dengan berusaha menyelesaikan konflik, hubungan kita semakin dekat dengan pihak yang berkonflik itu, sehingga setelah konflik itu selesai, pertemanan atau persahabatan kita semakin erat. Selanjutnya menghindari (menyangkal, menyalahkan dan melarikan diri) dari konflik bukanlah sikap yang benar. Menyerang (mencela, gosip, berkelahi) adalah sikap saat kita mencoba menekan orang lain agar cara kita yang diterima. Sikap yang terbaik dalam menghadapi konflik adalah berdamai, yaitu bersikap: melupakan, berbicara empat mata dan meminta bantuan orang ketiga.

Belakangan ini sering muncul konflik sosial dan kekerasan yang mengakibatkan keresahan, ketakutan, kecemasan masyarakat mulai dari konflik antar suku/antar agama (konflik Poso,

DAMAI: TUMBUHAN DAN BINATANG = SIMBIOSIS MUTUALISME APALAGI MANUSIA?

Ini kantong semar yang ada di hutan lembah harau , kabupaten lima puluh kota Sumatera Barat. Air yang ada dalam antong sering difungsikan oleh para petualang yang masuk hutan untuk minuman jika mereka kehausan. Istilah biologi tumbuhan adalah *Genus Nepenthes*, merupakan tumbuhan yang banyak bersemi di sekeliling tebing indah di Lembah Harau dan juga ditemukan di sepanjang jalur perjalanan menuju Goa Seribu Lembah Harau ini.

Di dalam kantong semar ini hidup koloni semut, semut bebas bergerak dan mengambil sisa-sisa makanan dan bahan makanan lainnya dari tumbuhan ini. Kerja sama semut dan kantong semar ini bermanfaat bagi kedua belah pihak , ada hubungan simbiosis mutualisme. Kantong semar menyisakan jaringan tertentu dan sisa-sisa serangga untuk semut dan umpan balik dari semut, semut melindungi tumbuhan dari musuh, dan sepertinya semut juga dianggap sebagai petugas kebersihan, begitu dengan kantong semar dengan kelelawar, Kelelawar berbulu wol (genus *Kerivoula*) diketahui bersimbiosis dengan kantong semar. Kelelawar tersebut tidur di dalamnya sambil melindungi diri dari serangga yang akan tergelincir jatuh ke dalam kantong semar. Selain itu, kotoran kelelawar juga bernutrisi bagi kantong semar (<http://id.wikipedia.org/w/index>). Tumbuhan dengan binatang bisa hidup bersama secara damai apalagi manusia yang memiliki akal, namun realitanya masyarakat Indonesia dengan kemajemukannya cukup banyak konflik yang terjadi.



*Kantong semar semut
(Dokumentasi: Roland, 2013)*

Sambas, Ambon, Papua, Aceh), konflik antar kelompok sosial dan antar geng, konflik antar sekolah dan lain sebagainya. Artinya konflik sudah melibatkan orang dalam segala aspek umur, tua dan muda. Fenomena ini mengingatkan kita, arti penting pendidikan multikultural untuk diajarkan dalam dunia pendidikan. Jadi pendidikan multikultural perlu dikembangkan dan

diberlakukan dalam rangka damai negeri ini dan tidak konflik lagi dan tak ada lagi dendam satu sama lainnya. Secara esensi pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menanamkan nilai saling menghargai, mencintai dan keadilan, dengan kata lain pendidikan perdamaian adalah wujud pendidikan kepada generasi agar memiliki kecerdasan sosial budaya.

Kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan, nilai, dan aturan yang dimiliki masyarakat secara bersama, oleh masyarakat dijadikan pedoman hidup, ada proses belajar yang terpola, ada sanksi sosial atas ketidaktaatan akan aturan tersebut dan ada simbol yang bermakna. Kecerdasan sosial budaya tidak lain adalah menerapkan wujud kebudayaan berupa nilai-nilai, aturan dan pengetahuan yang dipedomani oleh masyarakat tersebut. Pada hakikatnya kecerdasan sosial budaya ini meliputi ranah kognisi, perilaku dan benda hasil dari pada manusia.

Tujuan pendidikan perdamaian ini adalah bagaimana menimbulkan dialog yang harmonis, mengenal dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada sehingga muncul rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Melalui pendidikan perdamaian ini diharapkan akan muncul modal sosial budaya suatu bangsa. Merujuk pada Nilai Dasar Perdamaian, maka contoh untuk kurikulum responsif gender di sekolah dapat dilihat pada Tabel 3 sebagaimana dikemukakan oleh Erick Lincoln dan Irvan Amalee (2010).

Di sisi lain, dalam pembelajaran mata pelajaran yang ada di sekolah hendaknya dikembangkan perspektif gender dalam pembelajaran berwawasan multikultural, yang arti setiap materi pembelajaran ditanami nilai-nilai toleransi dan kebersamaan antara laki-laki dan perempuan (lihat Tabel 4).

Model yang ditawarkan pada Tabel 4 dapat diterapkan dalam bidang-bidang studi tertentu yang relevan. Jika memungkinkan bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran ekstrakurikuler. Prinsipnya adalah ide yang telah dirancang dapat direalisasikan melalui pendidikan formal.

Tabel 3. Contoh kurikulum responsif gender

No.	Tema	Tujuan	Inti Materi	Permainan
1.	<p>Mengenal dan Menerima diri</p> <p>"Aku bangga jadi diri sendiri"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami bahwa setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan. 2. Siswa bisa menerima dirinya apa adanya. 3. Siswa memahami bahwa sikap menerima diri sendiri adalah dasar bagi sikap menerima orang lain. 4. Siswa memahami bahwa sikap menerima dan menghormati adalah hal yang paling mendasar dalam mewujudkan perdamaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang diciptakan dengan beberapa karakteristik, ada karakteristik yang negatif dan ada yang positif, ada yang bisa diubah dan ada yang bisa diubah 2. Setiap orang harus belajar mengubah hal yang bisa diubah dan belajar menerima hal yang tidak bisa diubah 3. Kita harus yakin, Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan siapapun, Kita diciptakan Tuhan untuk suatu tujuan, makanya kita harus bersyukur 4. Pandanglah dirimu secara adil dan seimbang, jangan menganggap diri kita lebih tinggi karena hal itu akan membuat kita menjadi sombong, pasti orang tidak akan suka sama kita 5. Tapi juga jangan memandang rendah diri sendiri karena itu membuat kita sulit mendapatkan banyak teman alias minder 6. Kisah teladan tentang rendah hati dan tidak minder. 7. Pemecahan masalah (<i>problem solver</i>) dan nasihat yang diberikan siswa tentang pemahaman mengenal dan menerima diri. 	"Siapa Saya"
2	<p>Prasangka</p> <p>"No Curiga No Prasangka"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami bahwa menjaga prasangka adalah perbuatan mulia. 2. Siswa memahami bahwa prasangka memengaruhi penilaian seseorang terhadap segala sesuatu. 3. Siswa memahami bahwa menilai seseorang itu harus sesuai dengan bukti kebenaran, tidak berdasarkan sangkaan semata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian prasangka. 2. Melihat orang lain dengan menggunakan sinar X. 3. Bahaya prasangka. 4. Kisah teladan tentang menjauhi prasangka. 5. Pemecahan masalah tentang prasangka. 	Memecahkan prasangka (<i>opping prejudice</i>)

No.	Tema	Tujuan	Inti Materi	Permainan
		4. Siswa memahami bahwa prasangka baik dapat memelihara pertemanan, persaudaraan dan perdamaian, sebaliknya prasangka buruk hanya akan menyebabkan permusuhan.		
3.	Keragaman Etnis "Beda kebudayaan tetap berteman"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami bahwa keragaman etnis, suku adalah anugerah yang di berikan Tuhan. 2. Siswa memahami bahwa bersikap atau berprasangka buruk terhadap identitas etnis lainnya hanya menciptakan ketidaknyamanan. 3. Siswa memahami bahwa keutamaan serta kemuliaan seseorang tidak berdasarkan asal etnisnya. 4. Siswa mampu menyikapi keragaman etnis dengan bijaksana. 5. Siswa memahami bahwa keragaman etnis merupakan modal untuk menciptakan kerja sama yang dinamis, membangun perdamaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan antarsuku bukanlah bahan perselisihan tetapi untuk belajar saling memahami. 2. Setiap suku punya keunikan masing-masing, dalam setiap adat dan kebudayaan, pasti ada yang baik, ada juga yang kurang baik. 3. Semua manusia sama dihadapan Allah, tidak ada suku yang unggul dan kurang unggul 4. adang kita mempunyai labeling untuk suatu suku, Suku A malas, Suku B orang pelit, padahal itu hanya prasangka atau dikarenakan kita tidak memiliki semangat relativisme kebudayaan, memahami kebudayaan orang lain, sebagaimana orang tersebut memandang kebudayaan sehingga tidak menimbulkan prasangka dan salah tafsir terhadap kebudayaan orang lain 5. Kisah teladan tentang keragaman etnis. 6. Pemecahan masalah (<i>problem solver</i>) dan nasihat yang diberikan siswa tentang keragaman etnis. 	Permainan tentang sukuisme "Dunia suku"
4.	Perbedaan Agama	1. Siswa memahami bahwa perbedaan agama dan keyakinan adalah sebuah kenyataan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat. 2. Ada banyak kemiripan dalam agama-agama. Misalnya, dalam agama Islam, Kristen, Konfusius, Buddha, ada ajaran yang sama tentang memperlakukan orang lain. 	

No.	Tema	Tujuan	Inti Materi	Permalnan
	<p>"Beda keyakinan nggak usah musuhan"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Siswa memahami bahwa setiap orang berhak memilih agama dan keyakinannya, tanpa paksaan dalam memilihnya. 3. Siswa mengetahui cara terbaik menghormati serta menyikapi perbedaan agama ini. 4. Siswa memahami keberadaan setiap agama agar mampu menciptakan dan menata perdamaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Namun, ada perbedaan mendasar yang diajarkan agama, misalnya persoalan tentang menjalani hidup yang benar, persoalan masuk surga, kitab suci, dan tentang para nabi. 4. Membuktikan kebenaran agamamu dalam praktik keseharian, berbicara keyakinan secara dialogis dan saling menghormati lebih baik daripada menghabiskan waktu dengan saling menjelekkan, menindas, dan melawan satu sama lain. 5. Kita tidak boleh menggunakan kekerasan untuk memaksa seseorang menganut suatu agama atau kepercayaan. 6. Kisah teladan tentang perbedaan agama. 7. Pemecahan masalah tentang perbedaan agama. 	
5.	<p>Laki-laki dan perempuan</p> <p>"Laki-laki perempuan sama-sama manusia"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sepadan oleh Allah. 2. Siswa memahami baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban mengerjakan amal saleh. 3. Siswa memahami perbedaan yang ada dalam diri laki-laki atau perempuan adalah untuk saling melengkapi. 4. Siswa memahami tindakan yang harus dilakukan dan yang mesti dihindari antara laki-laki dan perempuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah secara sepadan, jadi mereka harus saling memperlakukan dengan adil. 2. Hormati dan hargai hak-hak orang yang berbeda jenis kelamin. Hanya untuk laki-laki: Jangan melecehkan, mendiskriminasi atau mengintimidasi (menakut-nakuti, mengancam kaum yang lebih lemah secara fisik). <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Melecehkan:</i> Bersuit-suit pada seorang gadis yang berjalan sendirian, mencolek, menganggap perempuan sebagai objek seksual semata-mata. Pornografi juga salah satu cara tidak langsung melecehkan perempuan. Sebuah angket memperlihatkan bahwa 91 persen siswa perempuan merasa tidak suka atau terganggu ketika digoda oleh anak laki-laki dengan cara seperti bersuit-suit, memanggil-manggil, dan lain-lain. 	

No.	Tema	Tujuan	Inti Materi	Permainan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Diskriminasi</i>: Selalu menganggap semua perempuan tidak bisa mengerjakan semua hal, kecuali pekerjaan rumah saja, seperti memasak, menjahit, mengurus anak, dan lain-lain. Tidak mau melibatkan perempuan dalam kegiatan yang memerlukan kekuatan fisik karena menganggap perempuan lemah. ▪ <i>Intimidasi</i>: Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam, memaksa perempuan agar menuruti apa yang diperintahkan. Jika tidak mau, mereka dipukuli. <p>Hanya untuk perempuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mempermainkan</i>: Sering perempuan mempermainkan laki-laki, baik dengan maksud agar diperhatikan atau sekadar menyakiti perasaan teman laki-laki. ▪ <i>Membeda-bedakan teman</i>: Dalam berteman, baik laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan sama secara adil. ▪ <i>Menyakiti dengan kata-kata</i>: Membalas perbuatan yang menyakiti perempuan dengan mengucapkan kata-kata tajam, sinis, dan menyakitkan hati laki-laki. <p>Laki-laki dan perempuan harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengerti dan menghargai peran dan perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan. Sebaliknya perlakukan orang yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. ▪ Bergaul dengan sehat, sepenuh hati, namun tahu batas-batas dalam bergaul. <p>3. Kisah teladan tentang laki-laki dan perempuan. 4. Pemecahan masalah tentang laki-laki dan perempuan.</p>	

No.	Tema	Tujuan	Inti Materi	Permalnan
6.	<p>Status Ekonomi</p> <p>“Kaya nggak sombong, miskin nggak minder”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah amanah dalam kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan. 2. Siswa memahami bahwa semua orang, baik kaya maupun miskin, terdapat godaannya masing-masing. 3. Siswa memahami bahwa beramal saleh, berbuat adil, saling mengasihi adalah kewajiban semua orang, baik kaya maupun miskin. 4. Siswa memahami bahwa status tidak ditentukan oleh nilai materiil miskin dan kayanya seseorang. 5. Siswa memahami bahwa kelebihan dan kekurangan sebagai sarana untuk saling menolong satu sama lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa diberi pengertian bahwa siapapun, tanpa memandang harta, tahta dan jabatan akan berinteraksi satu sama lainnya. Tahu peran dan posisi tiap dalam diri dalam kehidupan adalah penting adanya. 2. Hal-hal penting dalam menyikapi kaya dan miskin: <ol style="list-style-type: none"> a. Jangan menghargai atau tidak menghargai seseorang dengan apa yang mereka miliki, karena hidup orang tidak bergantung pada hartanya. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Allah, kerja keras, dan kesempatan merupakan faktor yang menentukan kita bisa menjadi kaya. ▪ Allah, kurang kesempatan, keputusan yang salah, dan musibah merupakan faktor membuat kita menjadi miskin ▪ Orang kaya belum tentu lebih baik atau lebih bahagia daripada orang miskin b. Orang kaya dan orang miskin sama-sama menghadapi godaan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Godaan orang kaya: kesombongan, menindas, keserakahan, kurang bergantung kepada Allah. ▪ Godaan orang miskin: iri hati, suka mengkritik (syirik), keserakahan, kehilangan harapan pada Allah c. Belajar untuk bergaul dengan orang-orang dari semua tingkat ekonomi. Kita dapat belajar satu sama lain dan saling membantu. Kebaikan hati, kasih, dan kejujuran lebih berharga daripada emas. d. Kisah teladan tentang menjauhi status ekonomi. e. Pemecahan masalah tentang status ekonomi. 	

No.	Tema	Tujuan	Inti Materi	Permainan
7.	<p>Kelompok dan geng</p> <p>“Kalau gentleman, nggak usah nge-geng”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami bahwa pada dasarnya kedudukan geng tidak baik dan tidak mendidik. 2. Siswa memahami bahwa bergabung atau membuat geng mengakibatkan perpecahan dan ketidakharmonisan. 3. Siswa memahami bahwa aktualisasi diri tidak mesti lewat kelompok-kelompok geng. 4. Siswa memahami bahwa hidup ini harus diarahkan untuk kesatuan demi mencapai perdamaian di antara sesama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan-alasan mengapa para siswa bergabung dalam sebuah geng: <ol style="list-style-type: none"> a. Merasa ingin merasa penting dan “merasa diterima”. b. Mereka takut pada orang lain dan merasa terlindungi dalam geng. c. Bergabung dengan geng merupakan pemberontakan terhadap orangtua, sekolah, dan masyarakat. d. Kelihatan menyenangkan dan menarik. e. Mereka biasanya adalah orang yang rendah diri, punya nilai mata pelajaran yang buruk, atau karena masalah kemiskinan. 2. Bahaya dari geng-geng: <ol style="list-style-type: none"> a. Sering menghasilkan tingkah laku yang merusak dan berpotensi berbuat kekerasan b. Keinginan yang kuat untuk diterima orang lain dan sering mengarah kepada godaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama anggota geng yang lain yang melawan hati nurani dan perintah Allah, misalnya seks, minum minuman keras, dan penggunaan obat-obat terlarang c. Akan memperoleh reputasi sebagai anak nakal, termasuk membatasi hubungan dengan siswa-siswa lain yang berjuang untuk hidup sehat. d. Sikap menyingkirkan dan meninggalkan teman-teman yang tidak termasuk di dalam geng atau yang menjadi bagian dari geng lain. e. Mengira akan mendapat kebebasan dengan masuk sebuah geng, padahal sebenarnya malah menjadi seorang budak dari geng atau yang menjadi bagian dari geng lain. 	

No.	Tema	Tujuan	Inti Materi	Permainan
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Cara agar bisa tetap bebas dari cengkraman geng-geng dan kelompok eksklusif: <ol style="list-style-type: none"> a. Yakinkan diri bahwa kita adalah ciptaan Allah yang berharga dan diberi bakat-bakat serta talenta b. Berjuanglah sampai berhasil dan isilah kehidupan dengan sikap yang sehat dan produktif c. Bicara dengan seorang dewasa atau kelompok tentang ketakutan-ketakutan dan tekanan-tekanan yang dihadapi. Jujurlah. d. Libatkan diri dengan kegiatan-kegiatan sehat, seperti olah raga, klub-klub atau kelompok belajar. e. Pilih teman-teman yang bijaksana. 4. Ciri-ciri kelompok yang tidak sehat: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak mengizinkan orang lain masuk atau tidak mau orang lain bergabung. b. Menghabiskan terlalu banyak waktu bersama-sama gengnya c. Orang lain merasa dilukai ketika dengan sengaja disisihkan 5. Kisah teladan tentang kelompok dan geng. 6. Pemecahan masalah kelompok dan geng. 	
8.	Memahami Keragaman "Indahnya perbedaan"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami bahwa keragaman adalah hasil kreasi Allah yang Maha Pencipta. 2. Siswa memahami bahwa keragaman merupakan sebuah nikmat yang sangat berharga. 3. Siswa memahami bahwa dengan keragaman, akan tercipta keserasian serta keindahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman yang benar tentang keanekaragaman <ol style="list-style-type: none"> a. Allah itu Maha kreatif dan Dia menciptakan beragam hal untuk memperindah dunia ini. b. Kita menjadi unik dan saling melengkapi dengan adanya perbedaan, serta tidak membosankan. c. Meski berbeda, tetapi bisa satu. 2. Allah tidak membeda-bedakan orang berdasarkan ciri khas masing-masing. 	

No.	Tema	Tujuan	Inti Materi	Permainan
		4. Siswa mampu memahami tata cara menyikapi dan mengoptimalkan keragaman guna tercipta keharmonisan.	3. Kemuliaan seseorang dinilai berdasarkan ketakwaan kepadanya serta mengamalkan kebenaran. 4. Kisah teladan tentang memahami keragaman 5. Pemecahan masalah tentang memahami keragaman.	
9.	Menghadapi Konflik "Konflik bikin kamu makin dewasa"	1. Siswa memahami bahwa kita tidak bisa menghindar dari konflik. Mereka juga sadar bahwa konflik adalah kesempatan untuk pendewasaan diri. 2. Siswa mengetahui berbagai sikap yang biasa dilakukan orang dalam menghadapi konflik. 3. Siswa mengetahui sikap terbaik dalam menghadapi konflik.	1. Sadar bahwa konflik pasti akan terjadi. Kalau kita sadar bahwa akan menghadapi konflik, kita tidak akan kaget ketika menghadapinya. 2. Konflik adalah kesempatan untuk menjadi dewasa. Jika bisa mengelola konflik dengan baik, kita punya kesempatan untuk mendewasakan sikap kita. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengelola konflik, yang terjadi adalah kita akan mengalami krisis hubungan dengan orang lain. 3. Respons kita terhadap konflik akan menentukan apakah kita terpeleset atau mengambil jalan damai. 4. Konflik ibarat simpang 9, membuat kita mudah tergelincir kepada tindakan ekstrem yang tidak sehat. Dengan melihat simpang 9 ini, kita bisa mendapat gambaran bahwa setiap respon kita akan menentukan akibat yang akan kita terima. 5. Jika pandai mengelola dan menyelesaikan konflik, kita akan mendapatkan keuntungan: <ol style="list-style-type: none"> Hati kita jadi semakin bersih. Kita semakin dekat dengan Allah. Waktu kita berusaha menyelesaikan konflik, hubungan kita semakin dekat dengan pihak yang berkonflik itu sehingga setelah konflik itu selesai, pertemanan atau persahabatan kita semakin erat. 	

No.	Tema	Tujuan	Inti Materi	Permainan
			<ol style="list-style-type: none"> 6. Menghindar (menyangkal, menyalahkan dan melarikan diri) dari konflik bukanlah sikap yang benar. 7. Menyerang (mencela, gosip, berkelahi) adalah sikap saat kita mencoba menekan orang lain agar cara kita yang diterima. 8. Sikap yang terbaik dalam menghadapi konflik adalah berdamai, yaitu bersikap: melupakan, berbicara empat mata dan meminta bantuan orang ketiga. 9. Kisah teladan tentang menghadapi konflik. 10. Pemecahan masalah konflik. 	
10.	<p>Tentang Kekerasan</p> <p>"Pake otak, jangan maen otot!"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami pada dasarnya kekerasan hanya akan menimbulkan permusuhan dan kesengsaraan. 2. Siswa memahami bahwa kekerasan harus disikapi dengan hati-hati dan bijaksana, bukan dengan kekerasan lagi. 3. Siswa memahami banyak kerugian yang didapat dari kekerasan; kekacauan, hilangnya kesempatan berdamai, serta perasaan bersalah. 4. Siswa memahami pelbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang nyata ataupun dikemas oleh media massa. 5. Siswa mampu menyikapi kekerasan serta memahami tata cara menyelesaikan kekerasan secara damai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekacauan-kekerasan membawa kepada lebih banyak lagi kekerasan dan dengan cepat situasi menjadi tidak terkendali. Pada akhirnya kekerasan akan mengakibatkan kerusakan dan meninggalkan kesakitan. 2. Kehilangan kesempatan untuk berdamai-kekerasan membuat masalah menjadi lebih besar dan semakin parah. 3. Perasaan tidak enak; setiap orang yang terjebak di jalan kekerasan akan dipenuhi dengan perasaan takut, bersalah, dan dendam. 4. Kisah teladan tentang kekerasan. 5. Pemecahan masalah tentang kekerasan. 	Bangun menara dalam perang

No.	Tema	Tujuan	Inti Materi	Permainan
11.	Mengakui Kesalahan "Nggak gengsi ngaku salah"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami bahwa minta maaf merupakan cermin kejujuran dan keberanian. 2. Siswa memahami bahwa mengakui kesalahan termasuk akhlak mulia. 3. Siswa memahami tata cara yang tepat lagi benar dalam meminta maaf. 4. Siswa memahami dan menyadari bahwa mengakui kesalahan adalah salah satu cara menyelesaikan masalah dengan damai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suatu konflik tidak pernah bakal selesai kalau tidak ada satu pihak yang mau mengakui kesalahannya. 2. Mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah hal yang berat dilakukan, diperlukan keberanian dan kejujuran. Maka, mintalah pertolongan Allah agar memberi kekuatan kepada kita untuk melakukannya. 3. Mengakui kesalahan dengan tepat dilakukan dengan perkataan yang tepat pula. 4. Begitu pula bila meminta maaf perlu kata-kata tepat dan jujur. 5. Jangan meminta maaf untuk perbuatan yang tidak kamu lakukan. 6. Perbuatan salah orang lain bukanlah tanggung jawabmu. 7. Kadang-kadang ketika kamu berpikir bahwa setelah mengakui, meminta maaf dan meminta pengampunan, secara otomatis kamu akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatanmu. Ini tidak benar. 8. Jika orang yang kamu mintai maaf sangat sulit memaafkanmu, sebaiknya tanya dirimu, apakah kamu tulus meminta maaf? Jika kamu belum tulus, cobalah lagi dan kali ini buatlah pengakuan secara tulus dan murni. 9. Ketika kamu berdosa karena salah memilih tindakan, kamu perlu belajar untuk membuat pilihan yang berbeda kelak. 10. Kisah teladan tentang mengakui kesalahan 11. Pemecahan masalah tentang mengakui kesalahan 	
12.	Memaafkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa dapat memahami bahwa setiap orang atau siapa pun suatu waktu pasti melakukan kesalahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa diberi pengertian bahwa pada dasarnya, siapa pun bisa melakukan kesalahan. Sebaliknya, siapa pun bisa memaafkan kesalahan orang lain. 	

No.	Tema	Tujuan	Inti Materi	Permainan
	"Nggak pelit memberi maaf"	<ol style="list-style-type: none"> 2. Siswa dapat memahami bahwa keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Memaafkan adalah sifat mulia dan solusi dalam menyelesaikan pertengkaran. 3. Siswa memahami bahwa tidak akan ada kerugian sama sekali dengan memaafkan, bahkan menjadi gerbang perdamaian dengan sesama. 4. Siswa memahami empat janji untuk memaafkan dengan benar. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bila seseorang memberikan kebaikan pada saat dirinya kecewa adalah lebih mulia daripada memberikan kebaikan dalam keadaan biasa. 3. Memberi maaf berarti memperbaiki kenyataan. Mengambil pelajarannya lebih berguna daripada melupakannya begitu saja. 4. Memaafkan tidak terbatas waktu dan tempat. Karena memaafkan adalah sikap yang mulia, kapan pun memaafkan dilakukan bisa jadi awal penyelesaian. 5. Memaafkan adalah suatu keputusan. 6. Memberi maaf bisa dilakukan pada satu saat, tetapi merealisasikannya adalah sebuah proses. 7. Kisah teladan tentang memaafkan. 8. Pemecahan masalah tentang memaafkan. 	

Tabel 4. Contoh tema pembelajaran berwawasan multikultural

No.	Tema	Tujuan
1.	Mengenal dan Menerima Diri "Aku bangga jadi diri sendiri"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siswa memahami bahwa setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan ▪ Siswa bisa menerima dirinya apa adanya ▪ Siswa memahami bahwa sikap menerima diri sendiri adalah dasar bagi sikap menerima orang lain ▪ Siswa memahami bahwa sikap menerima dan menghormati adalah hal yang paling mendasar dalam mewujudkan perdamaian
2.	Prasangka "No Curiga No Prasangka"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siswa memahami bahwa menjaga prasangka adalah perbuatan mulia ▪ Siswa memahami bahwa prasangka memengaruhi penilaian seseorang terhadap segala sesuatu ▪ Siswa memahami bahwa menilai seseorang itu harus sesuai dengan bukti kebenaran, tidak berdasarkan sangkaan semata ▪ Siswa memahami bahwa prasangka baik dapat memelihara pertemanan, persaudaraan dan perdamaian, sebaliknya prasangka buruk hanya akan menyebabkan permusuhan
3.	Laki-laki dan Perempuan "Laki-laki perempuan sama-sama manusia"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siswa memahami baik laki-laki maupun perempuan diciptakan sepadan oleh Allah ▪ Siswa memahami baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban mengerjakan amal saleh ▪ Siswa memahami perbedaan yang ada dalam diri laki-laki atau perempuan adalah untuk saling melengkapi ▪ Siswa memahami tindakan yang harus dilakukan dan yang mesti dihindari antara laki-laki dan perempuan.

C. PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI LUAR SEKOLAH DAN RUMAH TANGGA

Pendidikan responsif gender pada bagian ini adalah bagaimana pendidikan yang berkeadilan gender itu terjadi di lingkungan selain keluarga dan sekolah. Artinya, pendidikan yang responsif gender di tempat-tempat umum harus menjadi perhatian tersendiri bagi seluruh komponen masyarakat. Meskipun demikian, tanggungjawab ini seharusnya lebih banyak diprakarsai dan dilakukan intervensinya oleh Negara. Tanggung jawab menteri pemberdayaan perempuan dengan bekerja sama dengan kementerian terkait lain harus mampu merancang *master plan* yang bersinergi dalam rangka menerapkan pendidikan yang responsif gender di luar keluarga dan sekolah.

Pelecehan seksual bisa terjadi terhadap siapa saja, tak peduli laki-laki maupun perempuan. Namun tidak bisa dinafikan bahwa mayoritas dari korbannya adalah perempuan. Tempatnya kejadiannya tidak spesifik pada tempat tertentu karena bisa terjadi di mana saja dalam kondisi apapun. Namun belakangan ini, kasus pelecehan seksual yang terjadi di tempat umum dan kendaraan umum mencuat. Hal ini membuat beberapa pihak mulai melakukan aksi untuk melindungi perempuan, tak terkecuali pemerintah. Kendaraan umum seperti kereta api, bus antar kota dan bus dalam kota seperti Trans Jakarta, mulai menyediakan tempat khusus bagi perempuan walaupun itu belum efektif.

Pelecehan seksual terhadap perempuan bisa terjadi di mana-mana, di lingkungan tempat kerja, dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja. Bentuk pelecehan seksual bisa bermacam-macam, baik verbal maupun non-verbal. Pelecehan seksual di tempat kerja dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara spesifik dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran.

Pelecehan seksual di tempat kerja juga termasuk melakukan diskriminasi dalam hal promosi jabatan, misalnya dalam pemberian tugas. Dalam kenyataannya, reaksi terhadap kasus pe-

lecehan seksual lebih banyak korbannya bersikap diam, karena takut dipecat apabila mengadu. Contoh lain dari beberapa bentuk pelecehan seksual yang lebih ekstrem adalah mengintimidasi dan mengancam korban untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat membuat korban tidak nyaman seperti melakukan hubungan seksualitas.

Kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang pernah terjadi di antaranya, yang dilakukan oleh sesama anggota DPRD Pematang Siantar, Jesika Pratiusi Sidabolak (23 tahun). Korban dilecehkan bahkan hampir diperkosa oleh DT di dalam kamar hotel di Pematang Siantar (*news.okezone.com/read/2014/10/21/1340/1105500/golkar-sumut_bungkam_atas_pelecehan_yang_dilakukan_kadernya*). Kemudian kasus pelecehan seksual yang dilakukan gubernur Riau beberapa waktu lalu.

Jakarta termasuk lima besar kota-kota di dunia yang sistem transportasinya paling tidak aman buat perempuan, selain Meksiko, Lima, New Delhi, dan Bagala. Hal ini terungkap dari hasil survey Thomson Renters Foundation tentang pelecehan pada sistem transportasi umum di kota-kota besar (*palembang.tribunnews.com/2014/10/31/para_wanita_berhati-hati_naik_angkutan_umum_di_Jakarta*).

Tempat-tempat rawan lainnya terjadi pelecehan seksual adalah bus kota, bus antarkota, angkot, kereta api, dan stasiun bus. Contoh pelecehan seksual di bus Transjakarta terlihat pada kasus berikut:

Kali ini yang menjadi korban SSN (24), seorang mahasiswa, warga Tangerang, Banten. Ia menjadi korban saat menggunakan bus Transjakarta, Minggu (30/3/2014) pukul 14.00. Saat itu, ia dalam perjalanan menuju Stasiun Kota dari Blok M. Menurut rencana, dari Stasiun Kota ia akan menggunakan kereta api untuk pulang ke Tangerang. Korban mengalami pelecehan seksual ketika bus akan memasuki halte Harmoni. Pelakunya seorang pengangguran bernama Oktavianus (36), yang mengaku warga Cawang, Jakarta Timur.

"Dia ditangkap massa setelah korban berteriak minta tolong. Massa lalu membawa pelaku ke kantor polsek. Saya lihat, para penangkap tidak menghakimi pelaku. Ini bagus. Mereka menangkap pelaku lalu langsung membawanya ke polsek," kata Kapolsek Metro Gambir Ajun Komisariss, Besar Agung Marlianto, Senin petang kemarin.

Kepada polisi, SSN menjelaskan, pelaku melakukan kejahatannya sebelum bus memasuki halte Harmoni. Pelaku menggesek-gesekkan kemaluan ke pantat korban. Awalnya, korban tidak terlalu menyadari. Ia menyangka itu ketidaksengajaan karena penumpang bus banyak. Korban memang berdiri di bagian dekat pintu keluar. Korban lalu bergeser untuk membuat jarak. Ternyata pelaku ikut bergerak dan makin menggesek-gesekkan kemaluan ke pantat korban. Menyadari hal itu bukan suatu ketidaksengajaan, korban lantas berbalik menghadap pelaku.

Alangkah terkejutnya SSN. Sebab, dia melihat pelaku sudah mengeluarkan kemaluannya dari celana. Korban menjerit dan meminta tolong. Tak ayal, penumpang lain bereaksi dengan menangkap dan di antaranya ada yang memukul pelaku. Petugas Transjakarta segera mengamankan pelaku dan bus sudah sampai di halte Harmoni. Sejumlah orang bersama korban lalu membawa pelaku ke Polsek Metro Gambir.

"Kami hanya menerima laporan korban, lalu korban dan pelaku kami antar ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk keperluan penyidikan," kata Agung Marlianto.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Rikwanto membenarkan terjadi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Oktavianus, warga Cawang, Jakarta Timur. Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Pusat.

"Biasanya yang menjadi korban adalah perempuan atau anak-anak sehingga perlu polwan penyidik yang terlatih dan dididik untuk menangani kasus itu. Saat ini, polwan penyidik dengan kualifikasi itu baru ada di tingkat polres dan polda. Di bawah Unit PPA (polres) dan Subdirektorat Remaja Anak-anak dan Wanita (polda). Tersangka dikenai Pasal 281 KUHP dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 8 bulan," tuturnya.

Tidak terselesaikan

Secara terpisah Kepala Laboratorium Transportasi Universitas Indonesia Ellen S.W. Tangkudung mengatakan, pelecehan seksual di angkutan umum merupakan persoalan sosial yang tidak kunjung terselesaikan. "Sejak saya SMA, kasus pelecehan seksual seperti ini sudah ada," ujarnya. Dia mengatakan, kejadian ini terulang manakala ada kesempatan bagi

pelaku. Padahal, manajemen Transjakarta sudah berupaya memisahkan penumpang perempuan dan laki-laki.

Sementara penumpang transportasi massal di Jakarta masih harus berdesak-desakan, baik di hari kerja maupun di hari libur. Kondisi ini turut membuka peluang terjadinya pelecehan seksual di dalam bus. "Penumpang Transjakarta perlu juga ikut mengawasi perilaku menyimpang dengan saling berteriak atau melawan pelaku jika terjadi pelecehan seksual seperti ini," kata Ellen.

Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum. Ellen menilai, pelaku pelecehan seksual harus mendapatkan hukuman berat agar kasus serupa tidak terulang lagi. "Kalau tidak begitu, nanti yang jera malah penumpang bus. Mereka tidak lagi mau naik angkutan umum karena masih ada pelecehan seksual," ujarnya. (ART/RTS).

(Sumber: Jakarta, Kompas.com, <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/01/0851490/Penumpang.Perempuan.Bus.Transjakarta.Kembali.Jadi.Korban,Selasa,1April2014>)

Dari kasus pelecehan seksual di Transjakarta, seperti yang disampaikan oleh Kepala Laboratorium Transportasi Universitas Indonesia Ellen S.W. Tangkudung, pelecehan seksual di angkutan umum merupakan persoalan sosial yang tidak kunjung terselesaikan dan kejadian ini terulang manakala ada kesempatan bagi pelaku. Padahal, manajemen Transjakarta sudah berupaya memisahkan penumpang perempuan dan laki-laki. Hal lain yang tidak kalah penting juga yaitu hukuman yang berat bagi pelaku karena dalam Pasal 281 KUHP, pelaku hanya diancam pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan.

Selain di Transjakarta juga terjadi di kereta api/KRL, pelecehan seksual di KRL tersebut terlihat pada kasus berikut:

Palmerah, WartaKota

Kasus pelecehan seks di dalam kereta rel listrik kembali menimpa wanita. Sekitar 10 pria mengurung seorang wanita di tengah sesaknya penumpang sambil melecehkannya disertai ejekan dan desahan nakal di telinga. Sungguh biadab!



Cerita kelam tentang pelecehan seksual terhadap kaum hawa di kereta api itu kembali menghentak publik, Selasa (26/4). Mirisnya, aksi pelecehan kali ini dilakukan secara beramai-ramai oleh sekelompok pria di atas Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi dari Bogor menuju Jakarta. Di tengah sesaknya penumpang, sekawanan pria melakukan aksi biadab terhadap seorang karyawan.

Perbuatan tak bermoral itu diceritakan oleh Dina Nirmala, seorang karyawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Karyawan sebuah perusahaan swasta ini mengisahkan sebuah kejadian mengenaskan yang dialami oleh rekan sekantornya. Menurut dia, Selasa pagi rekannya itu datang ke kantor dengan kondisi tak seperti biasanya. Wajahnya tampak murung, sesekali menangis, wajahnya terus tertunduk, dan sekejap tubuhnya gemetar.

Sejumlah rekannya yang melihat kejadian itu merasa heran karena korban yang selalu ceria tiba-tiba tampil seperti itu. Mereka lantas menanyakan apa yang telah terjadi. Dengan susah payah, cerita pahit itu akhirnya terungkap.

"Sambil menangis dan dengan susah payah korban menuturkan pengalaman pahit yang baru saja menimpanya," katanya.

Dikurung 10 Pria

Menurut Dina, saat itu rekannya berangkat kerja dengan menumpang KRL dari Stasiun Universitas Pancasila sekitar pukul 09.00. Kondisi KRL saat itu sangat padat dan penumpang berdesakan. Sebenarnya, saling dorong dan saling senggol antarpemumpang dengan kondisi kereta padat seperti itu adalah hal yang wajar dan dirasakan oleh hampir semua penumpang.

Namun, yang dirasakan korban kemarin sungguh memilukan. Saat

berada di dalam kereta, korban dikurung oleh sekitar 10 penumpang pria. Namun, karyawati swasta itu masih tak curiga karena melihat tampan para pria itu seperti orang baik-baik. "Tampang mereka baik-baik semua, jadi saya tidak curiga apa-apa," ujar korban yang mengenakan jilbab, seperti dituturkan Dina.

Akibat kondisi dalam kereta terus berdesakan dan terjadi pergeseran, korban akhirnya semakin terpojok dan benar-benar dikurung oleh kawan pria tadi. Dan, terjadilah hal yang tak pernah dibayangkan. Salah satu pria yang berada di belakangnya mulai menurunkan tangan.

"Pria itu membuka kancing celana panjangnya, dan (maaf) mengeluarkan alat vital, lalu menggesek-gesekkannya di bagian belakang tubuh korban," kata Dina seperti dilansir VIVAnews.com. Tragisnya lagi, sejumlah pria lain seperti sengaja menutupi aksi yang ada. Ketika korban berteriak minta tolong, tidak ada satu pun yang membantu karena kondisi kereta sangat padat. Korban bahkan memohon agar tindakan itu dihentikan. "Pak, tolong, saya mohon jangan didorong, kereta sudah padat dan saya terjepit," ujar korban.

Ironisnya, gerombolan pria itu malah tertawa. Mereka seperti kegirangan dan mengejek korban sambil terus melakukan aksi bejat itu. "Pria itu bahkan sedikit mendesah dan mengeluarkan kata-kata kotor di kuping korban," kata Dina.

Antara marah, malu, dan kecewa, korban berteriak sambil merangsek ke luar dari kurungan para pelaku menuju ke arah pintu. Setelah bersusah payah, akhirnya korban keluar dari desakan gerombolan laki-laki itu, lalu turun di Stasiun Pasar Minggu. Padahal, kantornya masih jauh, yakni di Tanah Abang.

Korban memilih melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum roda empat.

Trauma dan stres

Kisah pahit ini, kata Dina, diceritakan rekannya itu sambil terus menangis. Korban sangat terpukul, trauma, dan stres dengan kejadian yang tak pernah dibayangkannya itu. Kalaupun akhirnya kasus ini disampaikan, jelas Dina, agar pengalaman menyakitkan yang dialami temannya itu bisa mengingatkan kaum wanita penumpang kereta untuk lebih waspada.

Ia berharap, kasus ini tidak lagi terjadi karena para pelaku telah merendahkan martabat wanita. "Banyak kasus seperti ini, tapi korban tidak berani mengadu," ujarnya. Kalaupun mengadu, Dina bertanya ke mana

harus mengadu. Apakah disampaikan ke PT Kereta Api (KA)? Apakah pasti ada tindakan nyata? Rasanya tidak.

Menurut Dina, biasanya PT KA cenderung menyalahkan korban yang mengadu, ketimbang mencari tahu siapa pelaku pelecehan seks yang kerap bergentayangan di atas kereta. "Biasanya, mereka beralasan dengan mengatakan harusnya korban bisa membela diri. Harusnya korban bisa begini dan begitu, atau yang lebih ekstrim lagi, harusnya jangan naik kereta ekonomi kalau mau nyaman," ungkapny kesal.

Atas nama para wanita, Dina mengatakan sangat berkabung dengan pengalaman rekannya itu. "Sudah berulang kali dikatakan buruk, tetapi mereka (PT KA) seperti bangga akan keburukannya," katanya. Apa yang dialami rekannya itu, unka Dina, hendaknya menjadi pelajaran berharga buat semua orang. Pasalnya, hingga saat ini rekannya itu seperti trauma dan terus membayangkan kejadian itu. Dia, ujarnya, seperti masih merasakan tertawaan dan ejekan jorok orang-orang biadab itu di telinganya. "Sungguh lelaki tidak bermoral, lahir dari batu, mungkin," umpatnya dengan nada tinggi.

Kepala Humas Daop I PT KA Mateta Rizalulhaq akan mengusut kejadian itu dan sudah menginformasikan kepada unit terkait untuk segera menindaklanjuti kasus memalukan ini. Namun, Mateta meminta agar para penumpang tak memaksakan diri bila kereta sudah dalam kondisi sangat penuh.

Mateta berjanji tak akan berhenti meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap penumpang wanita, dengan menyediakan gerbong kereta khusus wanita pada kelas eksekutif atau ekspres. "Ini usaha kami untuk menghindari kejahatan terhadap penumpang wanita," ujarnya.

Selain itu, paparnya, penegakan hukum dianggap menjadi penting. Dia berharap, setiap korban sebaiknya melapor ke petugas yang ada di tiap stasiun atau ke polisi. Sejauh ini, PT KA tak mungkin mengerahkan petugas dalam jumlah banyak di dalam kereta. "Berteriak, menghindar, dan laporkan kepada petugas. Tidak mungkin petugas diam, kalau perlu kami akan hentikan perjalanan kereta," ujarnya.

Perlu Tindakan Tegas

Kasus pelecehan yang terjadi di atas kereta api sangat disayangkan pemerhati hukum Yanti Nurdin. Advokat di Jakarta ini mengatakan, apa pun bentuk pelecehan yang mengarah pada harga diri seseorang, harus ditindak. Tindakan tak terpuji ini, jelasnya, bisa dijerat dengan Pasal

281 dan 282 KUHP dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara. Atau, ujarnya, bisa dijerat dengan perbuatan tak menyenangkan yang diatur dalam Pasal 335 KUHP. "Saya sarankan wanita harus berani berteriak bila digerayangi seperti itu. Beranilah mengungkap masalah yang dilaminya, jangan malah ikut menikmati," tegasnya.

(Sumber: Palmerah, Warta Kota, Penjahat Seks di KRL Mengganas, <https://bravowhisky.wordpress.com/2011/05/03/penjahat-seks-di-krl-mengganas/>, Selasa, 3 Mei 2011)

Pelecehan seksual yang biasa dialami perempuan cenderung terjadi di mana dan kapan saja. Umumnya, pelanggaran kesusilaan ini sering dilakukan di tempat umum, termasuk bus TransJakarta yang kebanyakan penumpangnya adalah karyawan dan kaum terpelajar. Namun, hawa nafsu ternyata tak mengenal pendidikan, bahkan dengan kedok terpelajar, pelecehan di TransJakarta lebih banyak dari kereta api ekonomi. Dalam hal ini perhatian pemerintah sangat diperlukan. Mulai dari menyediakan bus khusus perempuan dan kereta api khusus perempuan. Walaupun sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, namun kenyataannya belum maksimal.

Dari berbagai pelecehan seksual tersebut, terdapat beberapa pemikiran dan teknis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang bias gender dengan pendekatan yang responsif gender, khususnya di luar keluarga dan sekolah. Cara-cara yang dapat menghindari pelecehan seksual di tempat kerja adalah bagian dari pendidikan responsif gender, antara lain:

1. Tempat kerja harus memiliki aturan atau regulasi yang responsif gender, ketika perempuan memenuhi dunia kerja, harus membaca dan memahami regulasi tersebut.
2. Sebelum memasuki dunia kerja harus ada surat perjanjian yang responsif gender, antara lain; peraturan yang jelas tentang pelecehan seksual, prosedur pengaduan, dan sanksi-sanksi bagi para pelaku.
3. Berani mengatakan tidak untuk sikap ajakan yang berkonotasi seksual.

4. Sering kali laki-laki terdoda melakukan pelecehan seksual juga karena perempuan, oleh karena itu, pastikan memakai pakaian yang sopan, dan tertutup saat bekerja. Jangan melakukan hal-hal yang mengundang laki-laki melakukan pelecehan seksual.

Secara umum, pendidikan responsif gender di luar sekolah dan keluarga dapat dilakukan melalui:

1. Adanya pendidikan hak kesehatan seksual produksi yang melibatkan pemerintah, orangtua, sekolah, dan remaja itu sendiri.
2. Pemasangan CCTV di tempat rawan terjadinya pelecehan seksual seperti bus kota, *busway*, kereta api, perkantoran, tempat rekreasi, dan seterusnya.
3. Penerapan kebijakan pemerintah yang responsif gender, penyediaan fasilitas responsif gender, seperti armada bus dan kereta api. Di beberapa tempat di Indonesia kebijakan semacam ini sudah dilaksanakan, seperti di Jakarta dan Pekanbaru, tetapi hanya dalam skala kecil dan terbatas. Kita dapat mencontoh negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

Contoh lainnya dapat dilihat di bawah ini pada perempuan penjual Yakult.

Tulisan ini diilhami, ketika saya menguji skripsi Fitria Fenesa, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam hal ini mahasiswa tersebut mengkaji *Yakult lady* dalam perspektif sosiologi keluarga. Sehingga saya mencoba untuk menganalisisnya dalam perspektif gender dan dengan rasa penasaran, saya mencoba untuk melakukan observasi beberapa kali tentang kehidupan *Yakult lady*.

“Cintailah usumu” diplesetkan “Cintailah susu”

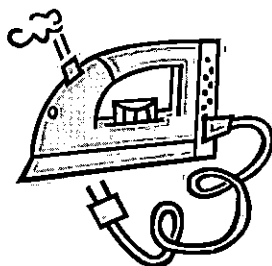
Yakult lady adalah proses pengiriman minuman Yakult (minuman kesehatan) melalui seorang perempuan dewasa yang telah menikah kepada pelanggan dan masyarakat umum, pelanggan di sini adalah keluarga, pedagang dipasar, pedagang toko dan lain-lain. *Yakult lady* dalam

melakukan penjualan dan pengiriman minuman prebiotik ini menggunakan sepeda serta memakai pakaian seragam yang unik. Dalam hal ini ada suatu ketertarikan penulis melihat fenomena *Yakult lady*, tidak hanya kekhasan mereka dengan sepeda dan pakaian seragamnya namun mencoba melihat dari sisi kajian gender.

Penjual Yakult di lapangan didominasi oleh perempuan dengan asumsi untuk menarik penjual dan pelanggan harus dilakukan dengan ramah, senyum, lemah lembut, ramah serta senyum yang manis, sebagaimana stereotipe masyarakat yang diberikan kepada perempuan, namun jika kita bertanya apa senyum yang manis, lembut, serta ramah hanya dimiliki oleh kaum perempuan, dan dalam realitanya banyak kaum lelaki yang ramah, lembut dan memiliki senyum yang manis. Maka selayaknya pekerjaan ini tidak perlu didominasi oleh perempuan, hendaknya laki-laki juga memiliki kesempatan yang luas sebagai penjual keliling daripada *Yakult lady*. Jadi dapat dikatakan bahwa pemilihan penjual yakult keliling tak lepas dari stereotipe masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk lembut, ramah dan murah senyum.

Kasus: Cintailah ususmu, diplesetkan “cintailah susumu”, begitulah bentuk ejekan yang diberikan kepada *Yakult lady*, bahkan mereka dicolek yang merupakan bentuk pelecehan seksual terhadap *Yakult lady*.

Beban Ganda Pekerja Perempuan



Anggapan bahwa perempuan secara alami memiliki sifat rajin, teliti, lemah lembut, pemelihara dan penyayang menyebabkan mereka dianggap paling cocok untuk bekerja mengurus rumah tangga (pekerjaan domestik). Akibat semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya (Faqih, 1997: 24), maka beban pekerjaan perempuan menjadi lebih berat. Pada pekerja perempuan ada kecenderungan beban kerja perempuan menjadi berlipat ganda; di samping harus membereskan

urusan rumahtangga, mereka juga harus bekerja di luar rumah untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Situasi keluarga di mana ibu bekerja menurut data dari International Institute of Population Science, di Indonesia terdapat lebih dari 40 persen perempuan menjalankan fungsi ganda, yaitu membesarkan anak sambil bekerja (www.sinarharapan.co.id). Para ibu yang bekerja tidak hanya melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan dunia pekerjaannya sebagai pedagang keliling melainkan semua aktivitas dan kegiatan kerumah tanggaa semuanya dilakoninya tanpa mempedulikan rasa letih dan lelah setelah mengerjakan tugas publiknya. Mereka dituntut untuk tetap berpartisipasi penuh dalam ekonomi rumah tangga dan pekerjaan rumah tangganya

Bias Gender dan Yakult Lady

Dalam sistem masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin tampak jelas diasumsikan bahwa: suami berkewajiban bekerja disektor publik atau pencari nafkah utama, sedangkan istri lebih diidentikkan dengan kewajiban bekerja di sektor domestik, yaitu rumah tangga. Namun dalam perkembangan zaman sekarang di mana perempuan sudah banyak memasuki sektor publik dalam artian mampu menambah pendapatan keluarga, pekerjaan domestik masih mendominasi dilakukan oleh perempuan tersebut, Alasan yang dikemukakan, kenapa mereka tidak berbagi pekerjaan domestik dengan suami "tidak pantas pekerjaan rumah tangga diberikan kepada suami, aib jika pekerjaan mencuci, memasak dan menstrika diberikan kepada suami mereka". Ditambah dengan ada suatu ketidakyakinan pada suami bahwa pekerjaan domestik akan di kerjakan dengan baik dan rapi, alhasil dengan asumsi demikian aktivitas *Yakult lady* sudah di mulai subuh hari dengan segala tetek bengek pekerjaan domestik, menyiapkan sarapan, mencuci baju, mencuci piring, menyapu rumah dan persiapan barang dagangan untuk berkeliling dengan sepeda sebagai *Yakult lady*, sepulang dari berdagang keliling, sore dan malam, mereka harus menyiapkan makan malam, memperhatikan PR anak dan menyeret baju pada malam hari. Alangkah lelahlah mereka, itulah beban ganda perempuan, yang kadang-kadang perempuan tidak mau mengelakkan dengan alasan "Tidak pantas" stereotipe yang ada dalam masyarakat bahwa apa pun kondisinya pekerjaan domestik adalah pekerjaan perempuan tanpa harus berbagi.



Banyak hal yang sudah diperbincangkan dalam buku ini. Tulisan ini terinspirasi berawal dari isu tentang pentingnya pendidikan multikultural yang memiliki kesetaraan dan keadilan gender. Terdapat beberapa permasalahan keberagaman yang menjadi isu penting perlunya pendidikan multikultural di Indonesia, misalnya; keberagaman etnis, kelompok sosial, agama, ekonomi, dan jenis kelamin atau gender. Dengan demikian, permasalahan keberagaman dalam pendidikan multikultural telah diperbincangkan dalam bab dua buku ini secara tersendiri. Ternyata banyak sekali persoalan-persoalan sosial yang dimunculkan oleh berbagai keberagaman ini, mulai dari persoalan konflik yang berbau SARA sampai pada berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan.

Ketimpangan-ketimpangan gender dalam keluarga, sekolah, dan di luarnya perlu kiranya diperbincangkan dan dicarikan solusinya. Kenyataan hari ini, persoalan yang dihadapi perempuan semakin kompleks. Mulai dari kejahatan seksual, KDRT, perdagangan manusia, tingkat kesehatan perempuan, masih

rendahnya rata-rata pendidikan perempuan serta sampai pada partisipasi politik perempuan yang juga masih rendah di ruang publik. Berangkat dari kenyataan ini, maka penulis berusaha menjadikan buku ini sebuah tulisan dengan judul *Gender dan Pendidikan Multikultural*. Pendidikan multikultural hadir sebagai konsep pendidikan dalam konteks kebangsaan terhadap pengembangan pengakuan terhadap keberagaman, perbedaan dan kemajuan budaya, baik etnis, agama, dan gender. Konsep yang memberikan pemahaman tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, kaya atau miskin, mayoritas dan minoritas.

Oleh karena itu, Bab 3 dalam buku ini, menyoroti tentang marginalisasi perempuan dalam konstruksi gender. Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender di tengah masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor pendidikan, dan faktor interpretasi yang bias terhadap teks-teks agama yang dianut oleh masing-masing umatnya. Setelah menganalisis tentang marginalisasi perempuan dalam konstruksi gender, berikutnya dibahas tentang pendidikan multikultural yang responsif gender.

Pendidikan multikultural responsif gender ini merupakan bab inti dari keseluruhan tulisan ini. Karena bab ini menjelaskan bagaimana pendidikan responsif gender di rumah tangga seharusnya dilakukan sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, tidak saja dalam dunia domestik tetapi juga yang berimbas ke dunia publik. Berikutnya juga membahas bagaimana yang seharusnya pendidikan yang responsif gender terjadi di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan analisis tentang responsif gender di luar sekolah dan di rumah tangga.

Tulisan ini banyak memuat contoh dan kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tulisan ini akan mampu menarik penulisnya untuk membaca, karena pembaca dibawa ke dunia

nyata yang berhadapan dengan mereka pada hari ini. Di samping itu, tulisan ini banyak menggunakan beberapa hasil penelitian-penelitian yang telah kami lakukan. Kami yakin bahwa tulisan ini akan menjadi referensi penting bagi mahasiswa atau generasi muda yang membacanya. Buku ini juga sarat isinya dengan pendidikan karakter, terutama yang berpotensi untuk memecah belah antar sesama, sehingga setelah membaca buku ini mahasiswa mampu memiliki perilaku yang berkeadilan sosial. Di samping itu, buku ini juga dianjurkan untuk dibaca oleh orang tua, keluarga, terutama ibu dan ayah, pengambil kebijakan, birokrat, pemerintah bahkan anggota legislatif. Artinya, semua lapisan masyarakat dianjurkan untuk membaca buku ini, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

REFERENSI

- Abu Ahmadi. 2003. *Ilmu Sosial Dasar: Mata Kuliah Dasar Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Biro Pusat Statistik. *Indikator Sosial Wanita Indonesia Tahun 1992 dan 1995*.
- Brigitte Holzner. 1992. "Gender dan Kerja Rumahan". Majalah *Prisma*. Jakarta.
- Direktorat Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Pesan Standar Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Masyarakat*.
- Edi Hayat dan Miftahus Surur (Ed.). 2005. *Perempuan Multikultural: Negosiasi dan Representasi*, Jakarta: Desantara Utama.
- Gabriel Almond dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik dan Tingkah Laku dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- H.A.R. Tilaar. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Jakarta: Kompas.
- _____. 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hilda Hernandez. 2002. *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content*. New Jersey dan Ohio: Prentice Hall.
- Irsan Azhary Saleh. 1991. *Industri Kecil: Sebuah Kajian dan Perbandingan*, Jakarta: LP3ES.

- James A. Banks. 1987. *Teaching Strategies for Ethnic Studies*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Kelompok Kerja *Convention Watch* Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. 2005. *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ken Suratijah, dkk. 1991. *Pembangunan Pertanian dan Peranan Wanita di Pedesaan Yogyakarta dan Bali*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- M. Ainul Yaqin. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Mansur Faqih. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahatma Gandhi. 2002. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mochtar Naim. 2006. *Tiga Menguak Tabir: Perempuan Minangkabau di Persimpangan Jalan*. Padang: HASANAH.
- Muhammad Aliem. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Kecil/Kerajinan: Pengalaman LP3ES di Kabupaten Kudus Jawa Tengah*. Kajian fiskal dan moneter. Jakarta.
- Nasikun. 2000. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP UI. 2010. *Representatif Perempuan dalam Regulasi Partai Politik dan Pemilu*. Naskah rekomendasi kebijakan.
- Nur Imam Subono. 2000. *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) bekerja sama dengan the Asia Foundation Indonesia.
- Paulo Freire. 2000. *Pendidikan Pembebasan*, Jakarta: LP3S.
- Siti Musdah Muliam dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siti R. Dzuhayatin. 1997. "Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam", dalam *Sang-*

kan Peran Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suyonto. 2006. *Dinamika Pendidikan Nasional dalam Pencaturan Dunia Global*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.

Sumber Internet

bloggerjava.blogdetik.com

[e-dukasi.net], Kelompok Sosial dalam Masyarakat Multikultur, <http://files.sman1-mgl.sch.id/files/Animasii/kelas11/sos/3/3.html>, 2010

fokus.news.viva.co.id, 2012

Cyber Dakwah, <http://cyberdakwah.com/2013/07/mewujudkan-kerukunan-antar-umat-beragama/>, 2013

Hamid Hasan, http://www.pdk.go.id/balitbang/publikasi/jurnal/no-026/pendekatan_hamid_hasan.htm

<http://musik.kapanlagi.com/berita/nasionalisme-dan-etnik-bertemu-di-tembang-harmoni-ec3a33.html>, 2012

<http://emarakhmawati.blogspot.com/3013/02/pentingnya-pendidikan-multikultural-di.html>

http://whechend.weebly.com/uploads/1/9/1/6/19169197/5434265_orig.jpg

Universitas Hukum, [blogspot.com/2011/02/gender dan multicultural](http://blogspot.com/2011/02/gender-dan-multicultural).

yahoo.com/mitos-asal-muasal-larangan-menikah-sunda-jawa-050028273.html

<http://dhiiyan-gildy.blogspot.com/2012/11/konflik-antar-suku-di-papua.htm>

<http://dhiiyan-gildy.blogspot.com/2012/11/konflik-antar-suku-di-papua.htm>